



BERITA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



BULAN AGUSTUS

TAHUN 2026

KLIPING KORAN



Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang Telp. (0751) 7057391 - 705753
Fax. (0751) 7059328 Padang 25133, Sumatera Barat

NO	JUDUL	HALAMAN	
1.	DPRD Sumbang matangkan Perubahan APBD 2026, Infrastruktur dan Ekonomi Jadi Prioritas	1	19. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB Soroti BUMD Sumbang Terus Merugi
2.	Orgen Tunggal Erotis di Kuranji Dikecam, Diminta Diproses Secara Adat	4	20. Muhidi : Diam Bisa Memperluas Kemaksiatan
3.	Puluhan Siswa Dapat Seragam Gratis dari Iqra Chissa	5	21. Ketua DPRD Sumbang Ajak Masyarakat Bangun Budaya Waspada Kamtibmas
4.	Tingkatkan Penerimaan PAD Fraksi DPRD Sumbang Desak Pemprov Siapkan Regulasi Kendaraan Non-BA	6	22. Muhidi : Ketertiban Umum Butuh Kolaborasi, Bukan Sekadar Sanksi
5.	Donizar : Pembangunan Pariwisata Butuh Kebijakan yang Konsisten	9	23. Ketua DPRD Sumbang Ajak Perkuat Kolaborasi
6.	Fraksi DPRD Sumbang Minta Evaluasi Menyeluruh BUMD yang Terus Merugi	10	24. Sitti Izzati Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana di Ketaping
7.	Muhidi : Hak Publik Harus Dijaga	12	25. Wakil Ketua DPRD Sumbang Sosialisasikan Perda Antinarkoba di Dapil
8.	Rehabilitasi Jalan Padang Sawah – Kumpulan Dimulai	14	26. Masyarakat Didorong Berperan Aktif dalam Pembangunan Nagari
9.	Komisi III DPRD Sumbang Minta KDMP Jawab Krisis Pupuk dan Stabilkan Harga Panen	16	27. Para Pecandu Narkoba Bukan Sampah Masyarakat
10.	Komisi III Minta KDMP Jawab Krisis PUPUK dan Stabilkan Harga Panen	18	28. Tekan Kasus Narkoba di Sumbang
11.	DPRD Sumbang Dorong KDMP Nagari Sariaak Jadi Distributor Pupuk Bersubsidi	20	29. Rony Mulyadi Dorong Penguatan Koperasi dan UMKM
12.	Penguatan Payung Lembaga dan Hukum Adat DPRD Sumbang Kaji Revisi Perda Nagari	22	30. Wirman Dt. Pangeran Dorong Perlindungan Hutan Berbasis Nagari
13.	Ketua DPRD Sumbang Ajak Seluruh Elemen Bangun Budaya Kewaspadaan Dini	23	31. Evi Yandri Minta Pecandu Narkoba Direhabilitasi, Bukan Dijauhi
14.	Ketua DPRD Sumbang Ajak Masyarakat Bangun Budaya Kewaspadaan Dini	25	32. Muhidi Tekankan Pendidikan Tanpa Diskriminasi
15.	Budayakan Kewaspadaan Dini Cegah Gangguan Sosial	27	33. Komisi V DPRD Sumbang Pelajari Tata Kelola Olahraga Sumsel, Cari Model Pembinaan Atlet
16.	Wakil Ketua DPRD Sumbang Iqra Chissa Waspada Narkoba Varian Baru	28	34. DPRD Sumbang Matangkan Pembahasan Ranperda Keolahragaan
17.	Ketua DPRD Sumbang : Stabilitas Sosial Perkuat Iklim Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi	29	35. Simak Pidato Presiden Prabowo, Muhidi Tekankan Pentingnya Evaluasi Kinerja
18.	Ketua DPRD Sumbang Dorong Padang Jadi Penggerak Ekonomi Sumbang	31	36. Ketua Komisi IV Ajak Masyarakat Siaga Hadapi Bencana
			37. 762 Anggota Kontingen Pramuka Sumbang Menuju Jamnas XII
			38. Evi Yandri Ajak Warga Rangkul Pecandu Narkoba untuk Direhabilitasi
			39. Ketua DPRD Sumbang Dorong Pendidikan Inspirator Siswa
			40. Warga Ketaping Diajak kenali Potensi Bencana

41. Ketua DPRD Sumbang Dorong Guru Jadi Inspirator Peserta Didik	63	62. DPRD Sumbang Tetapkan Rancangan KUA-PPAS	98
42. Nanda Satria Imbau Warga Tidak Panik dan Tetap Waspada	66	63. JDIH DPRD Sumbang Didorong Makin Dekat dengan Masyarakat	100
43. Nanda Satria Imbau Warga Padang Padang Pakai Masker Jaga Kesehatan di tengah Udara Berkabut	67	64. Wakil Ketua DPRD Sumbang Evi Yandri Serahkan Bantuan Becak Motor	101
44. Komisi V DPRD Sumbang Matangkan Pembahasan Ranperda Keolahragaan	68	65. DPRD Sumbang Raih Penghargaan JDIH Nasional Tahun 2026	103
45. DPRD Sumbang Ketok Palu KUA-PPAS 2027 dan Perubahan 2026	70	66. Ketua DPRD Sumbang Serap Aspirasi Warga Lubuk Minturun	104
46. KUA-PPAS 2027 Disepakati Rp 5,976 Triliun, DPRD Sumbang Dorong Optimalisasi Pendapatan	71	67. Rafdinal Bekali Perempuan Aur Kuning Keterampilan Menjahit	105
47. Pemprov Sumbang Diminta Tidak Tebang Pilih	73	68. JDIH DPRD Sumbang Raih Peringkat IV Nasional	107
48. DPRD Sumbang Dorong Percepatan Pembangunan Daerah	74	69. Masyarakat Harus Manfaatkan Program Pembangunan	109
49. DPRD Sumbang dan Pemprov Sepakati KUA-PPAS 2027 Rp 5,976 Triliun	76	70. JDIH DPRD Sumbang Lima Besar Nasional	110
50. DPRD Sumbang Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden	78	71. Fraksi-Fraksi DPRD Sumbang Beri Catatan Strategis untuk APBD 2027 yang Lebih Produktif	111
51. KUA-PPAS 2027 Disepakati Rp. 5,976 Triliun	80	72. Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Jemput Aspirasi Masyarakat	114
52. Dony Oskaria, Kado 17 Agustus untuk Presiden Prabowo dan Pemuda Minangkabau Merajut Indonesia Maju	82	73. Fraksi-Fraksi DPRD Sumbang Dorong Belanja 2027 Tepat Sasaran	118
53. Bank Nagari Salurkan Deviden dan CSR Rp 381,49 M	85	74. Sumbang Dituntut Gerak Lebih Cepat	122
54. Lima Keltan Terima Bantuan Betor	87	75. Dari Jalan Usaha Tani, Surau Hingga Budaya Jadi Aspi	124
55. Bank Nagari Salurkan Dividen dan Bantuan Pendidikan Rp. 341, 876 Miliar	88	76. Reses di Alai Parak Kopi, Muhidi Janji Kawal Pembenahan Drainase	125
56. Lima Kelompok Tani di Kuranji Terima Bantuan Bentor	89	77. Wakil Ketua DPRD Sumbang Evi Yandri Serap Aspirasi SMAN 17 Padang	126
57. Bank Nagari Salurkan Rp 341,89 Miliar	90	78. Dari Betor, Evi Bicara Masa Depan Petani	129
58. Evi Yandri Salurkan Bentor Pokir untuk Petani Kuranji	92	79. Evi Yandri Janji Perjuangkan Fasilitas Sekolah Terdampak Banjir	131
59. Perkuat Reformasi Hukum di Sumbang	94	80. Ketua DPRD Sumbang Tekankan Pentingnya Pendidikan Hingga SMA	135
60. Rafdinal Dorong Keterampilan Menjahit bagi Kaum Ibu di Bukittinggi	95	81. Zulkenedi Said Tampung Aspirasi SMAN 1 Pasaman	137
61. Tak Sekadar Raih Penghargaan, JDIH DPRD Sumbang Permudah Masyarakat Akses Produk Hukum	96	82. Anggota DPRD Sumbang Indra Catri Tampung Aspirasi Masyarakat Agama	138
		83. Komisi V Pelajari Tata Kelola Sektor Olahraga Sumsel	140
		84. Rihwan Dt. Tambijo Siap Bantu SMKN 1 Lubuk Basung	142
		85. Masyarakat Pandai Sikek Mengadu ke DPRD Sumbang	143

86. Kelanjutan Tol Padang Pekanbaru Kembali Tuai Penolakan	145
87. Nanda Satria Minta Hakim Pertimbangkan Realitas Sosial	146
88. Ekonomi Keluarga Sulit, Ketua DPRD Sumbang Dorong Anak Tetap Sekolah	147
Hingga SMA/SMK	
89. Nanda Satria Minta Yogi Diberi Keringanan Hukuman	149
90. Wakil Ketua DPRD Sumbang Perjuangkan Fasilitas Sekolah Pasca Banjir	151
91. Nofrizon Desak Tes Psikologi Pejabat	153
92. Komisi II DPRD Sumbang Matangkan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	154
93. Renja, Instrumen Efektivitas Program Kerja	156
94. Akomodir Laporan Reses dalam Penyusunan RKPD	157
95. DPRD Sumbang Sampaikan Laporan Reses dan Kinerja	159
96. Wakil Ketua DPRD Sumbang Nanda Satria Minta Yogi Cilang Diberi Keringan	161
97. Komisi II Matangkan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	162
98. Sempurnakan Penyusunan Ranperda DPRD Sumbang Gelar Diskusi Publik	164
99. DPRD Sumbang Sampaikan Aspirasi Reses ke Pemprov	168
100. DPRD Sumbang Tetapkan Renja 2027 dan Serahkan Hasil Reses kepada Pemprov	172
101. Bupati John Kenedy Aziz Ingatkan Pengakuan Adat Harus Tetap Menjunjung HAM	174
102. Wakil Ketua DPRD Sumbang Salurkan 140 Laptop ke Dua SMA	175
103. Hukum Adat Merupakan Bagian Dari Kekayaan Hukum	177
104. Penguatan Hukum Adat Harus Sejalan Hukum Nasional	178
105. DPRD Perkuat Regulasi Pertanian dan Pendidikan	179



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SABTU, 1 AGUSTUS 2026	6

DPRD Sumbar Matangkan Perubahan APBD 2026, Infrastruktur dan Ekonomi Jadi Prioritas

KOMISI-KOMISI DPRD Provinsi Sumbar terus mematangkan pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting dalam penyusunan Perubahan APBD 2026 yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendalaman dilakukan melalui rapat maraton selama beberapa hari oleh lima komisi DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja Pemerintah Provinsi Sumbar. Dalam rapat tersebut, setiap komisi mencermati usulan program, target kinerja, hingga kebutuhan anggaran yang diajukan masing-masing OPD agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut setelah Pemerintah Provinsi Sumbar menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Senin (27/7). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa Putra, itu mengungkapkan bahwa perubahan APBD didasarkan pada adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp284,67 miliar serta tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Usai penyampaian nota pengantar, masing-masing komisi DPRD langsung menggelar pembahasan bersama OPD mitra kerja guna memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan daerah.

Iqra Chissa Putra menjelaskan, perubahan APBD merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur penyesuaian anggaran apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, pergeseran anggaran, pemanfaatan SILPA, maupun kondisi darurat dan keadaan mendesak.

Berdasarkan laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai 36,38 persen, sedangkan realisasi pendapatan mencapai 48,92 persen. Pemerintah daerah juga memiliki SILPA APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp284,6 miliar yang dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berjalan. Selain itu, tambahan TKD dari pemerintah pusat menjadi dasar penyesuaian APBD agar lebih akomodatif, produktif, dan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Ia menambahkan, penyusunan Perubahan KUA dan PPAS mengacu pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dokumen tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

BELANJA DAERAH MENINGKAT

Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan turun tipis sebesar Rp18,85 miliar menjadi sekitar Rp6,27 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski demikian, tambahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat diperkirakan mampu menjaga kapasitas fiskal daerah.

Di sisi belanja, pemerintah mengusulkan kenaikan anggaran dari sekitar Rp6,40 triliun menjadi Rp7,08 triliun atau bertambah lebih dari Rp671 miliar. Peningkatan terbesar terjadi pada belanja modal yang melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar Rp952 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik, rehabilitasi pascabencana, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) diusulkan meningkat dari Rp25 miliar menjadi Rp49,28 miliar guna memperkuat kesiapsiagaan pemerintah menghadapi kondisi darurat. Hasil pemeriksaan BPK RI juga mencatat SILPA Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp284,66 miliar, lebih tinggi dibandingkan asumsi awal. Dana tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan perubahan APBD, meskipun pemerintah masih memproyeksikan defisit anggaran sekitar Rp612,48 miliar yang akan dibahas bersama DPRD.

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

RESPONS TERHADAP DINAMIKA DAERAH

Sejalan dengan pembahasan yang berlangsung di DPRD, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 merupakan respons terhadap berbagai perkembangan strategis. Di antaranya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar pada akhir 2025, penyesuaian kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat, serta penyelarasan dengan visi dan misi kepala daerah dan program nasional Asta Cita.

Menurut Vasko, perekonomian Sumbar mulai menunjukkan tren pemulihan. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi daerah tumbuh 5,02 persen secara tahunan (year on year), me-
ningkat dibandingkan Triwulan IV Tahun 2025 yang hanya tumbuh 1,69 persen akibat dampak bencana.

Pertumbuhan tersebut ditopang sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 17,77 persen, diikuti jasa lainnya sebesar 9,10 persen, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,94 persen.

Pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi semakin menguat pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026. Kondisi tersebut didorong meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, membaiknya investasi, serta mulai beroperasinya Jalan Tol Padang-Sicincin yang diyakini mampu memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, sekaligus menarik investasi baru ke Sumbar.

Meski demikian, Vasko mengakui Sumbar masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah rata-rata nasional, ketimpangan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, ancaman bencana, penguatan UMKM, hingga peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada enam kebijakan utama, yakni mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui realokasi belanja, menjaga daya beli masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), memperkuat sektor unggulan daerah, memperluas kesempatan kerja melalui pelatihan vokasi, serta meningkatkan efisiensi belanja pemerintah agar memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumbar. (*)



NEWS

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA-PPAS 2026: Rapat pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang digelar komisi-komisi DPRD Provinsi Sumbar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Pemprov Sumbar di Gedung DPRD Sumbar, Padang.

**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SABTU, 1 AGUSTUS 2026	3

Orgen Tunggal Erotis di Kuranji Dikecam, Diminta Diproses Secara Adat

PADANG, KP — Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman mengecam pertunjukan orgen tunggal yang diiringi tarian erotis di Rimbo Tarok, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. Aksi yang videonya viral di media sosial itu dinilai mencoreng citra Kota Padang dan Sumatera Barat serta bertentangan dengan norma adat dan hukum.

Evi Yandri menilai permintaan maaf dari penyelenggara belum cukup menyelesaikan persoalan.

Menurutnya, kejadian tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum maupun penyelesaian secara adat agar tidak terulang.

"Sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar dan anak nagari, saya mengecam keras kejadian ini. Tidak cukup hanya permintaan maaf pelaku," katanya melalui sambungan telepon, kemarin.

Ia mengingatkan penyelenggara dan pemilik

orgen tunggal agar tidak lagi menghadirkan pertunjukan serupa di Kota Padang maupun Sumatera Barat.

Menurutnya, tarian yang bermuatan pornografi berpotensi melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurutnya, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 mengatur ancaman pidana terhadap pelaku, pihak yang menjadi orang lain sebagai objek bermuatan pornografi, hingga pihak yang mempertontonkan muatan pornografi di ruang publik dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda miliaran rupiah.

Selain aspek hukum, Evi menilai peristiwa tersebut juga melanggar nilai adat yang selama ini dijunjung masyarakat Nagari Pauh IX. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui lembaga adat.

"Saya menyarankan Kerapatan Adat Nagari memproses persoalan ini secara adat dengan memanggil pihak yang terlibat bersama ninik mamaknya. Harus ada sanksi adat agar menjadi pembelajaran," ujarnya.

Evi juga mengapresiasi langkah cepat Camat Kuranji, Polsek Kuranji, Satpol PP, dan Lurah Kuranji yang telah memanggil pihak penyelenggara untuk dimintai klarifikasi.

Namun, menurutnya, penyelesaian tidak boleh berhenti pada permintaan maaf semata, karena masyarakat menginginkan adanya efek jera terhadap pelanggaran yang dinilai mencederai norma sosial dan adat di Nagari Pauh IX.

Sebelumnya, pemilik orgen tunggal JMD Music, Putra, telah memenuhi panggilan pemerintah kecamatan dan menyampaikan permintaan maaf atas pertunjukan yang berlangsung pada acara perayaan ulang tahunnya. (fai)



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman menyampaikan keterangan terkait viralnya pertunjukan orgen tunggal yang diiringi tarian erotis di Rimbo Tarok, Kelurahan Kuranji.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Sabtu, 1 Agustus 2026 (17 Syafar 1448 H)	6

AWAL TAHUN AJARAN BARU

Puluhan Siswa Dapat Seragam Gratis dari Iqra Chissa

PADANG - Mengawali dimulainya tahun ajaran baru, puluhan siswa dari keluarga kurang mampu di Kota Padang menerima bantuan seragam dan tas sekolah gratis dari Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, M. Iqra Chissa Putra, S.T., M.M.

Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Kota Padang, Jumat (31/7).

Program ini menyasar keluarga yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4 sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan pendidikan anak-anak.

Sebanyak 28 siswa menerima bantuan seragam sekolah dan tas, terdiri dari 19 siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 9 siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dalam kesempatan itu, Iqra Chissa mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan upaya untuk membantu meringankan beban keluarga



SERAHKAN - Wakil ketua DPRD Sumatera Barat, M. Iqra Chissa Putra, S.T., M.M. menyerahkan bantuan seragam dan tas sekolah gratis kepada siswa dari keluarga kurang mampu di Kota Padang. (1st)

dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. "Harapan saya, semoga bantuan ini bisa meringankan beban keluarga dalam penyediaan seragam sekolah. Selain itu, saya juga berharap bantuan ini dapat memotivasi para siswa agar lebih rajin belajar dan terus bersemangat

dalam meraih cita-citanya," ujarnya.

Menurut Iqra Chissa yang juga Ketua PASI Sumbar ini, pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan generasi muda.

Karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar setiap anak

memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Suasana penyerahan bantuan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Para orang tua yang hadir menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan kepada anak-anak mereka menjelang tahun ajaran baru.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padang Ertzal, Wakil Ketua Bidang Organisasi Neko Rasaki, Wakil Ketua Bidang Kepemudaan Deni Pratama, Wakil Ketua Bidang MPO dan Komunikasi Digital Eko Muhandi, serta jajaran pengurus Partai Golkar Kota Padang lainnya.

Melalui kegiatan sosial ini, diharapkan semakin banyak anak-anak di Kota Padang yang dapat menjalani proses belajar dengan lebih percaya diri dan semangat, tanpa terkendala oleh kebutuhan perlengkapan sekolah. (009)

NEWS

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Mendukung Kebijakan Masyarakat	SABTU, 1 AGUSTUS 2026	5

TINGKATKAN PENERIMAAN PAD

Fraksi DPRD Sumbang Desak Pemprov Siapkan Regulasi Kendaraan Non-BA

PADANG, HALUAN – Fraksi-fraksi DPRD Sumatera Barat mendesak Pemerintah Provinsi Sumbang menyiapkan kebijakan yang efektif untuk kendaraan bermotor berpelat nomor luar daerah (non-BA) yang beroperasi secara tetap di wilayah Sumbang.

Langkah ini dinilai perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Desakan itu mengemuka dalam rapat kerja pembahasan akhir Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar DPRD Sumbang baru-baru ini.

Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo menegaskan, pemerintah daerah perlu segera menyusun aturan yang mampu mempercepat proses mutasi kendaraan operasional perusahaan menjadi kendaraan berpelat BA.

Sasaran kebijakan tersebut meliputi kendaraan sektor pertambangan, perkebunan, konstruksi, hingga angkutan logistik yang beroperasi secara

tetap di Sumatera Barat.

Menurutnya, potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut masih belum tergarap optimal karena banyak kendaraan operasional perusahaan yang beraktivitas di Sumbang, tetapi masih terdaftar di provinsi lain.

“Kendaraan-kendaraan perusahaan tersebut telah memanfaatkan infrastruktur jalan di Sumatera Barat, jalan-jalan juga banyak yang rusak karena aktivitas lalu lintas perusahaan ini, tetapi kontribusinya terhadap PAD belum optimal karena masih terdaftar di provinsi lain. Karena itu, kami meminta Pemprov menyiapkan kebijakan yang mendorong kendaraan non-BA dimutasikan menjadi berpelat BA sehingga penerimaan daerah dari sektor ini dapat dioptimalkan,” ujarnya.

Selain mendorong lahirnya kebijakan terhadap kendaraan non-BA, Fraksi Gerindra juga menilai peningkatan PAD harus

dibarengi dengan reformasi pelayanan perpajakan daerah. Digitalisasi layanan Samsat, perluasan pelayanan jemput bola hingga ke pelosok, serta penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Pandangan serupa disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Zaksai Kasni. Menurutnya, peningkatan PAD tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga harus didukung peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan penataan kendaraan non-BA yang beroperasi di Sumatera Barat agar memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicara Nofrizon meminta pemerintah daerah mengambil langkah yang lebih komprehensif untuk memperkuat penerimaan pajak daerah. Upaya tersebut, ka-

KING
WS!



KLIPING BERITA

tanya, dapat dilakukan melalui penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyederhanaan sistem administrasi perpajakan.

Fraksi PPP juga berpandangan perlu adanya aturan yang lebih efektif bagi kendaraan berpelat luar daerah yang secara tetap beraktivitas di Sumbar. Kebijakan tersebut

diharapkan, mampu mendorong pemilik kendaraan melakukan mutasi ke pelat BA, terutama kendaraan yang telah berpindah kepemilikan melalui transaksi jual beli, sehingga potensi penerimaan PKB dan BBNKB dapat dimaksimalkan.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan-PKB DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman. Ia mendorong pemerintah menetapkan kebijakan yang lebih mengikat terhadap kendaraan non-BA, terutama angkutan batu bara, angkutan kelapa sawit, kendaraan operasional proyek, serta armada sektor pertambangan yang beraktivitas di Sumatera Barat agar segera dimutasikan menjadi kendaraan berpelat BA.

Tidak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan-PKB juga mengusulkan adanya kerja sama antara pemerintah daerah dengan showroom kendaraan bermotor. Melalui skema tersebut, setiap transaksi jual beli kendaraan non-BA diharapkan disertai kewajiban melakukan mutasi menjadi kendaraan berpelat BA.

"Melalui skema tersebut, setiap transaksi jual beli kendaraan non-BA diharapkan disertai kewajiban melakukan mutasi menjadi kendaraan berpelat BA. Dengan demikian, basis penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat diperluas sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Sumatera Barat," kata Albert.

Secara umum, fraksi-fraksi DPRD Sumbar berpandangan

optimalisasi PAD dari sektor kendaraan bermotor tidak dapat hanya mengandalkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga dituntut menghadirkan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi di lapangan. Dengan semakin banyak ken-

daraan yang terdaftar di Sumatera Barat, potensi penerimaan PKB dan BBNKB diyakini akan meningkat sehingga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan. (adv)



Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria memimpin jalannya rapat.

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



Juru bicara Fraksi Golkar Zaksai Kasni saat menyerahkan dokumen pendapat akhir fraksinya kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria sebagai pimpinan rapat. Juru bicara Fraksi Golkar Zaksai Kasni saat menyerahkan dokumen pendapat akhir fraksinya kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria sebagai pimpinan rapat.



Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo saat menyerahkan dokumen pendapat akhir fraksinya kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria sebagai pimpinan rapat.



Anggota DPRD Sumbar dalam rapat kerja yang digelar.



Anggota DPRD Sumbar mengikuti jalannya rapat kerja.



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
MINGGU	MINGGU, 2 AGUSTUS/	1

Donizar: Pembangunan Pariwisata Butuh Kebijakan yang Konsisten



ANGGOTA Komisi V
DPRD Provinsi Sumbar,
Donizar. IST

PADANG, HALUAN — Keberlanjutan program Satu Kabupaten/Kota Satu Destinasi Wisata menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD

Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumbar, Donizar, mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam melanjutkan program yang sebelumnya telah disepakati dan didukung melalui penganggaran.

Donizar menilai program tersebut tidak semestinya berhenti hanya karena terjadi pergantian pimpinan di organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, kebijakan yang telah dirancang untuk memperkuat sektor pariwisata harus tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

"Program Satu Kabupaten Satu Destinasi Wisata itu sudah menjadi kesepakatan dan pernah berjalan, tetapi kenapa sekarang tidak ada lagi kelanjutannya?" kata Donizar.

Ia mengingatkan bahwa program tersebut sebelumnya mendapat dukungan melalui skema *sharing budgeting* antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia mempertanyakan alasan program tersebut tidak lagi menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

"Kalau dulu sudah menjadi atensi dan sudah

diberikan dukungan anggaran, kenapa sekarang tidak lagi menjadi perhatian," ujarnya.

Menurut Donizar, pembangunan sektor pariwisata membutuhkan kebijakan yang konsisten agar setiap daerah memiliki destinasi unggulan yang mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Ia menegaskan pergantian kepala dinas merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan. Namun, perubahan pejabat tidak boleh mengubah arah pembangunan yang telah dirancang dan disepakati bersama.

"Kepala dinas boleh berganti, tetapi program yang memberi manfaat bagi daerah harus tetap berjalan sesuai komitmen yang sudah

disepakati," katanya.

Donizar pun berharap Pemprov Sumbar melalui Dinas Pariwisata kembali menjadikan program tersebut sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, keberlanjutan program akan memberikan kepastian bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam mengembangkan potensi wisata masing-masing.

Sorotan itu disampaikan anggota DPRD Sumbar tersebut dalam rangkaian pembahasan Perubahan KUA-PPAS APBD Sumbar TA 2026. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam penyesuaian arah pembangunan daerah dengan kondisi fiskal serta kebutuhan prioritas yang berkembang selama tahun anggaran berjalan. (h/len)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SENIN, 3 AGUSTUS JULI 2026	2

Fraksi DPRD Sumbar Minta Evaluasi Menye- luruh BUMD yang Terus

Merugi

PADANG, HALUAN — Fraksi-fraksi DPRD Sumatera Barat meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) yang belum menunjukkan kinerja optimal, terutama perusahaan daerah yang terus mengalami kerugian.

Penekanan ini disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sumbar saat rapat kerja yang digelar DPRD Sumbar baru-baru ini.

Juru Bicara Fraksi NasDem Irwan Zuldani menegaskan, penyertaan modal daerah kepada BUMD merupakan bentuk investasi publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, keberadaan BUMD yang terus merugi tidak boleh dianggap sebagai kondisi yang wajar.

“Setiap penyertaan modal yang bersumber dari APBD harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Oleh sebab itu, kondisi BUMD yang berkinerja kurang baik dan terus mengalami kerugian harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurut Irwan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan evaluasi berbasis kinerja secara objektif terhadap

seluruh BUMD. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap rupiah penyertaan modal yang telah dikucurkan benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga mendorong pemerintah mengambil langkah tegas terhadap BUMD yang dalam kurun waktu tertentu tidak menunjukkan prospek perbaikan yang jelas.

“Apabila hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya prospek perbaikan yang memadai, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah restrukturisasi atau kebijakan lain yang lebih efektif untuk melindungi kepentingan keuangan daerah,” katanya.

Fraksi Partai NasDem berharap pengelolaan BUMD ke depan dilakukan secara lebih profesional, transparan, dan

akuntabel sehingga mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Senada, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar,

Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo mengatakan, hingga kini hanya sedikit BUMD yang mampu memberikan dividen secara signifikan. Sebaliknya, beberapa perusahaan daerah justru terus membebani keuangan pemerintah.

Dikatakan Nurkhalis, Fraksi Gerindra berpendapat bahwa memang sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD dengan indikator yang objektif.

“BUMD harus dikelola secara profesional, memiliki

target bisnis yang jelas, diawasi secara ketat, dan apabila terus merugi tanpa prospek perbaikan maka pemerintah harus berani melakukan restrukturisasi bahkan likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Nurkhalis. (h/len)

NEWS

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



JURU Bicara Fraksi NasDem Irwan Zuldani (kiri) dan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo (kanan).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SENIN 3 AGUSTUS 2026	3

Muhidi: Hak Publik Harus Dijaga

KETUA DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan pentingnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Kertertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sebagai pondasi menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik.

Menurut Muhidi, kehidupan bermasyarakat membutuhkan aturan yang jelas agar hak setiap warga tetap terlindungi. Salah satu fokus utama dalam perda tersebut adalah penataan ketertiban jalan, termasuk mencegah penggunaan fasilitas umum yang mengganggu kepentingan masyarakat luas.

"Perda ini dirancang sebagai payung hukum untuk menjamin kenyamanan publik di seluruh wilayah Sumatera Barat. Salah satu poin penting yang diatur adalah ketertiban jalan, yang bertujuan melindungi hak-hak setiap warga negara," ujar Muhidi saat sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2020.

Dorongan penegakan perda itu mendapat dukungan dari organisasi perempuan adat Minangkabau. Bundo Kandung Kecamatan Padang Selatan menyatakan siap menjadi mitra pemerintah dalam membangun budaya tertib melalui edukasi langsung kepada masyarakat.

Ketua Bundo Kandung Kecamatan Padang Selatan, Etris Trianai, menilai sosialisasi regulasi masih sangat dibutuhkan karena belum semua warga memahami hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan ruang publik.

"Kami mendukung penuh Perda Nomor 5 Tahun 2020. Sosialisasi seperti ini sangat krusial agar pemahaman masyarakat terhadap isi aturan dapat terus diperkuat," katanya.

Etris secara khusus me-

nyoroti persoalan yang kerap memicu polemik di tengah masyarakat, yakni penggunaan bahu jalan untuk pesta pernikahan maupun kegiatan adat. Menurutnya, tradisi dan budaya tetap harus dihormati, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan hak pengguna jalan lainnya.

"Aktivitas masyarakat tentu harus dihormati, tetapi jangan sampai mengganggu hak pengguna jalan lain. Semua pihak harus saling menghargai agar kenyamanan bersama tetap terjaga," ujarnya.

Sebagai organisasi yang dekat dengan masyarakat, Bundo Kandung siap mengambil peran aktif menyosialisasikan perda secara persuasif agar kesadaran hukum tumbuh dari lingkungan keluarga hingga tingkat komunitas.

Senada dengan itu, Camat Padang Selatan, Wilman Mukhtar, mengajak masyarakat tidak hanya memahami aturan, tetapi juga berperan aktif mengawasi penerapannya. Ia menilai keberhasilan perda sangat bergantung pada partisipasi warga dalam menjaga lingkungan masing-masing.

"Jika ada potensi gangguan atau persoalan di lapangan, segera komunikasikan dengan pemerintah setempat. Kita harus selalu ingat bahwa dalam ruang publik, ada hak orang lain yang wajib dihormati," kata Wilman.

Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan tokoh adat diharapkan mampu memperkuat budaya tertib di Sumbar. Penegakan Perda Trantibumlinmas pun tidak sekadar menjadi urusan pemerintahan, melainkan upaya membangun kesadaran kolektif bahwa ruang publik adalah milik bersama yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. (*)

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar Muhidi bersama Kasatpol PP Sumbar Irwan ketika sosialisasi Perda No 5 Tahun 2020 tentang Trantibumlinmas di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar di Padang, baru-baru ini.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi bersama peserta sosialisasi Perda No 5 Tahun 2020 tentang Trantibumlinmas di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar di Padang, baru-baru ini.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi menyampaikan pemaparannya dalam sosialisasi Perda No 5 Tahun 2020 tentang Trantibumlinmas di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar di Padang, baru-baru ini.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 4 AGUSTUS JULI 2026	2

KHAIRUDDIN SIMANJUNTAK WUJUDKAN ASPIRASI
MASYARAKAT

Rehabilitasi Jalan Padang Sawah-Kumpulan Dimulai

PASAMAN, HALUAN- Penantian panjang masyarakat terhadap perbaikan ruas Jalan Padang Sawah-Kumpulan (P.068) Paket 2 akhirnya mulai terjawab. Proyek rehabilitasi jalan senilai Rp13,6 miliar resmi memasuki tahap pelaksanaan, sebagai bentuk nyata realisasi aspirasi yang selama ini diperjuangkan Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak.

Berdasarkan data proyek, rehabilitasi ruas jalan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp13.599.232.811 dengan masa pelaksanaan selama 160 hari kalender, terhitung sejak 14 Juli 2026. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Aura Mandiri Sejahtera melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Bagi masyarakat Pasaman dan Pasaman Barat, pembangunan ruas jalan ini bukan sekadar proyek infrastruktur. Jalur Padang Sawah-Kumpulan merupakan akses strategis yang menghubungkan Padang, Pasaman, hingga Pasaman Barat. Selama bertahun-tahun, kondisi jalan yang rusak menjadi keluhan masyarakat karena menghambat mobilitas, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta meningkatkan biaya transportasi.

Di balik keberhasilan memperjuangkan pembangunan tersebut, tersimpan perjalanan hidup Khairuddin Simanjuntak yang penuh perjuangan. Jauh sebelum menjadi anggota DPRD, putra Nagari Panti, Kabupaten Pasaman itu pernah

bekerja sebagai penambang pasir di sungai untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus membiayai pendidikannya setelah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Pengalaman hidup yang keras membentuk karakter pekerja keras dan dekat dengan kehidupan masyarakat kecil.

Setelah merantau ke Jambi, Batam, dan Medan, Khairuddin menjalani berbagai profesi, mulai dari kernet, sopir, hingga aktif sebagai wartawan. Profesi jurnalis yang pernah dijalannya membuatnya semakin memahami persoalan masyarakat dan terbiasa menyuarakan kepentingan publik. Pengalaman tersebut kemudian menjadi bekal berharga ketika ia memutuskan terjun ke dunia politik.

Karier politik Khairuddin dimulai pada Pemilu 2004 melalui Partai Bintang Reformasi (PBR). Meski belum berhasil, ia tidak pernah berhenti mengabdikan kepada masyarakat. Kepercayaan publik akhirnya mengantarkannya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pasaman periode 2009-2014, kembali

terpilih pada periode 2014-2019 melalui Partai Gerindra, kemudian melangkah ke DPRD Provinsi Sumatera Barat pada periode 2019-2024. Pada Pemilu 2024, ia kembali dipercaya masyarakat dan kini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat.

Selain di bidang politik, Khairuddin juga dipercaya sebagai Ketua Umum FORKI Sumatera Barat periode 2025-2029.

Rehabilitasi Jalan Padang Sawah-Kumpulan diharapkan mampu meningkatkan konek-





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



LAKUKAN PENINJAUAN - Khairuddin Simanjuntak saat meninjau proyek proyek rehabilitasi jalan Padang Sawah-Kumpulan. IST

tivitas wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, menekan biaya logistik masyarakat, serta membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi di Pasaman dan Pasaman Barat.

Apresiasi atas terealisasinya pembangunan itu juga disampaikan Ulul Azmi. Menurutnya, pembangunan ruas jalan tersebut merupakan investasi jangka

panjang bagi kemajuan daerah.

"Ruas jalan ini bukan sekadar aspal dan beton, tetapi urat nadi perekonomian masyarakat. Harapan yang telah lama dinantikan akhirnya mulai terwujud. Kami berharap pekerjaan ini selesai tepat waktu, memenuhi standar teknis, dan diawasi dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Dimulainya rehabilitasi Jalan Padang Sawah-Kumpulan menjadi bukti bahwa perjuangan yang dilakukan secara konsisten dapat menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan menjadi pemicu pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Pasaman dan Pasaman Barat. (h/kié)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	JUMAT, 7 AGUSTUS 2026	9

DPRD Sumbar Dorong KDMP Nagari Sariak Jadi Distributor Pupuk Bersubsidi

AGAM, HALUAN — Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Nagari Sariak, Kabupaten Agam, menjadi distributor pupuk bersubsidi guna memenuhi kebutuhan petani.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat pasokan pupuk bersubsidi di Nagari Sariak hingga kini belum terpenuhi secara optimal.

Dorongan itu disampaikan saat Komisi III DPRD Sumbar melakukan kunjungan kerja ke KDMP Nagari Sariak, Sabtu (1/8).

Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Rafdinal, mengatakan keberadaan KDMP diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan distribusi pupuk sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

"Kita berharap KDMP dapat menjadi distributor pupuk di Nagari Sariak dan

sekitarnya, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi," ujarnya.

Legislator daerah pemilihan Agam-Bukittinggi itu menegaskan, program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah pusat harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

Menurut Rafdinal, keberhasilan pengembangan KDMP membutuhkan koordinasi lintas sektor serta perencanaan usaha yang matang. Dengan demikian, koperasi tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian tanpa mematikan usaha yang telah berkembang.

"Pengelolaan dan pengembangan usaha, termasuk sistem penjualannya, harus dirancang sebaik-baiknya. Kami berharap KDMP mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal tanpa mematikan usaha yang sudah ada," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Agus Syahdeman, menilai sebagian besar KDMP yang telah dikunjungi masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola koperasi.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut mental dan kepercayaan diri pengurus yang masih ragu dalam menjalankan koperasi.

"Dari beberapa KDMP yang kami kunjungi, masih banyak persoalan. Salah satunya persoalan psikologis. Ada

pengurus yang belum percaya diri, bahkan sudah pesimis. Kami ingin mengetahui apakah kondisi serupa juga terjadi di KDMP Nagari Sariak," katanya.

Ia menilai keraguan tersebut dipengaruhi pengalaman masyarakat terhadap koperasi pada masa lalu, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), yang dinilai belum mampu memberikan manfaat secara optimal.

Padaahal, menurut Agus, program KDMP merupakan program strategis pemerintah pusat yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional.

Karena itu, setiap KDMP didorong memulai usaha secara

mandiri melalui berbagai unit usaha, seperti simpan pinjam, penyediaan sembako, hingga usaha produktif lainnya.

"Dari situ akan terlihat sejauh mana keseriusan pengurus dalam mengembangkan KDMP agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Sumbar juga berdialog dengan pengurus KDMP Nagari Sariak. Ketua KDMP Nagari Sariak yang akrab disapa Inyik mengatakan gerai koperasi telah rampung 100 persen dan siap beroperasi.

Pada tahap awal, koperasi akan membuka sejumlah unit usaha, antara lain penyediaan

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

sembako, penyaluran gas LPG, dan layanan apotek.

Selain itu, KDMP akan mengembangkan potensi Nagari Sariak sebagai sentra hortikultura melalui kolaborasi dengan kelompok tani. Koperasi juga menyiapkan langkah untuk menjaga stabilitas harga hasil panen saat produksi melimpah sehingga petani tidak mengalami kerugian akibat anjloknya harga.

KDMP juga akan bersinergi dengan Pemerintah Nagari dalam penyaluran berbagai program bantuan dan barang bersubsidi, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), agar distribusinya lebih tepat sasaran dan dapat dikelola melalui unit usaha koperasi. (*)



KOMISI III DPRD Sumbar melakukan kunjungan kerja ke KDMP Nagari Sariak



BERDISKUSI saat kunjungan kerja



KUNJUNGAN kerja yang dilakukan Komisi III

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SABTU, 8 AGUSTUS 2026	2

Generasi Muda Krisis Keteladanan, Muhidi Ajak Perkuat Benteng Keluarga



KETUA DPRD Sumbar Muhidi foto bersama peserta Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan Dini Masyarakat yang diselenggarakan Kesbangpol Sumbar, di Padang.

PADANG, KP — Maraknya kasus korupsi dan tergerusnya moral di ruang publik memicu krisis keteladanan bagi generasi muda. Menanggapi persoalan sosial ini, Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pentingnya memperkuat

peran orang tua dan ketahanan lingkungan keluarga sebagai benteng utama pembentukan karakter anak.

Isu krisis figur teladan ini mengemuka dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan

Dini Masyarakat yang digagas Muhidi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Kamis (6/8).

Soni, seorang Ketua RT di Kota Padang yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan, orang tua saat ini kian kewalahan memberikan nasihat kepada remaja akibat rusaknya citra para figur publik.

"Generasi muda sekarang mengalami krisis kepercayaan terhadap orang yang lebih tua. Banyaknya kasus korupsi dan persoalan lainnya yang menjadi perhatian publik membuat orang tua semakin sulit memberikan nasihat kepada mereka," ujar Soni.

Menanggapi keluhan tersebut, Muhidi meminta para orang tua dan pengurus lingkungan untuk tidak menyerah. Ia menekankan bahwa edukasi serta pembinaan ketahanan sosial harus dilakukan secara berkelanjutan.

"Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar kepercayaan dan nilai-nilai kebersamaan tetap menjaga stabilitas sosial," katanya.

Muhidi mengingatkan, lingkungan sosial yang aman, ramah, dan bebas dari perundungan (bullying) menjadi syarat mutlak melahirkan generasi berkualitas.

Selain itu, kondusivitas wilayah juga menjadi iklim vital untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja di Sumatera Barat. (ak/')

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	JUMAT, 7 AGUSTUS 2026	8

PENGUATAN PAYUNG HUKUM LEMBAGA DAN HUKUM ADAT DPRD Sumbar Kaji Revisi Perda Nagari

PADANG, HALUAN— DPRD Sumatera Barat (Sumbar) saat ini tengah mewacanakan penguatan kelembagaan dan hukum adat melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Nagari sebagai salah satu upaya mencegah perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Ranah Minang. Perda Nagari diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang jelas agar pelaksanaan hukum adat tetap sejalan dengan ketentuan hukum nasional.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria mengatakan, penguatan lembaga adat menjadi salah satu opsi yang tengah dikaji DPRD melalui revisi Perda Nagari maupun penyusunan perda baru. Penguatan peran adat di tingkat nagari diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, termasuk yang berkaitan dengan LGBT.

Ia menjelaskan, hukum adat kini telah memperoleh ruang dalam sistem hukum nasional melalui konsep *living law* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Meski demikian, penerapannya tetap memerlukan aturan turunan agar memiliki mekanisme yang jelas.

"Hukum adat kita sebenarnya sudah bisa terakomodasi melalui *living law* yang diakui dalam KUHP. Namun, mekanismenya harus diperjelas. DPRD merespons berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketentuan umum dan falsafah adat di Sumbar, termasuk masalah LGBT ini. Dalam penanganannya tentu diperlukan aturan daerah yang memiliki dasar hukum yang kuat," ujar Nanda.

Ia menerangkan, Komisi I DPRD Sumbar saat ini tengah mengkaji kemungkinan revisi Perda Nagari yang berlaku atau merevisi regulasi baru. Aturan tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi Kerpada Adat Nagari (KAN) dan unsur adat lainnya dalam upaya pencegahan maupun penyelesaian berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

Nanda menilai Perda Nagari yang berlaku saat ini masih lebih banyak mengacu aspek administratif, sehingga belum memberikan ruang yang memadai bagi penguatan kelembagaan adat.

"Perda Nagari yang ada sejak 2018, kalau tidak salah, substansinya belum

terlalu menyumbat penguatan peran dan fungsi unsur adat. Lebih banyak menjadi payung hukum bagi kabupaten/kota dalam menyusun perda tentang nagari," katanya.

Terkait persoalan LGBT, pengaturannya telah disinggung dalam Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum). Namun, menurutnya, implementasi aturan tersebut belum optimal karena belum didukung regulasi pelaksana.

"Dalam Perda Trantibum Nomor 5 Tahun 2020 sudah ada beberapa poin yang berkaitan dengan LGBT, namun secara detailnya memang belum diatur. Jadi, memang belum terdapat perda yang secara khusus mengatur persoalan LGBT," katanya.

Nanda berharap penguatan regulasi adat dan kelembagaan nagari dapat menjadi salah satu instrumen dalam menjaga tata kehidupan masyarakat Sumbar sesuai nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau.

Meski demikian, Nanda menegaskan pembahasan revisi Perda Nagari tidak semata-mata ditujukan untuk mengatur persoalan LGBT. Regulasi tersebut juga diarahkan untuk

memperkuat penyelesaian berbagai persoalan sosial lainnya, termasuk sengketa tanah adat dan tanah kaum yang selama ini kerap terjadi di tengah masyarakat.

"Perlu dipahami, ini bukan hanya soal LGBT. Masih banyak persoalan lain yang perlu diperkuat melalui kelembagaan adat, termasuk sengketa tanah adat dan tanah kaum yang selama ini sering menjadi persoalan. Dengan penguatan kelembagaan adat, kami berharap penyelesaian yang lebih cepat dan kepentingan anak kemenakan dapat lebih terlindungi," ujarnya.

Sebagai referensi, Nanda menyinggung keberadaan lembaga adat di Bali, seperti Kerta Desa, yang berfungsi sebagai wadah penyelesaian persoalan adat sebelum masuk ke ranah hukum nasional. Menurutnya, konsep serupa dapat dikaji dan disesuaikan dengan karakter masyarakat Minangkabau.

"Kami terinspirasi dengan Bali yang memiliki Kerta Desa sebagai bagian dari peradaban adat. Konsep seperti ini ingin kami kaji, apakah dapat diterapkan dan dioptimalkan sesuai karakter masyarakat adat di nagari-nagari di Sumbar," katanya.

Sekaitan persoalan ini, Nanda menyebut pihaknya juga telah berkomunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang se-Sumbar, untuk memperoleh masukan sekaligus dukungan terhadap rencana penguatan kelembagaan adat tersebut.

Nanda mengatakan, pembahasan revisi regulasi tersebut masih berada pada tahap diskusi di DPRD Sumbar, khususnya antara Komisi I dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Ia berharap proses legislasi dapat berjalan sesuai agenda sehingga penguatan kelembagaan adat dapat segera direalisasikan. "Program ini, *insya Allah* akan kami jalankan pada periode ini. Kami berharap dukungan seluruh pihak agar penguatan kelembagaan adat dapat segera direalisasikan," ujarnya. (h/len)

BREAKING
NEWS



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SABTU, 8 AGUSTUS 2026	2

Jaga Kamtibmas dan Keharmonisan di
Tengah Masyarakat

Ketua DPRD Sumbar Ajak Seluruh Elemen Bangun Budaya Kewaspadaan Dini

PADANG, METRO

Ketua DPRD Sumatra Barat, Muhidi, mengajak seluruh elemen masyarakat membangun budaya kewaspadaan dini sebagai langkah menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan di tengah kehidupan bermasyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan Dini Masyarakat, Jumat (7/8).

Menurut Muhidi, menciptakan lingkungan yang aman bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar dinilai menjadi kunci untuk mencegah berbagai potensi gangguan sosial sejak dini.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengapa kemaksiatan semakin meluas? Karena sering kali orang-orang baik memilih diam dan tidak mengambil peran. Padahal, jika kita berani mengingatkan dengan cara yang baik, Insya Allah akan membawa perubahan," ujar Muhidi.

Ia menegaskan bahwa mengingatkan seseorang melalui pendekatan yang santun dan persuasif tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus investasi bagi masa depan generasi muda.

"Kalau ada anak-anak kita yang mulai melakukan hal-hal yang tidak baik, panggil dan ajak bicara

dengan baik. Tidak perlu dengan kekerasan. Bekerja samalah dalam kebaikan, karena kewaspadaan dini membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat," katanya.

Selain itu, Muhidi mengingatkan masyarakat agar semakin bijak menyikapi deras arus informasi di era digital. Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Kalau ada informasi, jangan langsung dipercaya atau disebarkan. Cek dulu kebenarannya, dari mana sumbernya, apa manfaatnya, baru kemudian ditindaklanjuti. Jangan sampai kita ikut menyebarkan hoaks yang justru merugikan masyarakat," tegasnya.

Menurut Muhidi, ke-

waspadaan dini tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga mencakup bidang sosial, kesehatan, hingga kebencanaan. Dengan mening-

katnya kepedulian masyarakat, berbagai potensi ancaman dapat dideteksi lebih awal sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

"Kewaspadaan dini bukan hanya soal keamanan. Ini juga menyangkut bidang sosial, kesehatan, hingga kebencanaan. Jika masyarakat memiliki kepe-

dulian dan mau bekerja sama, maka potensi gangguan bisa dicegah lebih awal sehingga tercipta rasa aman dan kesejahteraan bersama," pungkasnya. (*)



**BREAKING
NEWS**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

d 7 Agustus 2026

Truntum Hotel Padang

Ketua DPRD



JADI NARSUMBER— Ketua DPRD Sumatra Barat, Muhidi saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan Dini Masyarakat.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Barisan Emak Mencondakan Kehidupan Masyarakat	SABTU, 8 AGUSTUS 2026	9

Ketua DPRD Sumbbar Ajak Masyarakat Bangun Budaya Kewaspadaan Dini

PADANG, HALUAN—Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, mengajak seluruh elemen masyarakat membangun budaya kewaspadaan dini sebagai upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan di lingkungan.

Menurutnya, terciptanya situasi yang aman dan kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kamis (6/8).

Menurut Muhidi, kepedulian terhadap lingkungan sekitar menjadi kunci untuk mencegah berbagai potensi gangguan sosial sejak dini. Masyarakat, katanya, perlu memiliki kebermanian untuk saling mengingatkan

kan dalam kebaikan dengan cara yang santun dan bijaksana.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengapa kemungkaran semakin meluas? Karena sering kali orang-orang baik memilih diam dan tidak mengambil peran. Padahal, jika kita berani mengingatkan dengan cara yang baik, Insya Allah, akan membawa perubahan,” ujarnya.

Ia menegaskan, mengingatkan seseorang melalui pendidikan persuasif bukanlah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya, hal itu merupakan

wujud kepedulian terhadap sesama sekaligus investasi bagi masa depan generasi muda.

“Kalau ada anak-anak kita yang mulai melakukan hal-hal yang tidak baik, panggil dan ajak bicara dengan baik. Tidak perlu dengan kekerasan. Mari bekerja sama dalam kebaikan, karena kewaspadaan dini membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat,” katanya.

Muhidi juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menyikapi derasnya arus informasi di era digital. Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya ataupun menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

“Kalau ada informasi, jangan langsung dipercayai atau disebarkan. Cek dulu kebenarannya, dari mana sumbernya, apa manfaatnya, baru kemudian

ditindaklanjuti. Jangan sampai kita ikut menyebarkan hoaks yang justru merugikan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Muhidi, kewaspadaan dini tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga mencakup persoalan sosial, kesehatan, hingga kebencanaan. Dengan meningkatnya kepedulian masyarakat, berbagai potensi ancaman dapat ditekan lebih awal sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

“Kewaspadaan dini bukan hanya soal keamanan. Ini juga menyangkut bidang sosial, kesehatan, hingga kebencanaan. Jika masyarakat memiliki kepedulian dan mau bekerja sama, maka potensi gangguan bisa dicegah lebih awal sehingga tercipta rasa aman dan kesejahteraan bersama,” pungkasnya. (*)

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan Dini Masyarakat



Ketua DPRD Sumbar, Muhidi



Peserta kegiatan dalam sesi diskusi





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU 8 AGUSTUS 2026	8

Budayakan Kewaspadaan Dini Cegah Gangguan Sosial

Padang, Padek—Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat budaya kewaspadaan dini sebagai upaya mencegah berbagai potensi gangguan sosial sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Ajakan tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kamis (6/8).

Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat keamanan. Peran aktif masyarakat melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitar menjadi faktor penting dalam mendeteksi dan mencegah berbagai persoalan sejak dini.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengapa kemaksiatan semakin meluas? Karena sering kali orang-orang baik memilih diam dan tidak mengambil peran. Padahal, jika



PAPARAN: Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyampaikan materi pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan Dini Masyarakat di Padang, Kamis (6/8).

kita berani mengingatkan dengan cara yang baik, Insya Allah akan membawa perubahan," ujar Muhidi.

Ia menegaskan, mengingatkan seseorang melalui pendekatan yang santun dan persuasif tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap sesama sekaligus investasi bagi masa depan generasi muda.

"Kalau ada anak-anak kita yang mulai melakukan hal-hal yang tidak baik, panggil dan ajak

bicara dengan baik. Tidak perlu dengan kekerasan. Bekerja samalah dalam kebaikan, karena kewaspadaan dini membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat," katanya.

Selain mendorong kepedulian sosial, Muhidi juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menyikapi derasnya arus informasi di era digital. Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai ataupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Kalau ada informasi, jan-

gan langsung dipercaya atau disebar. Cek dulu kebenarannya, dari mana sumbernya, apa manfaatnya, baru kemudian ditindaklanjuti. Jangan sampai kita ikut menyebarkan hoaks yang justru merugikan masyarakat," tegasnya.

Muhidi menambahkan, kewaspadaan dini tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga mencakup persoalan sosial, kesehatan, hingga bencana. Menurutnya, meningkatnya kepedulian masyarakat akan memperkuat kemampuan mendeteksi berbagai potensi ancaman sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

"Kewaspadaan dini bukan hanya soal keamanan. Ini juga menyangkut bidang sosial, kesehatan, hingga bencana. Jika masyarakat memiliki kepedulian dan mau bekerja sama, maka potensi gangguan bisa dicegah lebih awal sehingga tercipta rasa aman dan kesejahteraan bersama," pungkasnya. (wni)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SENIN, 10 AGUSTUS 2026	6

Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Waspada Narkoba Varian Baru

PADANG, METRO

Wakil Ketua DPRD Sumbar, M Iqra Chissa Putra mengingatkan masyarakat, saat ini jenis narkotika banyak variannya. Karena itu, masyarakat khususnya orang tua diminta agar mengawasi aktivitas anak-anaknya, agar jangan sampai terjerumus dalam penggunaan narkoba. Diungkapkannya, perkembangan berbagai varian atau jenis narkoba saat ini, akibat dampak buruk dari kemajuan fase digitalisasi.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang itu menambahkan, perkembangan teknologi berdampak, komunikasi semakin gampang, karena dunia berada dalam genggaman melalui penggunaan gadget. "Penggunaan gadget ada plus minusnya. Plusnya dapat informasi positif, minusnya mudahnya komunikasi dengan orang jauh sehingga dapat membawa pengaruh baik dan buruk. Salah satu pengaruh buruknya komunikasi dengan jaringan narkoba," ungkap Iqra Chissa, saat Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya,

di Kantor DPD Golkar Padang, Minggu (9/8).

Dengan komunikasi digital saat ini, jika dulunya masyarakat mengenal jenis narkoba hanya berupa ganja, ekstasi dan sabu, sekarang justru muncul narkoba varian baru melalui penggunaan vape. "Penggunaan vape banyak digandrungi generasi muda saat ini. Namun, justru sekarang ada vape "getar" baru seperti rokok elektrik. Melalui penggunaan vape, liquid diisi cairan berupa narkoba. Jika vape dihisap, maka penggunaannya langsung fly (terbang) melayang," ungkap Iqra Chissa.

Iqra Chissa kembali mengingatkan masyarakat, narkoba dalam bentuk cairan yang diisi lewat vape ini, maupun narkoba jenis lain, dampaknya sangat berbahaya dan merusak kerja dari saraf otak. "Jika saraf otak rusak, maka anak kemungkinan tidak tahu lagi orang tua mereka. Mereka tidak tahu lagi mana yang benar dan salah dikerjakan," tegasnya.

Melalui sosialisasi perda tentang bahaya narkoba ini Iqra Chissa mengingatkan masyarakat dan orang tua, narkoba sudah



SOSIALISASI
Wakil Ketua DPRD Sumbar, M Iqra Chissa Putra saat Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018, di Kantor DPD Golkar Padang, Minggu (9/8).

pasti akan membawan kejurang kehancuran. "Saya sudah keliling daerah di Indonesia. Belum ada yang sukses karena mengonsumsi narkoba. Yang sukses adalah pengedarannya. Pemakai tidak ada yang sukses. Narkoba merusak. Pengedar hanya menjualkan. Bahkan mereka ada yang konsumsi ada yang tidak. Yang kaya bandarannya," ungkap Iqra Chissa.

Karena itu Iqra Chissa berharap, agar orang tua dapat mengawasi dan mengingatkan anak-anak dan kemenakan di Sumbar untuk menjauhi narkoba. Agar Sumbar melahirkan pemimpin yang hebat di masa depan. "Kita ingin anak-anak dan kemenakan

kita sekarang ini dapat menjadi Pimpinan DPRD, CEO Perusahaan dan pemimpin lainnya di masa depan. Mulailah hari ini selamatkan masa depan anak kemenakan kita," ajaknya.

Tidak hanya bahaya narkoba, Iqra Chissa juga mengingatkan bahaya lain dari perkembangan teknologi komunikasi, yakni judi online. "Sama kayak narkoba bahayanya, judi online itu, yang kaya bandarannya. Judi online tidak bisa membuat kita berpikir jernih. Rasa-rasa mau menang saja. Ujung-ujungnya zonk, uang habis terkuras. Yang membuat terkuras justru kemudahan akses mengambil dan transfer uang menggunakan

swal arfanpoemetro
kan mobile banking," ungkapnya.

Jadi Iqra Chissa kembali mengingatkan, ancaman yang berbahaya saat ini ada dua, yakni narkotika dan judi online. "Ada teman saya, gara-gara judi online habis harta benda dan harta orang tuanya. Tidak ada toleransi bagi anak kemenakan kita, jika ada di hapenya aplikasi judi online," tegasnya.

"Termasuk juga jika ada di perusahaan, karyawan ada aplikasi judi online, pecat saja. Karena mengganggu kerja, dan membawa pengaruh buruk. Masa depan negeri kita Sumbar ini, ada di tangan generasi muda," jelasnya. (fan)

BREAKING
NEWS!



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 10 AGUSTUS 2026	6

Ketua DPRD Sumbar: Stabilitas Sosial Perkuat Iklim Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

KETUA DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi menilai stabilitas sosial merupakan salah satu modal penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Karena itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kepedulian sosial di lingkungan masing-masing.

Hal itu disampaikan Muhidi dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan Dini Masyarakat yang digagasnya dan diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Kamis (6/8).

Menurut Muhidi, daerah yang aman dan kondusif akan memberikan rasa nyaman bagi investor. Investasi yang masuk selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

"Kalau kondisi daerah aman dan masyarakatnya bisa menjaga stabilitas, tentu akan memberikan rasa nyaman bagi orang yang ingin berinvestasi. Investasi yang masuk akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat," ujar Muhidi.

Ia mengatakan keputusan investor menanamkan modal tidak hanya dipengaruhi potensi ekonomi, tetapi juga tingkat keamanan, kenyamanan, dan kondisi sosial masyarakat.

Karena itu, menjaga stabilitas daerah tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan aparat keamanan.

Muhidi mendorong masyarakat terus memperkuat edukasi dan kepedulian sosial, mulai dari lingkungan keluarga hingga tempat tinggal. Menurutnya, berbagai persoalan sosial tidak boleh dihadapi dengan sikap menyerah.

"Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar kepercayaan dan nilai-nilai kebersamaan tetap terjaga," katanya.

Perhatian tersebut juga diarahkan pada perlindungan generasi muda. Muhidi menilai lingkungan yang aman dan ramah sangat menentukan pembentukan karakter anak serta kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.

Ia mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak di lingkungan masing-masing, termasuk mencegah terjadinya perundungan.

"Kita harus menjaga keramahan terhadap sesama, terutama terhadap anak-anak. Jangan sampai ada lagi kasus perundungan. Lingkungan yang aman dan peduli adalah modal penting untuk melahirkan generasi yang berkualitas," tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, salah seorang peserta, Soni, yang merupakan Ketua RT di Kota Padang, turut menyampaikan persoalan yang dihadapi orang tua dalam memberikan arahan kepada generasi muda.

Menurut Soni, berbagai kasus korupsi dan persoalan moral yang menjadi konsumsi publik turut memengaruhi kepercayaan anak muda terhadap generasi yang lebih tua.

"Generasi muda sekarang mengalami krisis kepercayaan terhadap orang yang lebih tua. Banyaknya kasus korupsi dan persoalan lainnya yang menjadi perhatian publik membuat orang tua semakin sulit memberikan nasihat kepada mereka," ujarnya.

Muhidi menilai kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dijawab melalui edukasi dan keteladanan. Kepercayaan generasi muda, katanya, perlu dibangun melalui perilaku nyata seluruh elemen masyarakat.

Ia berharap penguatan kepedulian masyarakat, keamanan lingkungan, dan stabilitas sosial dapat menciptakan suasana yang semakin kondusif bagi dunia usaha dan investasi di Kota Padang maupun Sumatera Barat.

Dengan masuknya investasi, Muhidi berharap terbuka lebih banyak lapangan kerja, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, dan kesejahteraan dapat tumbuh secara lebih luas. (*)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar Muhidi memberikan arahan pada acara Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan Dini Masyarakat yang diselenggarakan Badan Kesbangpol Sumbar. Dalam kesempatan tersebut, Muhidi menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan keamanan lingkungan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 10 AGUSTUS 2026	3

Ketua DPRD Sumbar Dorong Padang Jadi Penggerak Ekonomi Sumbar

PADANG, KP - Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mendorong momentum Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 menjadi pijakan untuk memperkuat kolaborasi dan daya saing kota. Pembangunan, menurutnya, harus semakin diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Muhidi usai menghadiri Sidang Paripurna Istimewa HJK Padang ke-357 di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (7/8).

Menurut Muhidi, usia 357 tahun bukan sekadar catatan sejarah, tetapi momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat langkah menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Ia menilai, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Padang memiliki posisi strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pembangunan kota perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan pendidikan, ekonomi, pariwisata, pelayanan publik, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Menurutnya, potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila pemerintah dan masyarakat mampu menjaga stabilitas sosial serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi aktivitas ekonomi.

"Dengan semangat kebersamaan, saya yakin

Kota Padang akan terus tumbuh menjadi kota yang maju dan berdaya saing. Pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi dan masyarakat harus bergerak bersama," katanya.

Muhidi juga mengingatkan pentingnya menjaga karakter dan identitas budaya Minangkabau di tengah perkembangan Kota Padang sebagai kota modern. Menurutnya, kemajuan ekonomi dan pembangunan harus berjalan seiring dengan penguatan nilai sosial dan budaya masyarakat.

Ia berharap peringatan HJK ke-357 dapat menjadi energi baru bagi seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap Kota Padang. (fai)



MUHIDI





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SENIN, 10 AGUSTUS 2026	2

Fraksi PDI Perjuangan dan PKB Soroti BUMD Sumbar yang Terus Merugi

PADANG, HALUAN- Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Sumbar meminta Pemerintah Provinsi Sumbar terus meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman mengatakan, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengembangan sektor pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, serta pengembangan potensi kelautan dan perikanan.

Hal itu disampaikan Albert dalam rapat kerja yang digelar DPRD Sumbar baru-baru ini. Ia menilai sejumlah sektor potensial masih belum mem-

berikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan pendapatan daerah.

"Fraksi kami berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depannya terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah," ujar Albert.

Menurutnya, sektor pariwisata yang memiliki potensi besar di Sumbar masih berjalan relatif lamban. Begitu pula sektor ekonomi kreatif yang dinilai belum mendapatkan ruang pemasaran secara op-

timal.

Di sisi lain, Albert memberikan perhatian khusus terhadap kinerja BUMD yang mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumbar. Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar, dari target dividen BUMD sebesar Rp139,68 miliar, realisasinya hanya Rp126,84 miliar.

Ironisnya, kontribusi tersebut hanya berasal dari dua BUMD, yakni PT Bank Nagari sebesar Rp122,19 miliar dan PT Jamkrida sebesar Rp4,65 miliar.

Sementara itu, sejumlah BUMD dan perseroan terbatas lainnya yang menerima penyertaan modal dari Pemprov Sumbar belum memberikan dividen karena mengalami kerugian. Di antaranya PT Grafika, PT Balairung Jaya Sumbar, PT Askrida, PT Sijunjung Sumbar Energi, dan PT

Pembangunan Sumbar.

Kondisi tersebut, kata Albert, harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Sebab, penyertaan modal daerah pada hakikatnya merupakan investasi yang bersumber dari uang rakyat sehingga harus memberikan manfaat yang jelas bagi daerah.

"Kalau tidak dapat memberikan keuntungan, tidak memberikan dividen, bahkan terus mengalami kerugian, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang saham harus mengambil langkah yang lebih tegas. Apakah perusahaan tersebut masih layak dipertahankan?" tegasnya.

Albert menambahkan, persoalan kinerja BUMD tersebut bukan kali pertama disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB. Menurutnya, evaluasi terhadap perusahaan daerah yang belum memberikan kontribusi optimal telah berulang

kali disuarakan dalam setiap pembahasan mengenai BUMD.

Karena itu, fraksi ini mendorong Pemprov Sumbar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD, terutama perusahaan yang telah menerima penyertaan modal tetapi belum mampu mem-

berikan keuntungan bagi daerah.

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah penyertaan modal yang berasal dari APBD benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Sumbar. (h/len)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SENIN 10 AGUSTUS 2026	5

Muhidi: Diam Bisa Memperluas Kemaksiatan

KEAMANAN lingkungan tidak akan lahir jika masyarakat memilih diam. Ketua DPRD Sumbar Muhidi justru mendorong warga berani mengambil peran ketika melihat gejala persoalan sosial, perilaku negatif, hingga potensi gangguan keamanan di sekitarnya.

Menurut Muhidi, membiarkan masalah kecil tanpa kepedulian hanya membuka ruang bagi persoalan yang lebih besar. Karena itu, budaya kewaspadaan dini harus menjadi kebiasaan bersama, bukan sekadar tugas pemerintah dan aparat keamanan.

"Mengapa kemaksiatan semakin meluas? Karena sering kali orang-orang baik memilih diam dan tidak mengambil peran. Padahal, jika kita berani mengingatkan dengan cara yang baik, insyaallah akan membawa perubahan," ujar Muhidi saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kamis (6/8).

Muhidi menekankan, kepedulian terhadap lingkungan tidak identik dengan tindakan represif. Ketika menemukan anak-anak atau generasi muda mulai menun-

ruh masyarakat," katanya.

Ia juga menepis anggapan bahwa upaya saling mengingatkan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Selama dilakukan secara santun dan tidak menggunakan kekerasan, menurut Muhidi, tindakan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial untuk mencegah persoalan berkembang.

Tantangan kewaspadaan masyarakat, kata dia, kini tidak hanya berada di lingkungan fisik. Ruang digital juga menjadi medan yang rawan memunculkan persoalan baru, terutama ketika informasi palsu beredar tanpa verifikasi.

Muhidi meminta masyarakat tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran hoaks. Setiap informasi yang diterima perlu diperiksa sumber, kebenaran, dan manfaatnya sebelum diteruskan.

"Jika menerima informasi, jangan langsung dipercaya atau disebarkan. Saring sebelum sharing. Cek dulu kebenarannya, sumbernya dari mana, dan apa manfaatnya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan hoaks yang merugikan masyarakat," tegasnya.

Bagi Muhidi, kewaspadaan dini juga tidak boleh dipersempit menjadi urusan kamtibmas. Persoalan sosial, kesehatan, hingga kebencanaan sama-sama membutuhkan kepekaan masyarakat.

Ia menilai masyarakat yang aktif mengenali tanda-tanda per-

soalan sejak awal memiliki posisi penting dalam mencegah ancaman sebelum membesar. Sebab, ketika kepedulian tumbuh dan komunikasi antarwarga berjalan, potensi gangguan bisa ditangani lebih cepat.

"Kewaspadaan dini bukan

hanya soal keamanan, tapi juga menyangkut bidang sosial, kesehatan, hingga kebencanaan. Jika masyarakat peduli dan mau bekerja sama, potensi gangguan bisa dicegah lebih awal demi terciptanya rasa aman dan kesejahteraan bersama," pungkasnya. (*)



KETUA DPRD Sumbar Muhidi.

BREAKING
NEWS!

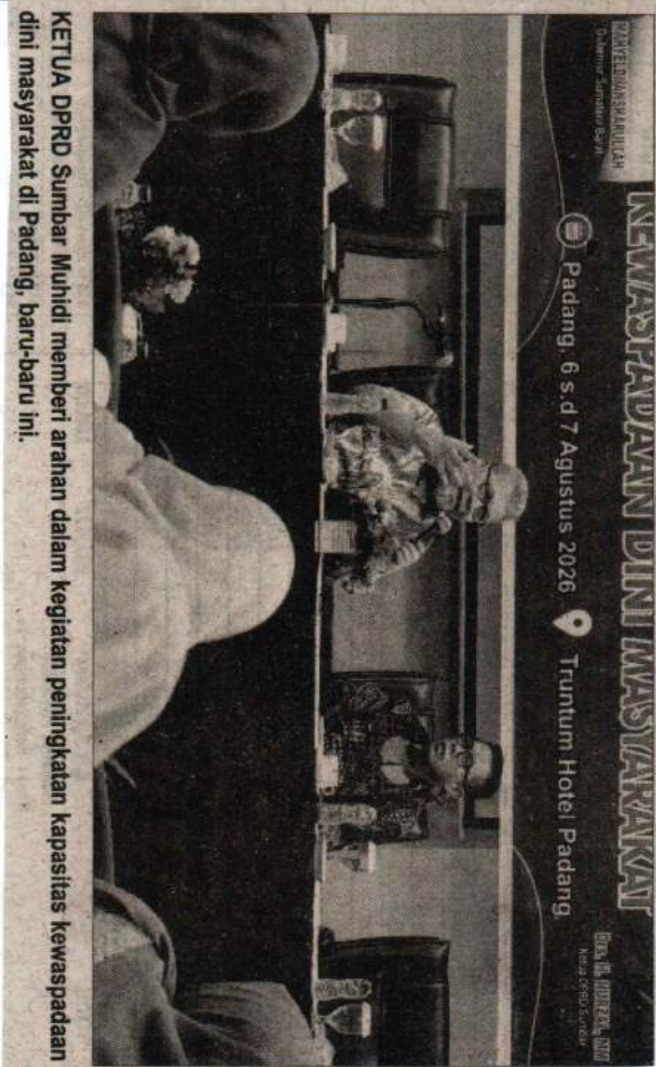


SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar Muhidi bersama peserta dan panitia kegiatan peningkatan kapasitas kewaspadaan dini masyarakat di Padang, baru-baru ini.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Sabtu, 8 Agustus 2026 (24 Syafar 1448 H)	4

Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Bangun Budaya Waspada Kamtibmas

PADANG - SINGGALANG

Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mengajak seluruh elemen masyarakat membangun budaya kewaspadaan dini. Langkah ini penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan di tengah kehidupan bermasyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kamis (6/8).

Menurut Muhidi, menciptakan lingkungan yang aman bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan, melainkan butuh keterlibatan aktif semua lapisan masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar menjadi kunci utama mencegah potensi gangguan sosial sejak dini.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk saling me-

ngajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengapa kemaksiatan semakin meluas? Karena sering kali orang-orang baik memilih diam dan tidak mengambil peran. Padahal, jika kita berani mengingatkan dengan cara yang baik,

insyaallah akan membawa perubahan," ujar Muhidi.

Ia menegaskan, mengingatkan seseorang melalui pendekatan santun dan persuasif tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Sebaliknya, langkah tersebut merupakan

bentuk kepedulian sesama sekaligus investasi masa depan bagi generasi muda.

"Kalau ada anak-anak kita yang mulai melakukan hal negatif, panggil dan ajak bicara baik-baik. Tidak perlu kekerasan. Bekerja samalah, karena kewas-

padaan dini membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat," katanya.

Selain itu, Muhidi mengingatkan masyarakat agar bijak menyikapi deras arus informasi di era digital. Ia meminta publik tidak mudah terpedaya maupun

menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Jika menerima informasi, jangan langsung dipercaya atau disebarkan. Saring sebelum sharing. Cek dulu kebenarannya, sumbernya dari mana, dan apa manfaatnya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan hoaks yang merugikan masyarakat," tegasnya.

Menurutnya, kewaspadaan dini tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga mencakup bidang sosial, kesehatan, hingga kebencanaan. Dengan meningkatnya kepedulian warga, berbagai potensi ancaman dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah besar.

"Kewaspadaan dini bukan hanya soal keamanan, tapi juga menyangkut bidang sosial, kesehatan, hingga kebencanaan. Jika masyarakat peduli dan mau bekerja sama, potensi gangguan bisa dicegah lebih awal demi terciptanya rasa aman dan kesejahteraan bersama," pungkasnya. (**)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Senin, 10 Agustus 2026 (25 Syafar 1448 H)	8

Muhidi: Ketertiban Umum Butuh Kolaborasi, Bukan Sekadar Sanksi

PADANG - SINGGALANG

Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi menegaskan, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif bukan hanya tanggung jawab satu pihak.

Pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat hingga warga memiliki andil yang sama besar dalam menjaga ketenteraman publik.

Pesan kolaborasi tersebut menjadi benang merah dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Sumbang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang digelar di Kota Padang, Sabtu (8/8).

Menurut Muhidi, kehadiran Perda tersebut tidak dirancang semata-mata untuk membatasi ruang gerak atau menjatuhkan sanksi.

Aturan ini justru menjadi kompas bersama agar dinamika sosial berjalan selaras dengan pemenuhan hak-hak setiap warga negara.

"Kita tidak bisa membangun ketertiban jika hanya bertumpu pada pemerintah atau aparat. Sistem ini baru akan kokoh ketika masyarakat merasa memiliki dan ikut menjaga lingkungannya sendiri," ujar Muhidi.

Ia menambahkan, pergeseran pola hidup di era modern membuat regulasi menjadi semakin krusial. Kendati demikian, efektivitas sebuah aturan sangat bergantung pada jalinan komunikasi dan kesadaran kolektif di lapangan.



SOSPER - Ketua DPRD Sumbar, Muhidi dan peserta Sosper Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang digelar di Kota Padang, Sabtu (8/8). (lst)

Perda Nomor 5 Tahun 2020 sendiri mengkoordinasikan berbagai sektor krusial, mulai dari tata tertib jalan, pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau (RTH), ketertiban sosial, hingga regulasi perizinan.

Dari seluruh aspek tersebut, Muhidi menyoroti sektor sosial yang memerlukan perhatian ekstra karena sifatnya yang sangat dinamis.

Merespons tantangan tersebut, politisi ini mendorong pendekatan preventif (pencegahan) ketimbang penindakan hukum (represif).

Ia meyakini, potensi konflik sosial jauh lebih efektif diredam sejak dini melalui dialog yang persuasif. "Konsepnya harus preventif. Jika muncul riak di tengah warga, mari bicarakan dengan kepala dingin, jangan mengedepankan emosi. Bangun budaya saling mengingatkan dengan cara yang santun," lanjutnya.

Lebih lanjut Muhidi memaparkan efek domino dari lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, khususnya bagi Ibukota Provinsi, Kota Padang.

Keamanan dan kenyamanan wilayah merupakan modal sosial yang setara nilainya dengan pembangunan infrastruktur fisik.

"Ketika Sumbar dan Padang aman, magnet pariwisata akan menguat. Investor berdatangan, sektor pendidikan semakin dipercaya, okupansi hotel meningkat, dan UMKM pasti bergeliat. Ujungnya, kesejahteraan masyarakat ikut naik," urai Muhidi.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyoroti pentingnya peran tokoh masyarakat sebagai jembatan komunikasi yang tak tergantikan bagi warga akar rumput, sekaligus agen penyelesaian masalah (problem solver) yang efektif.

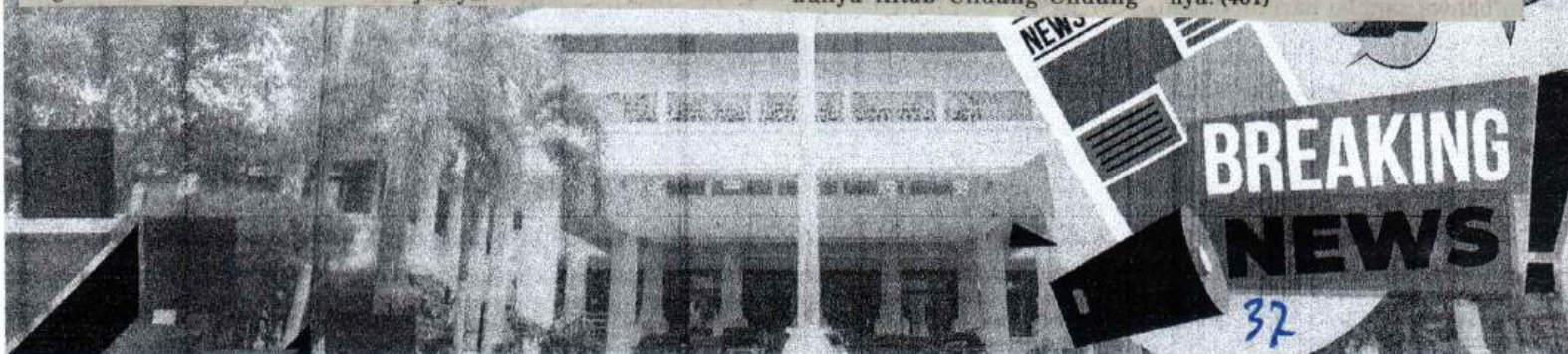
Selain itu, menyikapi berlakunya Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru, Muhidi menyatakan DPRD Sumbar berkomitmen untuk segera melakukan harmonisasi hukum.

Penyesuaian regulasi daerah, terutama yang memuat klausul sanksi pidana dan denda, mendesak dilakukan agar tidak memicu tumpang tindih aturan di lapangan.

Menutup pemaparannya, Muhidi mengingatkan bahwa ikhtiar menjaga ketertiban umum adalah investasi jangka panjang untuk generasi masa depan. Lingkungan sosial yang sehat akan menjadi laboratorium pembentukan karakter anak-anak yang baik.

"Melalui sosialisasi ini, kami ingin membentuk masyarakat yang patuh hukum karena kesadaran, bukan karena ketakutan. Pemerintah, aparat, dan masyarakat harus bergerak dalam satu harmoni kolaborasi," pungkasnya. (401)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Senin, 10 Agustus 2026 (25 Syafar 1448 H)	8

MENUJU KOTA GLOBAL

Ketua DPRD Sumbar Ajak Perkuat Kolaborasi



PADANG - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-357 Kota Padang di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (7/8).

Momentum hari jadi ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi Ibu Kota Provinsi Sumbar tersebut untuk bertransformasi menjadi kota yang lebih maju dan berdaya saing global.

Muhidi menegaskan bahwa usia 357 tahun merupakan refleksi dari perjalanan sejarah yang panjang. Menurutnya, perayaan ini tidak boleh sekadar menjadi seremonial tahunan, melainkan harus menjadi bahan bakar untuk memperkuat sinergi antar-lini.

"HUT Kota Padang harus menjadi pemantik semangat bagi seluruh warga. Kita perlu menjaga persatuan, memperkokoh gotong royong, dan bersama-sama membawa kota ini agar semakin nyaman dihuni serta mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional," ujar Muhidi.

Ia menambahkan, capaian pembangunan yang telah diraih Kota Padang selama ini patut diapresiasi. Namun, tantangan ke depan menuntut adanya inovasi berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pada sektor fundamental seperti pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan infrastruktur.

Untuk mencapai target tersebut, politisi ini mengajak seluruh elemen—mulai dari pemerintah, DPRD, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat luas—untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap daerah.

"Dengan spirit kebersamaan, saya optimistis Kota Padang akan terus tumbuh menjadi pusat pertumbuhan yang inklusif dan menyejahterakan warga. Mari jadikan momentum ke-357 ini sebagai pijakan awal menuju masa depan Padang yang lebih gemilang," tuturnya.

Menutup penyampaiannya, Muhidi mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Padang. Ia berharap kota berjuluk Kota Tercinta ini tetap konsisten merawat nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah perannya yang semakin strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pariwisata di gerbang barat Indonesia.

"Selamat Hari Jadi ke-357 Kota Padang. Teruslah maju dan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatra Barat," pungkasnya. (401)

**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 11 AGUSTUS 2026	4

Sitti Izzati Aziz Sosialisasikan Perda Penanggulan Bencana di Ketaping

PADANGPARIAMAN, HALUAN

—Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat, Sitti Izzati Aziz, menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Su-

matera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana kepada masyarakat Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Pa-

dang Pariaman, Minggu (9/8).

Kegiatan yang berlangsung di Pondok Lesehan Eby "Piak Nona", Jalan Akses Bandara Padang Pariaman, itu dihadiri masyarakat Nagari Ketaping. Turut hadir Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, serta perwakilan BPBD Sumatera Barat, Analis Kebencanaan Ahli Muda, Acil Erbara.

Dalam kesempatan itu, Sitti Izzati Aziz menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Menurutnya, Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko

dan dampak bencana.

"Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Karena itu, pemahaman mengenai aturan dan langkah-langkah menghadapi bencana perlu terus ditingkatkan," ujar Sitti.

Ia menjelaskan, Perda Nomor 4 Tahun 2023 menjadi salah satu landasan bagi pemerintah daerah bersama masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Sitti juga mengajak masyarakat Ketaping mengenali potensi bencana di lingkungan masing-masing serta memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah

bencana terjadi.

"Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat memiliki kesiapsiagaan. Dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa meminimalkan risiko dan menyelamatkan lebih banyak jiwa ketika bencana terjadi," katanya.

Sementara itu, Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Sumatera Barat, Acil Erbara, memberikan pemahaman terkait kebencanaan serta pentingnya membangun kesiapsiagaan hingga tingkat nagari.

Menurut Acil, masyarakat merupakan garda terdepan dalam menghadapi bencana karena berada langsung di wilayah yang berpotensi terdampak. Untuk itu, peningkatan kapasitas masyarakat perlu menjadi perhatian bersama.

Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPBD, pemerintah nagari, dan masyarakat dalam membangun budaya sadar bencana.

Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana dapat memberikan pengetahuan praktis kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Nagari Ketaping dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Dengan sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami regulasi penanggulangan bencana, tetapi juga mampu mengambil langkah cepat dan tepat ketika menghadapi situasi darurat. (h/len)

NEWS

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN

AMAN



ANGGOTA Komisi IV DPRD Sumbar, Sitti Izzati Aziz, menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, Minggu (9/8). IST





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	SELASA, 11 AGUSTUS 2026	2

Wakil Ketua DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda Antinarko- koba di Dapil

PADANG, HALUAN— Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman, mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ia juga meminta masyarakat mengubah pandangan terhadap pecandu narkoba yang selama ini cenderung dianggap sebagai sampah masyarakat.

Hal itu disampaikan Evi Yandri saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Gedung Rohanna Kudus, Kompleks GOR Agus Salim, Padang, Minggu (9/8) sore.

Menurut Evi, pengguna atau pecandu narkoba pada dasarnya merupakan korban yang masih memiliki kesempatan untuk pulih melalui proses rehabilitasi. Karena itu, masyarakat harus memberikan dukungan agar mereka mendapatkan penanganan yang tepat.

"Mereka bisa direhabilitasi dan sembuh. Kecuali jika mereka ikut mengedarkan narkoba, itu urusan berbeda dan harus ditindak secara hukum," ujar Evi.

Ia mengatakan, upaya rehabilitasi merupakan bagian penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dengan membantu pengguna menjalani rehabilitasi, masyarakat turut memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba.

"Mereka harus dirangkul, diajak rehabilitasi, dan disembuhkan. Daripada mereka terciduk aparat hukum, sebaiknya lebih dulu dibawa untuk rehabilitasi," katanya.

Evi menilai, ancaman narkoba di Sumbar semakin serius. Daerah ini, menurutnya, tidak lagi hanya menjadi wilayah perlintasan, tetapi telah menjadi salah satu lokasi peredaran narkoba.

Karena itu, ia menilai implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Upaya pemerintah dan aparat penegak hukum tidak akan optimal tanpa dukungan keluarga dan lingkungan sekitar.

"Sumbar bukan lagi sekadar daerah perlintasan, melainkan sudah menjadi tempat peredaran. Karena itu, saya konsisten menyosialisasikan perda antinarkoba ini karena ancamannya sudah sangat masif," tegasnya.

rehabilitasi pasien penyalahgunaan
Justice yang menggratiskan biaya
"Ada program restorative
layanan rehabilitasi secara gratis.
gunaan narkoba mendapatkan
memungkinkan pasien penyalah-
program restorative Justice yang
na biaya rehabilitasi karena tersedi-
rakat tidak perlu khawatir mengge-
Fradiila mengatakan, masya-
RS Jiwa Prof. HB. Saanin.
dia di RSUP Dr. M. Djamil dan
Buaya. Layanan serupa juga terse-
Kilangan, dan Puskesmas Lubuk
buk Begalung, Puskesmas Lubuk
kesmas Andalas, Puskesmas Lu-
nan rehabilitasi tersedia di Pus-
Khusus di Kota Padang, laya-
penyalahgunaan narkoba.
mendapatkan layanan rehabilitasi
dimanfaatkan masyarakat untuk
fasilitas kesehatan yang dapat
Fradiila, menjelaskan sejumlah
wakil Dinas Kesehatan Sumbar,
Dalam kegiatan tersebut, per-

narkoba. Jadi, jangan ragu untuk mengusahakan kesembuhan mereka," ujarnya.

Sementara itu, upaya rehabilitasi juga didukung Yayasan Pelita Jiwa Insani (YPJI) yang didirikan Evi Yandri sejak 2014. Kepala YPJI, Syafrizal, mengatakan banyak mantan pasien rehabilitasi yang kini telah kembali menjalani kehidupan normal dan berhasil di tengah masyarakat.

Ia menyebutkan, sejumlah mantan pasien YPJI bahkan berhasil menjadi anggota TNI Angkatan Darat, bekerja di PT KAI, hingga menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Ada pasien kami yang sudah sembuh kini lulus menjadi anggota TNI Angkatan Darat, bekerja di PT KAI, hingga menjadi PNS. Ini bukti nyata bahwa mereka bisa pulih dan berprestasi," katanya.

Dalam sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 tersebut, YPJI juga menghadirkan empat pasien rehabilitasi untuk berbagi pengalaman kepada peserta mengenai proses pemulihan dari penyalahgunaan narkoba. (h/len)

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



SOSIALISASI PERDA— Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kota Padang. IST





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Selasa, 11 Agustus 2026 (26 Syafar 1448 H)	8

SOSIALISASI PERDA NO.8/2021 DI PASBAR

Masyarakat Didorong Berperan Aktif dalam Pembangunan Nagari

PASBAR - Masyarakat Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) kini didorong untuk lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam mengawal pembangunan desa.

Hal ini menyusul disosialisasikannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.

Sosialisasi regulasi tersebut dilaksanakan Anggota DPRD Sumbar, Ali Muda di Gedung Pertemuan Kuamang Alai Ujung Gading, Minggu (9/8).

Melalui aturan ini, masyarakat diharapkan tidak lagi menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam pembangunan di wilayahnya.

Ali Muda menegaskan, suksesnya pemberdayaan di tingkat akar rumput sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga, bukan hanya tugas pemerintah semata.

"Melalui sosialisasi ini, kami ingin masyarakat mengetahui dan memahami hak, peran, serta tanggung jawabnya dalam pembangunan nagari," ujarnya.

Ia juga mengatakan lemerintahan nagari di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dituntut untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara transparan dan sesuai koridor hukum.

Sebagai lini terdepan pelayanan publik, institusi nagari memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan.

Ali Muda mengingatkan agar aparat nagari, khususnya di Kuamang Alai, memahami regulasi ini agar tata kelola pemerintahan desa berjalan optimal.

"Kami mendorong pemerintahan nagari agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Senada dengan itu, Kabid KMA Dinas PMD Provinsi Sumbar, Pratama Winia Nazwir yang hadir dalam forum tersebut, juga menekankan pentingnya ruang dialog antara pemerintah nagari dan daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan birokrasi di tingkat bawah. (401)



SOSIALISASI - Anggota DPRD Sumbar Ali Muda, saat memberikan pemaparan dan sejumlah narasumber saat sosialisasi Perda di Kuamang Alai, Kecamatan Lembah Melintang, Pasaman Barat, Minggu (9/8). (Ist)



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Selasa, 11 Agustus 2026 (26 Syafar 1448 H)	2

WAKIL KETUA DPRD SUMBAR, EVI YANDRI

Para Pecandu Narkoba Bukan Sampah Masyarakat

PADANG-SINGGALANG

Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman, menegaskan bahwa masyarakat perlu mengubah pola pikir negatif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Menurutnya, para pecandu bukanlah sampah masyarakat, melainkan korban yang bisa sembuh, kembali berkontribusi, bahkan berprestasi.

"Mereka bisa direhabilitasi dan sembuh. Kecuali jika mereka ikut mengedarkan narkoba, itu urusan berbeda dan harus ditindak secara hukum," ujar Evi Yandri saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Gedung Rohanna Kudus, Kompleks GOR Agus Salim, Padang, Minggu sore (9/8).

Evi menekankan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba adalah korban. Oleh karena itu, di kalangan penggiat anti-



SOSIALISASI - Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman saat menyosialisasikan Perda pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Minggu (9/10) di Gedung Rohanna Kudus, Padang. (Ist)

narkoba, mereka lebih tepat disebut sebagai pasien.

"Mereka harus dirangkul, diajak rehabilitasi, dan disembuhkan. Daripada mereka terciduk aparat hukum, sebaiknya lebih dulu dibawa untuk rehabilitasi," paparnya.

Ia menambahkan, rehabilitasi merupakan bagian krusial dari upaya pencegahan. Dengan menyembuhkan para pengguna, masyarakat secara tidak langsung ikut menghambat perluasan peredaran narkoba.

Evi menyadari, berbagai

upaya pemerintah dan aparat penegak hukum di Sumbar selama ini belum memberikan hasil signifikan tanpa peran aktif masyarakat.

"Sumbar bukan lagi sekadar daerah perlintasan, melainkan sudah menjadi tempat peredaran. Karena itu, saya konsisten menyosialisasikan perda antinarkoba ini karena ancamannya sudah sangat masif," tegasnya.

Dalam sosialisasi tersebut, perwakilan Dinas Kesehatan Sumbar, Fradila, turut memaparkan fasilitas medis yang

tersedia. Untuk Kota Padang, masyarakat dapat mengakses layanan rehabilitasi di Puskesmas Andalas, Puskesmas Lubuk Begalung, Puskesmas Lubuk Kilangan, dan Puskesmas Lubuk Buaya.

Selain itu, layanan juga tersedia di RSUP Dr. M. Djamil dan RS Jiwa Prof. HB. Saanin. "Ada program restorative justice yang menggratiskan biaya rehabilitasi pasien penyalahgunaan narkoba. Jadi, jangan ragu untuk mengusahakan kesembuhan mereka," kata Fradila.

Upaya pemulihan ini juga didukung oleh Yayasan Pelita Jiwa Insani (YPJI) yang didirikan oleh Evi Yandri sejak tahun 2014. Kepala YPJI, Syafrizal, mengungkapkan bahwa banyak mantan pasiennya yang kini sukses di masyarakat setelah dinyatakan sembuh.

"Ada pasien kami yang sudah sembuh kini lulus menjadi anggota TNI Angkatan Darat, bekerja di PT KAI, hingga menjadi PNS. Ini bukti nyata bahwa mereka bisa pulih dan berprestasi," ungkap Syafrizal, yang dalam acara tersebut juga menghadirkan empat pasien rehabilitasi untuk berbagi pengalaman sebagai pembe lajaran bagi peserta. (401)

NEWS

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang SELASA, 11 AGUSTUS 2026		9

Tekan Kasus Narkoba di Sumbang

Padang, Rakyat Sumbang — Wakil Ketua DPRD Sumbang Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan para pecandu bukan sampah masyarakat, melainkan korban yang bisa sembuh, kembali berkontribusi, bahkan berprestasi.

"Kecuali jika mereka ikut menegedarkan narkoba, itu urusan berbeda dan harus ditindak secara hukum," ujar Evi Yandri, saat sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Gedung Rohanna Kudus, Padang, Minggu (9/8).

Ia melanjutkan, masyarakat perlu mengubah pola pikir negatif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, karena pelaku penyalahgunaan narkoba adalah korban.

"Oleh karena itu, di kalangan penggiat antinarkoba, mereka lebih tepat disebut sebagai pasien. Mereka harus dirangkul, diajak rehabilitasi, dan disembuhkan. Dari pada mereka terduduk aparat hukum, sebaiknya lebih dulu dibawa



WAKIL Ketua DPRD Provinsi Sumbang Evi Yandri, saat sosialisasi Perda Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Gedung Rohanna Kudus, Padang, Minggu (9/8).

untuk rehabilitasi," sebutnya.

Ia menambahkan, rehabilitasi merupakan bagian krusial dari upaya pencegahan. Dengan menyembuhkan para pengguna, masyarakat secara tidak langsung ikut menghambat perluasan peredaran narkoba.

Evi menyadari, berbagai upaya pemerintah dan aparat penegak hukum di Sumbang selama ini belum memberikan hasil signifikan

tanpa peran aktif masyarakat.

"Sumbang bukan lagi sekadar daerah pertintasan, melainkan sudah menjadi tempat peredaran. Karena itu, saya konsisten menyosialisasikan perda antinarkoba ini karena ancamannya sudah sangat masif," tuturnya.

Sementara itu, Perwakilan Dinas Kesehatan Sumbang Fradila, turut memaparkan fasilitas medis yang tersedia. Untuk Kota Padang,

masyarakat dapat mengakses layanan rehabilitasi di Puskesmas Andalas, Puskesmas Lubuk Begalung, Puskesmas Lubuk Kilangan, dan Puskesmas Lubuk Buaya. Selain itu, layanan juga tersedia di RSUP Dr. M. Djamil dan RS Jiwa Prof. HB. Saanin.

"Ada program restorative justice yang menggratiskan biaya rehabilitasi pasien penyalahgunaan narkoba. Jadi, jangan ragu untuk mengusahakan kesembuhan mereka," ulas Fradila.

Upaya pemulihan ini juga didukung oleh Yayasan Pelita Jiwa Insani (YPII) yang didirikan oleh Evi Yandri sejak tahun 2014. Kepala YPII, Syafitral mengatakan banyak mantan pasiennya yang kini sukses di masyarakat setelah dinyatakan sembuh.

"Ada pasien kami yang sudah sembuh kini lulus menjadi anggota TNI Angkatan Darat, bekerja di PT KAL, hingga menjadi PNS. Ini bukti nyata bahwa mereka bisa pulih dan berprestasi," pungkias Syafitral. (byr/rel)

BREAKING NEWS



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar	SELASA, 11 AGUSTUS 2026	9



FOTO : JON KENEDI

ANGGOTA Komisi III DPRD Sumbar Rony Mulyadi Dt. Bungsu saat menggelar Sosialisasi Perda Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil di Restoran Pondok Indah Raya, Kelurahan Silaing Bawah, Padangpanjang, Sabtu (8/8).

Rony Mulyadi Dorong Penguatan Koperasi dan UMKM

Padangpanjang, Rakyat Sumbar — Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rony Mulyadi Dt. Bungsu mendorong penguatan lembaga koperasi dan regulasi yang mengatur pemberdayaan dan perlindungan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan, dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil di Restoran Pondok Indah Raya, Kelurahan Silaing Bawah, Padangpanjang, Sabtu (8/8).

Kegiatan tersebut juga menghadirkan Wakil Ketua DPRD Kota Padangpanjang Nurafni Fitri, SH

dan Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Hilma Damanhuri Djalil sebagai narasumber.

Rony mengatakan, sosialisasi tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku koperasi dan usaha kecil, terhadap regulasi yang mengatur pemberdayaan dan perlindungan sektor tersebut.

"Sosialisasi ini kita gagas agar masyarakat, khususnya pelaku koperasi dan usaha kecil, memahami substansi Perda Nomor 16 Tahun 2019. Dengan pemahaman yang baik, kita berharap koperasi dan usaha kecil semakin kuat, mampu berkembang, dan memiliki daya saing," kata man-

tan Ketua DPRD Tanahdatar itu.

Sementara itu, Nurafni Fitri menilai pemahaman terhadap regulasi penting agar pelaku koperasi dan usaha kecil dapat mengetahui hak, kewajiban serta peluang pengembangan usaha.

"Pelaku koperasi dan usaha kecil perlu memahami hak, kewajiban, serta peluang yang diberikan pemerintah melalui regulasi, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan," ujar Fitri.

Sebagai narasumber, Hilma Damanhuri Djalil menyampaikan materi mengenai substansi Perda Nomor 16 Tahun 2019, khususnya aspek pemberdayaan dan perlindungan koperasi serta usaha kecil.

Hilma menjelaskan, pemberdayaan perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas dan kelembagaan agar koperasi serta usaha kecil mampu berkembang secara berkelanjutan.

"Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia hingga akses pembiayaan, pemasaran, teknologi, serta perlindungan usaha," jelas Hilma.

Sosialisasi tersebut menjadi sarana untuk mempertemukan pemangku kebijakan dengan masyarakat dalam memperkuat pemahaman mengenai Perda Nomor 16 Tahun 2019 dan implementasinya bagi koperasi serta usaha kecil. (ned)

BREAKING
NEWS!

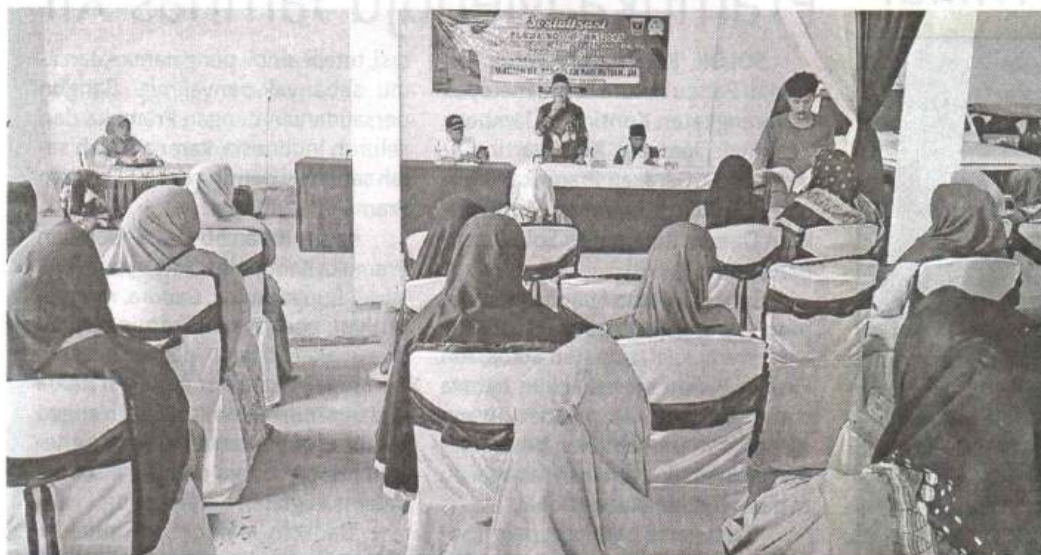


KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 11 AGUSTUS 2026	5

HIDUPKAN KEMBALI PERAN 'TUO RIMBO'

Wirman Dt. Pangeran Dorong Perlindungan Hutan Berbasis Nagari



ANGGOTA DPRD Sumbar Wirman Dt. Pangeran Nan Putih menyampaikan paparan dalam Sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2015 di Kecamatan Lareh Sago Halaban.

LIMAPULUH KOTA, KP - Kerusakan kawasan hutan tidak hanya mengancam kelestarian ekologi, tetapi juga memicu dampak negatif bagi kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Menghadapi ancaman tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Wirman Dt. Pangeran Nan Putih, mendorong penguatan partisipasi warga hingga ke tingkat jorong untuk melindungi kawasan hutan berbasis kearifan lokal.

Langkah ini ditegaskan Wirman Dt. Pangeran saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan. Kegiatan yang memanfaatkan masa reses persidangan ketiga ini diikuti ratusan warga dari berbagai nagari di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Minggu (9/8).

Ia menilai, masyarakat sekitar kawasan hutan seharusnya diposisikan sebagai garda terdepan penjaga kelestarian. Sumatera Barat sendiri secara kultural memiliki tradisi dan lembaga adat penjaga hutan yang dikenal sebagai 'tuo rimbo'. Sayangnya, peran lembaga adat tersebut kini kian memudar tergerus tingginya tekanan kebutuhan ekonomi.

"Peran serta masyarakat dalam memelihara hutan berbasis kearifan lokal dan hukum adat selama ini belum berjalan optimal, sehingga perlu

dilakukan sosialisasi terhadap Perda ini. Kita ingin memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan hutan berdasarkan kearifan lokal dan hukum adat, baik perorangan, kelompok, lembaga adat, maupun badan usaha," ujar politisi PPP tersebut.

Menurut mantan Anggota DPRD Limapuluh Kota ini, keterlibatan warga mencakup upaya pencegahan, pembatasan kerusakan, pemberdayaan, hingga fungsi pengawasan dan pembinaan.

Sosialisasi yang dihelat selama dua hari, Sabtu-Minggu (8-9/8) tersebut turut menghadirkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin sebagai narasumber utama. (dst)

NEWS

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 11 AGUSTUS 2026	7

SOSIALISASI PERDA NARKOBA

Evi Yandri Minta Pecandu Narkoba Direhabilitasi, Bukan Dijauhi

PADANG, KP — Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, mengajak masyarakat mengubah stigma terhadap pecandu dan pengguna narkoba. Menurutnya, pengguna narkoba bukanlah sampah masyarakat, melainkan korban yang patut dirangkul agar mampu pulih dan kembali produktif.

Hal itu disampaikan Evi Yandri saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Sumbar No mor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Gedung Rohana Kudus, Kompleks GOR Agus Salim, Padang, Minggu sore (9/8).

"Mereka bisa direhabilitasi dan sembuh. Kecuali jika mereka ikut mengedarkan narkoba, itu urusan berbeda dan harus ditindak secara hukum," kata Evi.

Ia menegaskan, rehabilitasi merupakan langkah kunci memutus rantai peredaran gelap narkoba yang kian masif di Sumbar. Pihaknya mendorong masyarakat untuk membawa keluarga mau-

pun kerabat yang terpapar agar segera mengakses fasilitas medis.

Perwakilan Dinkes Sumbar, Fradila menambahkan, layanan rehabilitasi di Kota Padang kini dapat diakses di Puskesmas Andalas, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Lubuk Buaya, hingga RSUP Dr. M. Djamil dan RSJ Prof. HB. Saanin. Biaya rehabilitasi pasien juga digratiskan lewat skema 'restorative justice'.

Sementara itu, Kepala Yayasan Pelita Jiwa Insani (YPJI), Syafrizal, membeberkan bahwa banyak mantan penyalahguna yang berhasil pulih usai menjalani penanganan tepat.

"Ada pasien kami yang sudah sembuh kini lulus menjadi anggota TNI Angkatan Darat, bekerja di PT KAI, hingga menjadi PNS. Ini bukti nyata bahwa mereka bisa pulih dan berprestasi," ujar Syafrizal. (fai)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman menyampaikan paparan saat Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Gedung Rohana Kudus, Padang.





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 11 AGUSTUS 2026	5

BUKA BIMTEK GURU SLB

Muhidi Tekankan Pendidikan Tanpa Diskriminasi



KETUA DPRD Sumbar Muhidi memberikan arahan di hadapan puluhan guru SLB saat membuka Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus Angkatan I di Padang.

PADANG, KP — Pendidikan khusus di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) masih dibayangi sejumlah tantangan krusial di tengah pesatnya pertumbuhan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan layanan pendidikan inklusif. Mulai dari keterbatasan pemanfaatan teknologi pembelajaran adaptif, minimnya sarana ramah disabilitas, hingga kesiapan peserta didik berkebutuhan khusus menembus dunia kerja.

Persoalan tersebut diungkapkan Ketua DPRD Sumbar Muhidi, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus/Guru SLB Angkatan I, di salah satu hotel di Kota Padang, Senin (10/8).

Bimtek yang digagas melalui program pikir Ketua DPRD dan ditumpangkan pada Dinas Pendidikan Sumbar ini diikuti sebanyak 207 tenaga pendidik dari 56 sekolah yang terbagi dalam dua

gelombang pelatihan.

Muhidi mengingatkan agar seluruh tenaga pendidik memberikan layanan edukasi tanpa diskriminasi. Selain itu, pemerataan guru serta fasilitas pendukung pembelajaran disabilitas menjadi PR penting yang bakal dikoordinasikannya bersama Pemprov Sumbar.

"Jangan sampai ada diskriminasi. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang la-

yak," kata Ketua DPRD Sumbar, Muhidi.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas guru agar proses belajar-mengajar dapat menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan unik tiap siswa. "Ini menjadi perhatian kita dan akan kita koordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat," kata Muhidi.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar melalui Kabid PGTK Monica menyebutkan, bimtek angkatan I yang digelar 10 Agustus diikuti 102 guru SLB asal Padang, Pariaman, dan Padang Pariaman, disusul Angkatan II pada 14 Agustus mendatang dengan 105 peserta.

"Pelatihan difokuskan pada penguasaan teknologi serta penyiapan kemandirian siswa," ujarnya. (fai)





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	KAMIS, 13 AGUSTUS 2026	6

Komisi V DPRD Sumbar Pelajari Tata Kelola Olahraga Sumsel, Cari Model Pembi- naan Atlet

KOMISI V DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mempelajari pola pembinaan atlet dan tata kelola olahraga di Sumatera Selatan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Keolahragaan Sumbar.

Studi komparatif tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (11/8). Rombongan Komisi V DPRD Sumbar diterima Kepala Dispora Sumsel M. Alfajri Zabidi.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman mengatakan, salah satu hal yang dipelajari dalam kunjungan tersebut adalah pola pembiayaan dan penganggaran olahraga, termasuk dukungannya terhadap pembinaan atlet dan penyelenggaraan kegiatan olahraga.

"Kita juga mempelajari pola penganggaran agar tidak terhambat regulasi dan berdampak pada sektor pengembangan dan event keolahragaan," kata Lazuardi.

Menurut dia, pembinaan olahraga tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian prestasi atlet. Sistem pembinaan berkelanjutan, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta kepastian pembiayaan juga menentukan keberhasilan pengembangan olahraga.

Karena itu, Komisi V menggali informasi mengenai pola pembinaan atlet, pengembangan olahraga prestasi, hingga tata kelola kelembagaan yang diterapkan Sumatera Selatan.

Lazuardi mengatakan, hasil studi tersebut akan menjadi salah satu referensi dalam pembahasan Ranperda Keolahragaan Sumbar. Menurutnya, regulasi yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan nyata pengembangan olahraga di daerah.

"Kita ingin mendapatkan gambaran bagaimana na tata kelola olahraga yang berjalan di daerah lain,

termasuk bagaimana pembiayaan dan pembinaan atlet dilakukan. Ini akan menjadi referensi bagi kita dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Sumatera Barat," ujarnya.

Ia mengatakan, model pengelolaan olahraga di Sumsel tidak serta-merta diterapkan di Sumbar. Kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi daerah, kemampuan anggaran, serta potensi olahraga yang dimiliki Sumbar.

Lazuardi menilai sistem pembinaan atlet perlu disusun secara berjenjang dan berkelanjutan, mulai dari pembibitan, pembinaan hingga peningkatan prestasi.

Dengan pola tersebut, potensi atlet Sumbar diharapkan dapat dikembangkan untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Selain pembinaan atlet, kunjungan tersebut juga menjadi sarana bertukar pengalaman terkait pengembangan kepemudaan dan membuka peluang kerja sama antarlembaga.

Sementara itu, Kepala Dispora Sumsel M. Alfajri Zabidi menyambut baik kunjungan Komisi V DPRD Sumbar. Menurut dia, pertukaran pengalaman antardaerah dapat menjadi bahan untuk memperkuat kebijakan pembangunan kepemudaan dan olahraga.

"Kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus bertukar informasi, pengalaman, dan strategi dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga di masing-masing daerah," ujarnya.

Alfajri berharap komunikasi dan kolaborasi antardaerah terus diperkuat sehingga program pengembangan pemuda dan olahraga dapat berjalan lebih optimal.

Studi komparatif tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi V DPRD Sumbar mencari formula pembinaan dan tata kelola olahraga yang lebih terukur dan berkelanjutan untuk dituangkan dalam Ranperda Keolahragaan. (*)

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



KOMISI V DPRD Sumbar kunjungan kerja ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumsel, Selasa (11/8). Komisi V mempelajari pola pembinaan atlet dan tata kelola olahraga Sumsel sebagai referensi Ranperda Keolahragaan Sumbar.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 13 AGUSTUS 2026 /	2

DPRD Sumbar Matangkan Pembahasan Ranperda Keolahragaan

PALEMBANG, HALUAN — Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mempelajari tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga di Sumatera Selatan (Sumsel), mulai dari pola pembinaan atlet, pengembangan olahraga prestasi hingga penguatan kelembagaan melalui studi komparatif ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (11/8).

Studi komparatif tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Komisi V DPRD Sumbar mencari referensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keolahragaan Sumbar. Kunjungan Komisi V DPRD Sumbar ke Sumsel disambut Kepala Dispora Sumsel, M. Alfajri Zabidi.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum untuk menggali pengalaman Sumsel dalam mengelola sektor olahraga, khususnya terkait pola pembiayaan dan penganggaran yang mendukung pembinaan atlet serta pelaksanaan berbagai kegiatan olahraga.

"Kita juga mempelajari pola penganggaran agar tidak terhambat regulasi dan ber-

dampak pada sektor pengembangan dan event keolahragaan," kata Lazuardi.

Menurutnya, pengembangan olahraga tidak hanya berkaitan dengan prestasi atlet. Tata kelola kelembagaan, sistem pembinaan berkelanjutan, dukungan sarana dan prasarana, serta kepastian pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam

membangun ekosistem olahraga yang mampu melahirkan atlet berprestasi.

Karena itu, Komisi V menggali informasi terkait pola pembinaan atlet, pengembangan olahraga prestasi hingga tata kelola kelembagaan yang diterapkan di Sumsel. Pengalaman tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam penyusunan kebijakan olahraga di Sumbar.

Lazuardi mengatakan, studi

komparatif penting dilakukan agar kebijakan yang dituangkan dalam Ranperda Keolahragaan tidak berhenti pada aspek regulasi, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata dalam pengembangan olahraga di daerah.

"Kita ingin mendapatkan gambaran bagaimana tata kelola olahraga yang berjalan di daerah lain, termasuk bagaimana pembiayaan dan pembinaan atlet dilakukan. Ini akan menjadi referensi bagi kita dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Sumatera Barat," ujarnya.

Ia menambahkan, model pengelolaan olahraga yang diterapkan Sumsel diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi, kemampuan anggaran dan potensi olahraga Sumbar.

Dengan tata kelola yang lebih baik, pembinaan atlet diharapkan tidak dilakukan secara sporadis, melainkan terencana sejak tahap pembibitan, pembinaan hingga peningkatan prestasi. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi atlet Sumbar dapat berkembang maksimal dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

NEWS

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KO



KOMISI V DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mempelajari tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga di Sumatera Selatan (Sumsel), mulai dari pola pembinaan atlet, pengembangan olahraga prestasi hingga penguatan kelembagaan melalui studi komparatif ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (11/8).

Selain bertukar informasi, kunjungan tersebut juga diarahkan untuk membuka ruang komunikasi dan kerja sama antar lembaga dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga.

Sementara itu, Kepala Dispora Sumsel, M. Alfajri Zabidi, menyambut baik kunjungan Komisi V DPRD Sumbar. Menurutnya, pertukaran informasi dan pengalaman antardaerah penting untuk memperkuat kebijakan serta program pembangunan kepemudaan dan olahraga.

Menurut Alfajri, kolaborasi antardaerah perlu terus diperkuat agar berbagai program pengembangan pemuda dan olahraga dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia berharap sinergi yang terbangun dapat memberikan kontribusi positif terhadap lahirnya generasi muda yang aktif, kreatif, berprestasi dan memiliki daya saing.

"Kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus bertukar informasi, pengalaman dan strategi dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga di masing-masing daerah, ujarnya.

Studi komparatif tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Komisi V DPRD Sumbar untuk mendorong lahirnya tata kelola olahraga yang lebih profesional, terukur, berkelanjutan dan berorientasi pada prestasi. (h/len)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SABTU, 15 AGUSTUS 2026	5

Simak Pidato Presiden Prabowo, Muhidi Tekankan Pentingnya Evaluasi Kinerja

PADANG, KP — Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan komitmen kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan sekaligus melanjutkan pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan usai memimpin Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda mendengarkan pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar ini turut dihadiri para Wakil Ketua DPRD Sumbar, yakni Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satria, dan Iqra Chissa. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Gubernur Sumbar Vasko Russemy beserta jajaran dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar.

Muhidi menyebut, pidato kenegaraan Presiden tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI, melainkan juga instrumen penting bagi daerah untuk mengukur capaian sekaligus

mengevaluasi program kerja yang masih berjalan.

"Kita sama-sama telah mendengarkan laporan atas kinerja lembaga-lembaga negara yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan pesan-pesan kemerdekaan pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI," tutur Muhidi.

Menurutnya, laporan kinerja tersebut memberi gambaran objektif mengenai sejauh mana efektivitas lembaga negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang juga menjadi tolok ukur akuntabilitas bagi publik.

Menyesuaikan dengan tema HUT RI 'Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur', Muhidi menegaskan bahwa pembangunan Sumbar harus terus diakselerasi dengan menjaga nilai budaya dan karakter Minangkabau.

"Dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan, mari kita lanjutkan pembangunan daerah yang sedang dikerjakan agar Sumatera Barat semakin maju, sejahtera, serta beradab dalam bingkai NKRI," tutupnya. (fai)



KETUA DPRD Sumbar Muhidi mengetok palu saat memimpin Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Padang, Jumat (14/8).

NEWS

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	RABU, 12 AGUSTUS 2026	2

Ketua Komisi IV Ajak Masyarakat Siaga Hadapi Bencana

PESSEL, HALUAN — Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, mengajak masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Hal itu disampaikan saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumbar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana, Sabtu dan Minggu (8-9/8) di daerah pemilihannya (dapil) di Pesisir

Selatan (Pessel).

Doni Harsiva Yandra mengatakan, Sumbar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor hingga berbagai bencana hidrometeorologi.

Karena itu, menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keter-

libatan seluruh elemen masyarakat.

"Penanggulangan bencana bukan hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun kesiapsiagaan, meningkatkan pengetahuan masyarakat dan melakukan langkah-langkah mitigasi sejak dini," ujarnya.

Ia menyebutkan, Perda Nomor 4 Tahun 2023 menjadi salah satu landasan dalam

memperkuat sistem penanggulangan bencana di Sumbar. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya dipahami pemerintah dan pemangku kepentingan, tetapi juga diketahui masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Doni juga mengajak masyarakat membangun budaya sadar bencana di lingkungan masing-masing. Salah satunya dengan memahami jalur evakuasi, mengetahui titik kumpul

dan memahami langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.

"Masyarakat adalah garda terdepan ketika bencana terjadi. Dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik, risiko serta dampak bencana dapat kita minimalisir," katanya.

Menurutnya, sosialisasi Perda juga menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dengan masyarakat. Berbagai persoalan dan pengalaman masyarakat

dalam menghadapi bencana dapat menjadi masukan untuk memperkuat kebijakan penanggulangan bencana di Sumbar.

Ia berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada pemahaman terhadap regulasi, tetapi mampu mendorong gerakan bersama dalam membangun masyarakat Sumbar yang tangguh, tanggap dan siap menghadapi bencana. (h/len)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 12 Agustus 2026 (27 Syafar 1448 H)	//

DILEPAS DARI PADANG PANJANG

762 Anggota Kontingen Pramuka Sumbar Menuju Jamnas XII

PADANG PANJANG - Sebanyak 762 anggota Gerakan Pramuka yang tergabung dalam Kontingen Kwartir Daerah (Kwarda) 03 Sumatera Barat memulai perjalanan menuju Jambore Nasional (Jamnas) Pramuka XII-2026 di Jakarta. Kota Padang Panjang menjadi titik keberangkatan kontingen yang akan mengikuti kegiatan nasional tersebut pada 14-20 Agustus 2026.

Pelepasan kontingen dilakukan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumatera Barat Audy Joinaldy, didampingi Walikota Padang Panjang Hendri Arnis, dalam upacara di halaman Balaikota Padang Panjang, Senin (10/8/2026).

Sebanyak 762 orang tergabung dalam kontingen Sumbar yang terdiri atas peserta Jambore Pramuka Penggalang, pimpinan kontingen, pembina pendamping, serta unsur pendukung lainnya.

Audy berpesan agar seluruh peserta tidak hanya mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, tetapi juga menjaga nama baik Sumbar selama berada di lokasi Jamnas. Menurutnya, peserta memiliki kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Minangkabau sekaligus membangun persahabatan dengan Pramuka dari berbagai daerah.

"Selamat mewakili Sumatera Barat. Jaga sikap, perkenalkan budaya Sumbar dan miliki solidaritas serta persatuan dengan daerah lain," ujar Audy.

Ia mengapresiasi Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah memfasilitasi pelepasan kontingen Sumbar. Menurutnya, Jamnas menjadi kesempatan berharga bagi peserta untuk mendapatkan pengalaman baru, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mengikuti kegiatan kepramukaan berskala nasional.

"Kalian adalah orang-orang yang dipilih untuk mewakili Sumbar. Ini merupakan kebanggaan. Manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman dan bertemu dengan Pramuka dari berbagai daerah," katanya.

Sementara itu, Wako Hendri yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Kwartir Cabang 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang mengatakan, keberangkatan dari Padang Panjang memiliki makna tersendiri. Dari kota ini, para peserta memulai perjalanan untuk membawa nama Sumbar ke tingkat nasional.

"Dari Kota Padang Panjang inilah adik-adik memulai perjalanan membawa nama Sumatera Barat. Kami berharap perjalanan ini menjadi awal dari pengalaman yang baik dan prestasi yang membanggakan," ujarnya.

Hendri mengingatkan peserta agar menjaga nama baik Sumbar melalui sikap disiplin, santun, mandiri, dan bertanggung jawab. Ia juga mendorong peserta memanfaatkan Jamnas sebagai ruang untuk memperluas wawasan, membangun persahabatan, serta mengenal keberagaman budaya Indonesia.

Menurut Hendri, pengalaman selama Jamnas diharapkan tidak berhenti sebagai kenangan mengikuti kegiatan nasional, tetapi menjadi bekal bagi peserta untuk mengembangkan karakter, kepemimpinan, kemandirian, dan kepedulian terhadap lingkungan setelah kembali ke daerah.

Pelepasan tersebut turut dihadiri Wakil Walikota Alex Saputra, Pj. Sekretaris Daerah Kuartini Deti Putri, Kepala Kantor Kementerian Agama Mukhlis M. Danyon Brimob Kopol Jendriyal, serta sejumlah pejabat terkait. (205)



SOSIALISASI - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Doni Harsiya Yandra, S.IP., ME, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana, di Nagari Muaro Ale, Kecamatan IV Nagari Bayang Ulu Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (8/8). /lati

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 12 Agustus 2026 (27 Syafar 1448 H)	8

SOSIALISASI PERDA OLEH WAKIL KETUA DPRD SUMBAR

Evi Yandri Ajak Warga Rangkul Pecandu Narkoba untuk Direhabilitasi

PADANG - SINGGALANG

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman, menegaskan bahwa masyarakat perlu mengubah pola pikir negatif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, para pecandu bukanlah sampah masyarakat, melainkan korban yang bisa sembuh, kembali berkontribusi, bahkan berprestasi.

"Mereka bisa direhabilitasi dan sembuh. Kecuali jika mereka ikut mengedarkan narkoba, itu urusan berbeda dan harus ditindak secara hukum," ujar Evi Yandri saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika,

dan Zat Adiktif Lainnya di Gedung Rohanna Kudus, Kompleks GOR Agus Salim, Padang, Minggu sore (9/8/2026).

Evi menekankan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba adalah korban. Oleh karena itu, di kalangan penggiat antinarkoba, mereka lebih tepat disebut sebagai pasien.

"Mereka harus dirangkul, diajak rehabilitasi, dan disembuhkan. Daripada mereka terciduk aparat hukum, sebaiknya lebih dulu dibawa untuk rehabilitasi," paparnya. Ia menambahkan, rehabilitasi merupakan bagian krusial dari upaya pencegahan. Dengan menyembuhkan para pengguna, masyarakat secara tidak langsung ikut menghambat perluasan peredaran

narkoba. Evi menyadari, berbagai upaya pemerintah dan aparat penegak hukum di Sumbar selama ini belum memberikan hasil signifikan tanpa peran aktif masyarakat.

"Sumbar bukan lagi sekadar daerah perlintasan, melainkan sudah menjadi tempat peredaran. Karena itu, saya konsisten menyosialisasikan perda antinarkoba

ini karena ancamannya sudah sangat masif," tegasnya.

Dalam sosialisasi tersebut, perwakilan Dinas Kesehatan Sumbar, Fradila, turut memaparkan fasilitas medis yang tersedia. Untuk Kota Padang, masyarakat dapat mengakses layanan rehabilitasi di Puskesmas Andalas, Puskesmas Lubuk Begalung, Puskesmas Lubuk

Kilangan, dan Puskesmas Lubuk Buaya. Selain itu, layanan juga tersedia di RSUP Dr. M. Djamil dan RS Jiwa Prof. HB. Saanin.

"Ada program restorative justice yang menggratiskan biaya rehabilitasi pasien penyalahgunaan narkoba. Jadi, jangan ragu untuk mengusahakan kesembuhan mereka," kata Fradila.

Upaya pemulihan ini juga didukung oleh Yayasan Pelita Jiwa Insani (YPJI) yang didirikan oleh Evi Yandri sejak tahun 2014. Kepala YPJI, Syafrizal, mengungkapkan bahwa banyak mantan pasiennya yang kini sukses di masyarakat setelah dinyatakan sembuh.

"Ada pasien kami yang sudah sembuh kini lulus menjadi anggota TNI Angkatan Darat, bekerja di PT KAI, hingga menjadi PNS. Ini bukti nyata bahwa mereka bisa pulih dan berprestasi," ungkap Syafrizal, yang dalam acara itu juga menghadirkan empat pasien rehabilitasi untuk berbagi pengalaman sebagai pembelajaran bagi peserta. (*)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 12 Agustus 2026 (27 Syafar 1448 H)	6

BIMTEK KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN KHUSUS

Ketua DPRD Sumbar Dorong Pendidik jadi Inspirator Siswa

PADANG - SINGGALANG

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menekankan pentingnya penguasaan keterampilan bagi para pendidik. Hal tersebut krusial dalam menghadapi arus perubahan teknologi dan informasi yang kian cepat.

Pendidikan Khusus di Kota Padang, Senin (10/8).

Langkah ini sejalan dengan komitmen DPRD Sumbar dalam memperkuat kualitas kepemimpinan, manajemen, serta mutu pendidikan di ranah Minang.

Dalam arahnya, Muhidi mendorong tenaga pendidik (tendik) agar tidak sekadar mentransfer ilmu secara konvensional di kelas.

Pendidik masa kini dituntut mampu bertransformasi menjadi sumber inspirasi, fasilitator yang andal, serta motivator bagi para peserta didik.

"Jika ibu-ibu datang ke sekolah hanya untuk mengajar, maka kualitas peserta didik pasti berada di bawah kualitas ibu-ibu sekalian. Itu sudah

pasti, karena belum tentu apa yang diajarkan dapat diserap secara baik oleh siswa," ujar Muhidi di hadapan peserta.

Oleh karena itu, ia meminta guru mengoptimalkan fungsi-fungsi edukasi modern lainnya.

"Gunakanlah fungsi yang lain, yaitu sebagai inspirator, fasilitator, dan motivator. Ben-tuklah karakter siswa sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab, kejujuran, serta ke-mandirian," imbuhnya.

Muhidi juga menambahkan bahwa guru harus mampu bertindak sebagai agen perubahan (agent of change) yang membentuk karakter kuat pada generasi muda.

Di tengah tantangan era digital, peran guru sekolah luar biasa (SLB) menjadi fondasi

utama dalam melahirkan sum-ber daya manusia (SDM) yang mandiri untuk mendukung visi jangka panjang Indonesia.

Bimtek Peningkatan Kom-petensi Guru Pendidikan Khu-sus ini digelar secara berke-lanjutan guna mendorong kompetensi profesional para guru SLB.

Selain itu, program ini bertu-juan memperkuat implemen-tasi sistem pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan berpusat pada kebutuhan spesifik pe-serta didik berkebutuhan khu-sus.

Agenda strategis ini diikuti oleh puluhan Guru SLB yang berasal dari tiga wilayah kerja, yakni Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman. (401)

BREAKING NEWS



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KO

EMATEK - Ketua DPRD Sumbang, Muhiidi saat membuka kegiatan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus di Kota Padang, Senin (10/8). (1st)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 12 Agustus 2026 (27. Syafar 1448 H)	

Warga Ketaping Diajak Kenali Potensi Bencana

PADANG PARIAMAN - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sitti Izzati Aziz, menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana kepada warga Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Minggu pagi (9/8).

Kegiatan yang berlangsung di Pondok Lesehan Eby "Piak Nona", Jalan Akses Bandara ini dihadiri oleh masyarakat setempat, Wali Nagari Ketaping terpilih Dasman, serta Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Sumbar Acil Erbara.

Dalam pemaparannya, Sitti Izzati Aziz menekankan pentingnya mendongkrak pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana.

Mengingat Sumbar merupakan daerah rawan bencana, kesiapsiagaan warga menjadi kunci utama dalam menekan risiko dan dampak kerugian.

"Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman regulasi dan langkah evakuasi harus terus ditingkatkan," ujar Sitti.

Sitti menjelaskan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2023 menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk bergerak secara terencana, terpadu, terkoordinasi, serta menyeluruh.

Ia juga mengajak warga Ketaping mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar demi memahami langkah antisipasi sebelum, saat dan pascabencana.

"Kuncinya ada pada kesiapsiagaan. Dengan bekal pengetahuan yang matang, kita bisa meminimalkan risiko sekaligus menyelamatkan lebih banyak jiwa saat terjadi darurat," tambahnya.

Senada dengan hal itu, Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Sumbar, Acil Erbara, mengingatkan bahwa masyarakat adalah garda terdepan saat bencana melanda.

Menurutnya, penguatan kapasitas warga di tingkat nagari harus menjadi prioritas bersama.

Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, mengapresiasi edukasi regulasi ini. Ia berharap sosialisasi tersebut mampu memberikan panduan praktis bagi warga dalam menghadapi situasi darurat di lapangan. (401)



Sosialisasi perda tentang penanggulangan bencana oleh anggota DPRD Sumbar Sitti Izzati Aziz di Ketaping, Padang Pariaman. (ist)

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat	RABU, 12 AGUSTUS 2026	8

Ketua DPRD Sumbar Dorong Guru Jadi Ins pirator Peserta Didik

PADANG, HALUAN — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menekankan pentingnya tenaga pendidik (tendik) memiliki keterampilan atau *skill*, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi yang berlangsung begitu cepat.

Hal itu disampaikan Muhidi saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi

Guru Pendidikan Khusus, Senin (10/8).

Muhidi mendorong tenaga pendidik tidak hanya hadir di

sekolah untuk mengajar, tetapi juga mampu menjadi sumber inspirasi, fasilitator dan motivator bagi peserta didik. Peran tersebut dinilai penting untuk mendorong siswa lebih giat belajar dan memiliki semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Selain itu, guru juga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik sekaligus menjadi *agent of change* di lingkungan pendidikan.

"Kalau ibu-ibu datang ke sekolah hanya mengajar, kualitas peserta didik pasti di bawah kualitas ibu-ibu. Karena belum tentu apa yang diajarkan diserap dengan baik. Gunakan fungsi yang lain, yaitu sebagai inspirator, fasilitator dan motivator," ujar Muhidi.

Menurutnya, guru juga harus mampu membentuk karakter peserta didik agar memiliki rasa tanggung jawab, kejujuran dan kemandirian.

Ia menilai, peningkatan kompetensi guru menjadi hal

penting seiring perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Karena itu, guru dituntut terus meningkatkan kemampuan agar proses pembelajaran dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus tersebut digelar untuk meningkatkan kompetensi profesional guru pendidikan khusus sekaligus memperkuat implementasi pembelajaran yang inklusif, adaptif

dan berpusat pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Peserta kegiatan terdiri dari guru Sekolah Luar Biasa (SLB) dari Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. (h/adv)

NEWS

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



KETUA DPRD memberi motivasi kepada peserta Bimtek



PESERTA kegiatan Bimtek yang diadakan





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus



PESERTA kegiatan





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	JUMAT, 14 AGUSTUS 2026	4

PADANG DISELIMUTI KABUT Nanda Satria Imbau Warga Tidak Panik dan Tetap Waspada

PADANG, HALUAN — Fenomena udara berkabut yang terlihat menyelimuti Kota Padang dan sejumlah wilayah di Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria.

Fenomena *haze* atau udara berkabut merupakan kondisi ketika udara dipenuhi partikel-partikel sangat kecil dan kering yang tersuspensi di atmosfer, seperti debu, aerosol, asap, maupun polutan. Kondisi tersebut membuat pandangan terhadap objek yang jauh menjadi kurang jelas dan langit tampak berkabut atau keabuan.

Haze berbeda dengan kabut biasa. Kabut umumnya terbentuk dari butiran air, sedangkan *haze* lebih banyak dipengaruhi partikel kering di udara.

Kondisi udara yang tampak berkabut tersebut sebelumnya dijelaskan BMKG berkaitan dengan minimnya curah hujan, kondisi udara yang kering, lemahnya pergerakan angin, serta adanya sumber partikel dari aktivitas manusia maupun lingkungan di Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi itu membuat permukaan tanah menjadi lebih kering sehingga partikel-partikel kering lebih mudah bertahan di atmosfer dan menyebabkan jarak pandang berkurang.

Nanda Satria mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena perubahan kondisi atmosfer dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pengguna kendaraan



WAKIL Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria.

di jalan raya.

"Kita perlu memahami dulu penyebabnya secara tepat. Jangan sampai masyarakat langsung menyimpulkan bahwa udara berkabut ini merupakan kabut asap akibat kebakaran. Informasi dari BMKG perlu menjadi rujukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar," ujar Nanda di Padang, Kamis (13/8).

Menurutnya, kondisi udara berkabut juga perlu diantisipasi apabila berlangsung dalam waktu cukup lama. Selain berpotensi mengurangi jarak pandang, kondisi atmosfer yang kering dan minim hujan perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko kebakaran lahan di sejumlah wilayah.

Nanda meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi cuaca dan kualitas udara di Sumatera Barat. Langkah antisipasi dinilai penting agar perubahan kondisi lingkungan dapat segera diketahui dan

ditindaklanjuti.

"Kita berharap kondisi ini tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Pemantauan harus terus dilakukan, terutama terhadap potensi titik panas dan kebakaran lahan. Masyarakat juga harus ikut menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran," katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Bagi masyarakat yang berkendara, terutama pada pagi hari ketika jarak pandang berpotensi menurun, diminta meningkatkan kewaspadaan dan menyesuaikan kecepatan kendaraan.

Berdasarkan pembaruan prakiraan BMKG pada 13 Agustus 2026, sejumlah wilayah Kota Padang masih mencatat potensi kondisi "udara berkabut", sementara beberapa kawasan lainnya diperkirakan mengalami kondisi kabut/asap pada periode tertentu. (h/len)

BREAKING NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Jumat, 14 Agustus 2026 (29 Syafar 1448 H)	3

Nanda Satria Imbau Warga Padang Pakai Masker dan Jaga Kesehatan di Tengah Udara Berkabut

PADANG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria, mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Langkah ini perlu diambil untuk mengantisipasi dampak fenomena udara berkabut yang menyelimuti Kota Padang dan sejumlah wilayah Sumbar dalam beberapa hari terakhir.

Selain menjaga kesehatan fisik, Nanda meminta warga yang berkendara, terutama pada pagi hari saat jarak pandang berpotensi menurun, untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyesuaikan kecepatan kendaraan. Warga juga diharapkan selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum beraktivitas di luar rumah.

"Yang paling penting sekarang adalah masyarakat tidak panik, tetapi tetap waspada. Ikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah. Kalau kondisi udara semakin memburuk atau jarak pandang semakin terbatas, tentu kita harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas," ujar Nanda, Kamis (13/8).

Nanda juga mengingatkan masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Menurutnya, kondisi atmosfer yang kering dan minim hujan saat ini perlu diwaspadai karena berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah.

"Kita berharap kondisi ini tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Pemantauan harus terus dilakukan, terutama terhadap potensi titik panas (hotspot). Masyarakat juga harus ikut menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran," katanya.

Terkait hal tersebut, Nanda meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan kondisi cuaca dan kualitas udara di Sumbar. Langkah antisipasi ini



Nanda Satria, S.IP
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat

dinilai penting agar setiap perubahan kondisi lingkungan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan sendiri secara sepihak terkait fenomena ini.

"Kita perlu memahami dulu penyebabnya secara tepat. Jangan sampai masyarakat langsung menyimpulkan

bahwa udara berkabut ini merupakan kabut asap akibat kebakaran. Informasi dari BMKG perlu menjadi rujukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar," tambah Nanda.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah menjelaskan bahwa kondisi udara yang tampak seperti berkabut ini berkaitan dengan minimnya curah hujan, kondisi udara yang kering, lemahnya pergerakan angin, serta adanya sumber partikel dari aktivitas manusia maupun lingkungan di Sumbar selama beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut membuat permukaan tanah menjadi lebih kering sehingga partikel-partikel kering lebih mudah bertahan di atmosfer dan menyebabkan jarak pandang berkurang.

Fenomena ini dikenal sebagai haze atau udara kabut, yaitu kondisi ketika udara dipenuhi partikel-partikel sangat kecil dan kering yang tersuspensi di atmosfer, seperti debu, aerosol, asap, maupun polutan. Hal ini membuat pandangan terhadap objek yang jauh menjadi kurang jelas dan langit tampak keabu-abuan. Haze berbeda dengan kabut biasa karena kabut umumnya terbentuk dari butiran air, sementara haze lebih banyak dipengaruhi oleh partikel kering di udara.

Berdasarkan pembaruan prakiraan BMKG pada 13 Agustus 2026, sejumlah wilayah Kota Padang memang masih mencatat potensi kondisi "udara berkabut", sementara beberapa kawasan lainnya diperkirakan mengalami kondisi kabut atau asap pada periode tertentu. (401)

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Meningkatkan Kehidupan Masyarakat	JUMAT, 14 AGUSTUS 2026	8

Komisi V DPRD Sumbar Matangkan Pembahasan Ranperda Keolahragaan

PALEMBANG, HALUAN — Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mempelajari tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga di Sumatera Selatan (Sumsel), mulai dari pola pembinaan atlet, pengembangan olahraga prestasi hingga penguatan kelembagaan melalui studi komparatif ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (11/8).

Studi komparatif tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Komisi V DPRD Sumbar mencari referensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keolahragaan Sumbar. Kunjungan Komisi V DPRD Sumbar ke Sumsel disambut Kepala Dispora Sumsel, M. Alfajri Zabidi.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum untuk menggali pengalaman Sumsel dalam mengelola sektor olahraga, khususnya terkait pola pembiayaan dan penganggaran yang mendukung pembinaan atlet serta pelaksanaan berbagai kegiatan olahraga.

"Kita juga mempelajari pola penganggaran agar tidak terhambat regulasi dan berdampak pada sektor pengembangan dan event keolahragaan," kata Lazuardi.

Menurutnya, pengembangan olahraga tidak hanya berkaitan dengan prestasi atlet. Tata kelola kelembagaan, sistem pembinaan berkelanjutan, dukungan sarana dan prasarana, serta kepastian pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam

membangun ekosistem olahraga yang mampu melahirkan atlet berprestasi.

Karena itu, Komisi V menggali informasi terkait pola pembinaan atlet, pengembangan olahraga prestasi hingga tata kelola kelembagaan yang diterapkan di Sumsel. Pengalaman tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam penyusunan kebijakan olahraga di Sumbar.

Lazuardi mengatakan, studi komparatif penting dilakukan agar kebijakan yang dituangkan dalam Ranperda Keolahragaan tidak berhenti pada aspek regulasi, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata dalam pengembangan olahraga di daerah.

"Kita ingin mendapatkan gambaran bagaimana tata kelola olahraga yang berjalan di daerah lain, termasuk bagaimana pembiayaan dan pembinaan atlet dilakukan. Ini akan menjadi referensi bagi kita dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Sumatera Barat," ujarnya.

Ia menambahkan, model pengelolaan olahraga yang diterapkan Sumsel diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi, ke-

mampuan anggaran dan potensi olahraga Sumbar.

Dengan tata kelola yang lebih baik, pembinaan atlet diharapkan tidak dilakukan secara sporadis, melainkan terencana sejak tahap pembibitan, pembinaan hingga peningkatan prestasi. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi atlet Sumbar dapat berkembang maksimal dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Selain bertukar informasi, kunjungan tersebut juga diarahkan untuk membuka ruang komunikasi dan kerja sama antar lembaga dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga.

Sementara itu, Kepala Dispora Sumsel, M. Alfajri Zabidi, menyambut baik kunjungan Komisi V DPRD Sumbar. Menurutnya, pertukaran informasi dan pengalaman antar daerah penting untuk memperkuat kebijakan serta program pembangunan kepemudaan dan olahraga.

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

daan dan olahraga.

Ia berharap sinergi yang terbangun dapat memberikan kontribusi positif terhadap lahirnya generasi muda yang aktif, kreatif, berprestasi dan memiliki daya saing.

"Kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus bertukar informasi, pengalaman dan strategi dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga di masing-masing daerah," ujarnya.

Menurut Alfajri, kolaborasi antardaerah perlu terus diperkuat agar berbagai program pengembangan pemuda dan olahraga dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Studi komparatif tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Komisi V DPRD Sumbar untuk mendorong lahirnya tata kelola olahraga yang lebih profesional, terukur, berkelanjutan dan berorientasi pada prestasi. (*)



BERFOTO bersama



ANGGOTA Komisi V dalam Studi komparatif yang dilaksanakan



STUDI komparatif Komisi V DPRD Sumbar ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Selatan





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 18 AGUSTUS 2026	7

DPRD Sumbar Ketok Palu KUA-PPAS 2027 dan Perubahan 2026



MAIFRIZON

PADANG, KP -

DPRD Sumbar menggelar maraton rapat paripurna dengan tiga agenda strategis sepanjang Jumat (14/8). Pembahasan intensif dari pagi hingga malam tersebut bermuara pada pengesahan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Rangkaian sidang diawali pagi harinya dengan mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2026. Maraton dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, hingga bermuara pada pengambilan keputusan bersama pada malam hari.

Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon membeberkan, penuntasan dua dokumen penganggaran ini sangat krusial karena menjadi fondasi utama penyusunan Perubahan APBD 2026 serta APBD 2027.

"Dua agenda tersebut penting sebagai landasan penyusunan Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027," ujar Maifrizon.

Ia juga menegaskan, proses ketok palu kesepakatan anggaran telah berjalan sah sesuai aturan tatib DPRD Sumbar lantaran jumlah legislator yang hadir melebihi ambang batas kuorum dua pertiga anggota. Penetapan ini memastikan arah program pembangunan Sumbar untuk dua tahun anggaran ke depan tetap berjalan di jalur yang tepat. (fai)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 18 AGUSTUS 2026	6

KUA-PPAS 2027 Disepakati Rp5,976 Triliun, DPRD Sumbar Dorong Optimalisasi Pendapatan

DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dengan proyeksi belanja daerah Rp5,97 triliun. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, DPRD meminta anggaran tersebut diarahkan pada program yang benar-benar menjadi prioritas dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (14/8). Dalam rapat yang sama, DPRD dan Pemprov Sumbar juga menyepakati Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, kesepakatan itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026. Namun, ia mengingatkan keterbatasan kemampuan fiskal harus menjadi perhatian dalam menentukan arah penggunaan anggaran.

"Kesepakatan ini menjadi pijakan awal menuju pembahasan APBD. Tantangan berikutnya adalah memastikan ruang fiskal yang terbatas diarahkan pada program yang benar-benar prioritas," kata Muhidi.

Menurutnya, kebijakan anggaran yang telah disepakati harus diterjemahkan dalam program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran yang terukur. DPRD juga menegaskan angka pendapatan dan belanja dalam KUA-PPAS 2027 maupun Perubahan KUA-PPAS 2026 masih akan didalami dalam pembahasan Ranperda APBD.

Pendapatan 2027

Ditargetkan Rp6,03 Triliun

Dalam KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah Sumbar ditargetkan Rp6,03 triliun. Target tersebut terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Rp3,26 triliun, pendapatan transfer Rp2,75 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp17,87 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan Rp5,97 triliun, terdiri dari belanja operasi Rp4,29 triliun, belanja modal Rp708,60 miliar, belanja tidak terduga Rp35 miliar, serta belanja transfer Rp932,64 miliar.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah pusat, serta arah pembangunan daerah. Keterbatasan anggaran, katanya, membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan alokasi. "Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, kita berupaya agar anggaran yang terbatas tersebut dialokasikan secara tepat," ujarnya.

Pemprov Sumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 mencapai 6,9 persen. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4,64 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,23 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 78,04.

Target tersebut mengacu pada tema pembangunan Sumbar 2027, yakni "Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan".

Delapan Prioritas Pembangunan

Untuk mencapai sasaran itu, pemerintah menetapkan delapan prioritas pembangunan. Di antaranya pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan, penguatan lumbung pangan dan ekonomi berkelanjutan, pengembangan nagari dan desa, serta penguatan Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di kawasan Sumatera bagian barat.

Prioritas lainnya meliputi pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tangguh terhadap bencana, penguatan kehidupan beradab dan berbudaya, peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan UMKM, serta pembenahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

DPRD Soroti PAD

Dalam pembahasan KUA-PPAS, DPRD juga menyoroti kondisi PAD yang dinilai belum optimal. Sejumlah sumber penerimaan pada semester I 2026, seperti Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat, belum mencapai target maksimal.

DPRD menilai kondisi tersebut tidak berarti potensi pendapatan daerah telah berkurang. Pemerintah daerah masih diminta mengoptimalkan pemungutan dan menggali sumber pendapatan lain yang sah untuk meningkatkan PAD.

Perubahan APBD 2026

Sementara dalam Perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp6,61 triliun atau bertambah Rp315,84 miliar dibandingkan target awal Rp6,29 triliun.

Belanja daerah juga meningkat menjadi Rp6,97 triliun atau bertambah Rp570,01 miliar dari alokasi awal sekitar Rp6,40 triliun. Perubahan tersebut turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp284,67 miliar.

Sebanyak Rp155,66 miliar di antaranya merupakan sisa dana Transfer ke Daerah yang telah ditentukan penggunaannya dan wajib dianggarkan kembali dalam Perubahan APBD 2026.

Mahyeldi mengatakan kondisi fiskal tersebut menuntut pemerintah daerah mengelola anggaran secara efisien, efektif, disiplin, transparan, dan akuntabel.

Setelah kesepakatan KUA-PPAS ditetapkan, Pemprov Sumbar selanjutnya akan menyusun dan menyampaikan Ranperda tentang Perubahan APBD 2026 serta Ranperda tentang APBD 2027 untuk dibahas bersama DPRD Sumbar. (*)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORA



RAPAT paripurna DPRD bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penetapan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 di Padang, Jumat (14/8). DPRD mengingatkan keterbatasan ruang fiskal harus diarahkan pada program prioritas yang memberi manfaat bagi masyarakat.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SELASA, 18 AGUSTUS 2026	9

POLEMIK PAJAK AIR PERMUKAAN

Pemprov Sumbar Diminta Tidak Tebang Pilih



EVI YANDRI RAJO BUDIMAN

PADANG, KP - Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, meminta Pemprov Sumbar bertindak tegas mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Air Permukaan (PAP) sepanjang dipayungi regulasi yang sah.

Evi menegaskan, pemungutan PAP bukan sekadar upaya menambah penerimaan, melainkan fondasi untuk memperkuat fiskal daerah dalam membiayai infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, hingga penanganan bencana. Langkah optimalisasi ini sepatutnya tidak selalu dipandang antagonistis terhadap dunia usaha.

"Kalau memang tidak ada dasar hukumnya, silakan lawan. Tetapi kalau dasar hukumnya ada, kewajibannya ada, dan objek pajaknya ada, maka kewajiban tersebut harus dibayar," kata Evi.

Ia juga mengingatkan agar perdebatan PAP tidak disempitkan hanya pada persoalan alat ukur atau 'flowmeter' semata. Penentuan kewajiban pajak harus ditinjau secara komprehensif dari konstruksi hukum, pemanfaatan air permukaan, hingga Nilai Perolehan Air Permukaan.

Meski menghormati hak perusahaan yang menempuh sengketa hukum, Evi meminta Pemprov Sumbar tidak ragu menagih hak daerah tanpa membedakan skala bisnis wajib pajak.

"Jangan hanya tegas kepada pengusaha kecil, tetapi ragu kepada perusahaan besar. Semua harus sama di hadapan hukum dan pajak. Dunia usaha silakan tumbuh, tetapi ketika menggunakan sumber daya yang menjadi objek pajak, kewajiban membayar pajak harus dihormati," tegasnya. (fai)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Selasa, 18 Agustus 2026 (4 Rabiul Awal 1448 H)	6

RAPAT PARIPURNA HUT RI KE -81

DPRD Sumbar Dorong Percepatan Pembangunan Daerah

PADANG - SINGGALANG

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, memimpin rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto pada Jumat (14/8/2026). Agenda yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam memimpin sidang, Muhidi didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Sumbar, yakni Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satria, dan Iqra Chissa. Turut hadir Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi. **Evaluasi 21 Bulan Kabinet dan Rekor Pangan**

Dalam pidato kenegaraan yang disiarkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian akuntabilitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan selama 21 bulan masa kerjanya. Kepala Negara menekankan bahwa arah kebijakan ke depan akan difokuskan secara masif pada ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Presiden secara khusus menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mencetak rekor cadangan

beras nasional serta percepatan program kemandirian energi melalui implementasi biodiesel B50. Menurut pusat, pencapaian sektor krusial ini menjadi jangkar penting agar perekonomian domestik tetap stabil dan berdaulat.

Fokus 8 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)

Selain memaparkan kinerja lembaga negara, Presiden Prabowo menjabarkan arah kebijakan fiskal yang tertuang dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut dipastikan akan bertumpu pada 8 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yang meliputi:

1. Kedaulatan pangan.
2. Kemandirian energi dan air.
3. Peningkatan mutu pendidikan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
5. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis komoditas lokal.
6. Pembangunan infrastruktur, perumahan, dan penguatan ketahanan terhadap bencana.
7. Penguatan ekonomi kerakyatan serta akselerasi pembangunan desa.
8. Penurunan angka kemiskinan secara ekstrem.

Sumbar Harus

Gerak Cepat dan Nyata

Menanggapi poin-poin strategis dari pusat tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh sekadar menjadi wacana, melainkan harus dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Laporan capaian yang disampaikan oleh Presiden

harus dijadikan parameter sekaligus instrumen evaluasi bagi akuntabilitas kinerja di tingkat daerah.

"Laporan kinerja lembaga negara dan paparan target presiden ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kita semua untuk mengukur tingkat efektivitas, profesionalitas, dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Muhidi.

Sejalan dengan tema peringatan HUT ke-81 RI, yaitu "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", Muhidi mengajak seluruh pemangku kepentingan di ranah Minang untuk memperkuat kekompakan. Sinergi antara pemerintah provinsi dan legislatif sangat dibutuhkan agar delapan program prioritas nasional tersebut dapat diturunkan menjadi kebijakan daerah yang tepat sasaran.

"Dengan semangat proklamasi kemerdekaan, mari kita lanjutkan pembangunan daerah yang sedang berjalan. Kita bawa Sumatera Barat bergerak lebih cepat, mandiri, sejahtera, serta tetap teguh menjaga nilai adat, beradab, dan berbudaya dalam bingkai NKRI," pungkasnya. (*)

NEWS

**BREAKING
NEWS!**

74



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG		8

SELASA, 18 AGUSTUS 2026

DPRD Sumbar dan Pemprov Sepakati KUA-PPAS 2027

Rp5,976 Triliun

Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah

PADANG, METRO

DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Pemerintah Provinsi Sumbar menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 dengan total Rp5,976 triliun.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Iqra Chissa dan Nanda Satria serta dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi dan para kepala OPD, Jumat malam (14/8).

Dalam rapat tersebut, DPRD dan Pemprov Sumbar juga menyepakati Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Pendapatan daerah dalam perubahan tersebut ditargetkan mencapai Rp6,61 triliun, naik Rp315,84 miliar atau 5,02 persen dibandingkan target awal sebesar Rp6,29 triliun.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan,

kesepakatan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026.

"Kebijakan anggaran yang telah disepakati harus diterjemahkan ke

dalam program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran yang terukur. Pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta konsisten memedomani kesepakatan tersebut," kata Muhidi.

Menurut Muhidi, kesepakatan ini menjadi pijakan awal menuju pembahasan APBD. Tantangan berikutnya adalah

memastikan ruang fiskal yang terbatas diarahkan pada program yang benar-benar prioritas.

"Kami juga mengingatkan bahwa proyeksi pendapatan dan alokasi belanja dalam KUA-PPAS 2027 maupun Perubahan KUA-PPAS 2026 masih bersifat tentatif. Pendalaman masih dapat dilakukan

pada tahapan penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD 2027 serta Ranperda Perubahan APBD 2026," tegas dia.

Dalam pembahasan KUA-PPAS, DPRD menyoroti kondisi pendapatan daerah yang menghadapi tekanan setelah bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 serta ketidakpastian ekonomi global. Kondisi tersebut antara lain tercermin dari realisasi sejumlah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester I 2026 yang belum optimal.

Beberapa sumber penerimaan yang menjadi perhatian yakni Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Alat Berat. Rendahnya realisasi pada semester pertama turut memengaruhi prognosis pendapatan semester II yang menjadi pertimbangan dalam penetapan target Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027.

Namun, DPRD menilai penurunan target PAD tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya potensi penerimaan daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan penerimaan melalui optimalisasi pemungutan oleh OPD terkait.

"Karena itu, pemerintah daerah diminta mengambil langkah konkret dan terukur dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi PAD yang masih tersedia, termasuk sumber pendapatan lain yang sah," tutur dia.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan asumsi ekonomi makro, kebijakan nasional, serta arah pembangunan daerah. Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menetapkan prioritas secara selektif.

"Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, kita berupaya agar anggaran yang terbatas tersebut dialokasikan secara tepat," kata Mahyeldi dalam pidato pendapat akhirnya. (**)

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN



SEPAKAT—Ketua DPRD Sumbar, Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Iqra Chissa, Nanda Satria dan Gubernur Sumbar Mahyeldi usai penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 dengan total Rp5,976 triliun.



GUBERNUR Sumbar, Mahyeldi saat mendandatangani kesepakatan bersama KUA-PPAS Tahun 2027.



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi saat mendandatangani kesepakatan bersama KUA-PPAS Tahun 2027.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman saat mendandatangani kesepakatan bersama KUA-PPAS Tahun 2027.

WAKIL
Ketua
DPRD
Sumbar,
Iqra Chissa
saat
mendandatangani
kesepakatan
bersama
KUA-PPAS
Tahun
2027.



WAKIL
Ketua
DPRD
Sumbar,
Nanda
Satria saat
mendandatangani
kesepakatan
bersama
KUA-PPAS
Tahun
2027.



SUASANA Rapat Paripurna penetapan kesepakatan bersama rancangan KUA-PPAS Tahun 2027.

NEWS

**BREAKING
NEWS!**

77



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar SELASA, 18 AGUSTUS 2026		9

DPRD Sumbar Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden

Padang, Rakyat Sumbar — DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Paripurna agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81, pada Sidang Tahunan MPR-RI, Sidang Bersama DPR dan DPD-RI, di ruang sidang utama, Jumat, (14/8).

"Bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pidato Presiden pada momentum kenegaraan ini menjadi kesempatan seluruh elemen bangsa untuk melihat kembali capaian yang telah diraih, mengevaluasi ber-

bagai tantangan yang dihadapi, sekaligus mencermati arah pembangunan dan kebijakan nasional ke depan," kata Ketua DPRD Sumbar, saat memimpin rapat paripurna.

Ia melanjutkan, bagi pemerintahan daerah dan lembaga perwakilan rakyat di daerah, pidato tersebut juga menjadi bahan penting dalam memperkuat sinergi, antara kebijakan nasional dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di daerah.

"Dari pidato kenegaraan tersebut banyak pesan-pesan kemerdekaan yang bisa kita ambil, sebagai bekal dan penyemangat bagi kita untuk terus bekerja dan membangun negeri dalam mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia," ucapnya.

Menurut Muhi, sejalan dengan tema Indonesia Berdaulat, adil dan Makmur, maka marilah tingkatkan kebersamaan, kekompakan dan terus berjuang untuk menjadikan negara dan daerah kita maju dan masyarakatnya semakin sejahtera.

"Kita bangun kebersamaan dan tingkatan komitmen kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini dan dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan tersebut," ungkap Muhi.

Ia mengungkapkan, lanjutkan pembangunan daerah yang telah dan sedang dikerjakan untuk menjadikan Sumatera Barat lebih maju, dan lebih sejahtera serta maju bersama sebagai daerah yang beradab dan berbudaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kemerdekaan merupakan pintu gerbang dan titik awal untuk mewujudkan cita-cita para pendiribangsa ini. Oleh karena itu, kita harus terus berjuang dalam mengisi kemerdekaan untuk kejayaan Negara Indonesia, dengan berinovasi dan berkarya agar Indonesia menjadi Negara yang maju sebagaimana yang dicita-citakan oleh Founding Father Bung Karno dan Bung Hatta," pungkasnya. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KETUA DPRD
Sumbar Muhidi
saat memimpin ra-
pat paripurna agen-
da Mendengarkan
Pidato Kenegaraan
Presiden Republik
Indonesia Prabowo
Subianto dalam
rangka memperin-
gati Hari Ulang Ta-
hun Kemerdekaan
Republik Indonesia
ke 81, di ruang
sidang utama,
Jumat, (14/8).



KETUA DPRD Sumbar Muhidi saat memimpin rapat-paripurna agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81, di ruang sidang utama, Jumat, (14/8).



KETUA DPRD Sumbar Muhidi didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan M. Iqra Chissa Putra serta wakil gubernur Vasko Ruseimy saat rapat paripurna Jumat, (14/8).



SUASANA saat rapat paripurna agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81, di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Jumat, (14/8).



**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	SELASA, 18 AGUSTUS 2026	7

DPRD SUMBAR DORONG OPTIMALISASI PENDAPATAN

KUA-PPAS 2027 Disepakati Rp5,976 Triliun

PADANG, HALUAN- DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027 dengan total Rp5,976 triliun. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat malam (14/8).

Dalam rapat yang sama, DPRD dan Pemprov Sumbar juga menyepakati Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Pendapatan daerah dalam perubahan tersebut ditargetkan mencapai Rp6,61 triliun, naik Rp315,84 miliar atau 5,02 persen dibandingkan target awal sebesar Rp6,29 triliun.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026.

Menurutnya, kebijakan anggaran yang telah disepakati harus diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran yang terukur. Pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta konsisten mempedomani kesepakatan tersebut.

"Kesepakatan ini menjadi pijakan awal menuju pembahasan APBD. Tantangan berikutnya adalah memastikan ruang fiskal

pada program yang benar-benar prioritas," ujar Muhidi.

DPRD juga mengingatkan bahwa proyeksi pendapatan dan alokasi belanja dalam KUA-PPAS 2027 maupun Perubahan KUA-PPAS 2026 masih bersifat tentatif. Pendalaman masih dapat dilakukan pada tahapan penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD 2027 serta Ranperda Perubahan APBD 2026.

Dalam pembahasan KUA-PPAS, DPRD menyoroti kondisi pendapatan daerah yang menghadapi tekanan setelah bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 serta ketidakpastian ekonomi global. Kondisi tersebut antara lain tercermin dari realisasi sejumlah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester I 2026 yang belum optimal. Beberapa sumber penerimaan yang menjadi perhatian yakni Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Alat Berat.

Rendahnya realisasi pada semester pertama turut memengaruhi prognosis pendapatan semester II yang menjadi pertimbangan

target Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027.

Namun, DPRD menilai penurunan target PAD tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya potensi penerimaan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan penerimaan melalui optimalisasi pemungutan oleh OPD terkait.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan asumsi ekonomi makro, kebijakan nasional, serta arah pembangunan daerah. Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menetapkan prioritas secara selektif.

Dalam KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp6,03 triliun. Angka tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp3,26 triliun, pendapatan transfer Rp2,75 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp17,87 miliar.

Sementara itu, belanja

daerah dialokasikan sekitar Rp5,97 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp4,29 triliun, belanja modal Rp708,60 miliar, belanja tidak terduga Rp35 miliar, dan belanja transfer sekitar Rp932,64 miliar.

Dengan postur tersebut, Pemprov Sumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 mencapai 6,9 persen. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4,64 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,23 persen, dan Indeks Pemba-

ngunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 78,04.

Mahyeldi menyebut perekonomian Sumbar pada triwulan I 2026 tumbuh 5,02 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang hanya mencapai 1,89 persen setelah terdampak bencana alam. Untuk 2026, pemerintah mempertahankan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 persen melalui penguatan stimulus fiskal dan percepatan proyek

strategis daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp284,67 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat sisa dana yang ditentukan penggunaannya (earmark) dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp155,66 miliar yang wajib dianggarkan kembali dalam Perubahan APBD 2026.

Dalam Perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah ditargetkan Rp6,61 triliun, naik Rp315,84 miliar atau 5,02 persen dari target awal Rp6,29 triliun. Sementara belanja daerah meningkat menjadi Rp6,97 triliun, atau naik Rp570,01 miliar dari alokasi awal Rp6,40 triliun. Dengan kondisi tersebut, Pemprov Sumbar menegaskan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien, efektif, disiplin, transparan, dan akuntabel. (*)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

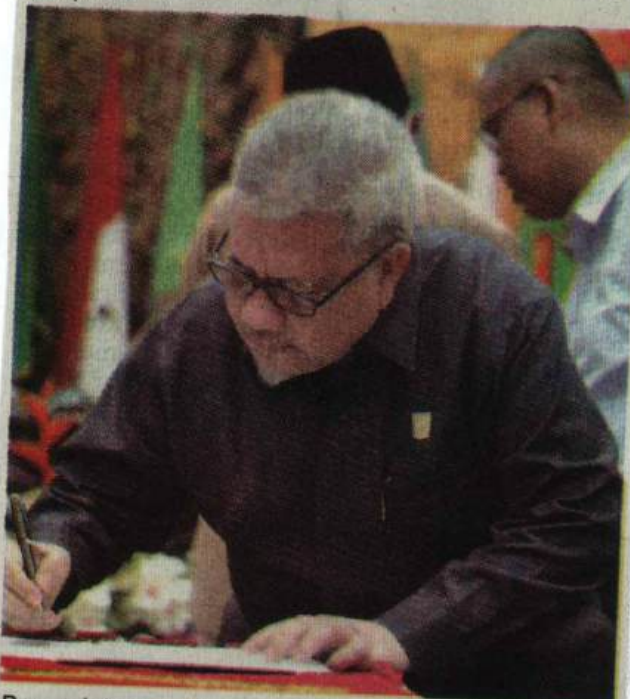
KOP



Berfoto bersama



Anggota DPRD Sumbar mengikuti jalannya rapat paripurna



Penandatanganan kesepakatan bersama oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi



Rapat paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penetapan Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027

**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Harian Tasek Haluan Menceritakan Kehidupan Masyarakat	SELASA, 18 AGUSTUS 2026	7

Dony Oskaria, Kado 17 Agustus untuk Presiden Prabowo dan Pemuda Minangkabau Merajut Indonesia Maju

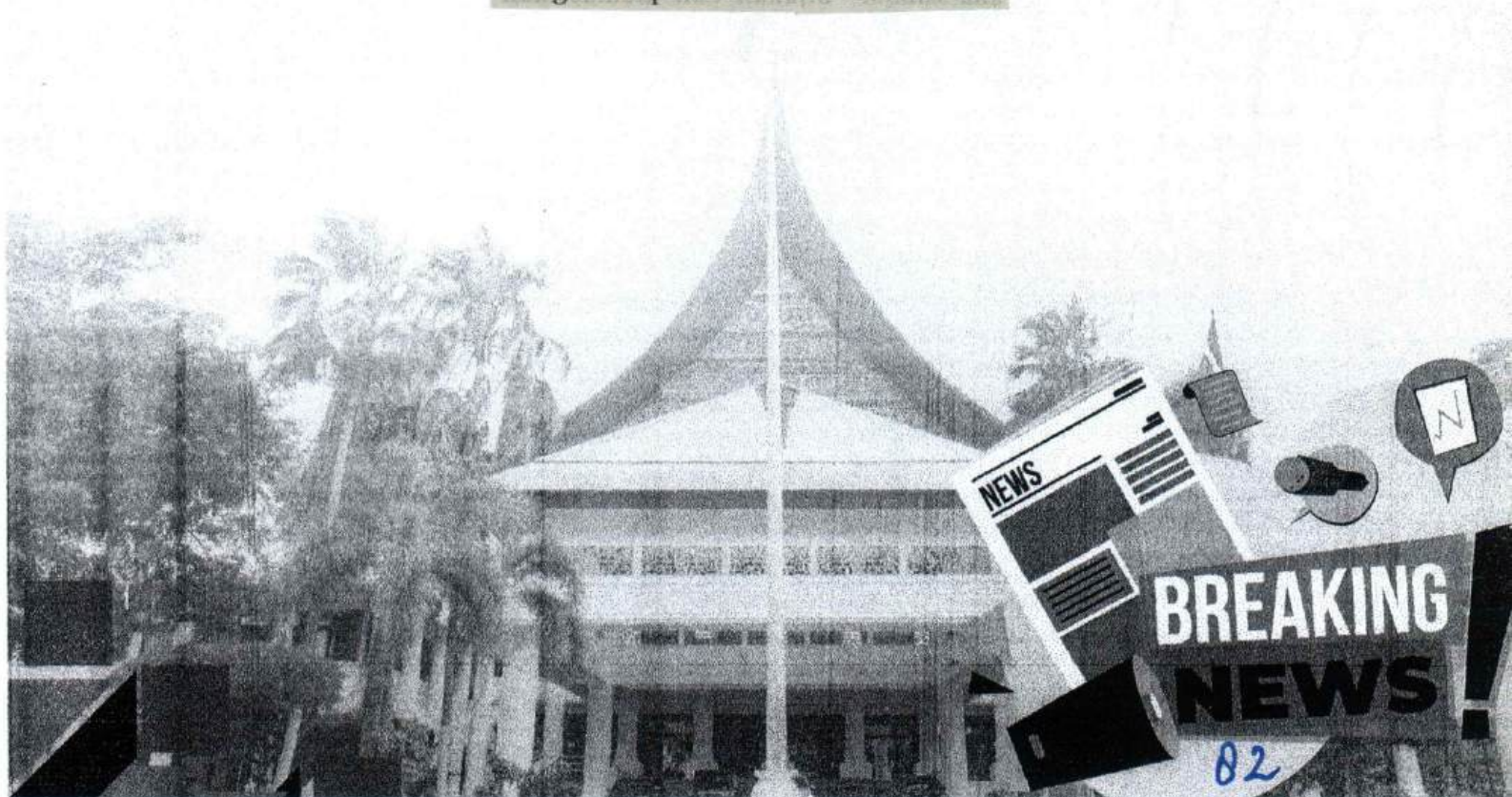
Oleh: Nanda Satria
Wakil Ketua DPRD Sumbar



Setiap 17 Agustus, kita terbiasa melihat ke belakang. Kita mengingat siapa yang berjuang, siapa yang berkorban, dan bagaimana bangsa ini sampai pada kemerdekaan. Tetapi bagi saya, kemerdekaan seharusnya juga menjadi

kesempatan untuk bertanya: setelah 81 tahun merdeka, apa yang akan kita lakukan dengan warisan ini?

Pertanyaan itu kembali muncul di kepala saya Jumat, 14 Agustus 2026, ketika kami di DPRD Sumatera Barat bersama-sama mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Ketika Presiden berbicara mengenai capaian BUMN dan arah besar





KLIPING BERITA

Danantara, saya justru teringat kepada seorang senior dan mentor saya Uda Dony Oskaria.

Bukan semata karena beliau kini menjadi Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara. Saya teringat karena saya pernah melihat sosok ini jauh sebelum namanya berada di tengah agenda besar negara.

Saya Pernah Menjadi Muridnya

Dan dari sana, saya melihat perjalanan Uda Dony bukan hanya sebagai perjalanan seorang profesional yang berhasil. Saya melihatnya sebagai sebuah cerita tentang bagaimana seorang anak Minang membangun dirinya dari bawah, lalu kembali mengambil bagian dalam pekerjaan besar Indonesia. Menurut saya, ada sesuatu yang penting dari perjalanan itu.

BUMN dan Pekerjaan yang Belum Selesai

Kita bisa memperdebatkan banyak hal tentang BUMN. Tetapi satu hal sulit untuk diabaikan: perusahaan negara dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami perubahan kinerja yang besar. Ketika Dony dipercaya Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri BUMN pada Oktober 2024, ia masuk dalam fase transformasi yang sedang berjalan. Pada 2025, BUMN membukukan laba bersih sekitar Rp335 triliun. Memasuki 2026, sejumlah perusahaan pelat merah masih menunjukkan tren positif. Hingga Mei 2026, Pelindo mencatat laba Rp2,01 triliun, tumbuh 94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pupuk Indonesia Group mencatat laba Rp6,70 triliun, meningkat 230 persen secara tahunan. Data tersebut masih bersifat unaudited. (Antara News)

Bagi saya, angka-angka tersebut bukan sekadar angka. Ia menunjukkan bahwa tata kelola, efisiensi, konsolidasi, dan transformasi bisnis dapat mengubah cara perusahaan negara bekerja. Tetapi saya juga tidak ingin berhenti pada rasa bangga terhadap kenaikan laba. Karena laba bukan tujuan akhir sebuah BUMN. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: untuk apa kekuatan ekonomi sebesar itu digunakan?

Menurut saya, BUMN harus menjadi lebih dari sekadar perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Ia harus menjadi salah satu mesin utama yang memperkuat industri nasional, menciptakan rantai nilai di dalam negeri, membuka kesempatan bagi pengusaha nasional, dan membuat Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Di sinilah saya melihat Danantara menjadi penting.

Danantara dan Keberanian Menjadi Negara Besar

Saya melihat Danantara bukan hanya sebagai institusi baru untuk mengelola aset negara. Saya melihatnya sebagai sebuah keberanian untuk mengubah cara kita memandang kekayaan negara. Indonesia memiliki sumber daya, perusahaan, aset, pasar, talenta, dan modal yang besar. Tantangannya adalah bagaimana semua kekuatan itu tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak berhenti sebagai aset yang kita banggakan.

Aset harus menjadi kekuatan. Kekuatan harus menjadi nilai. Dan nilai itu harus kembali menjadi kekuatan Indonesia. Kalau Danantara mampu mengoptimalkan aset negara, mendorong investasi strategis, memperkuat perusahaan nasional, dan mengembangkan industri yang memiliki nilai tambah, maka dampaknya

seharusnya jauh lebih besar daripada sekadar angka laba.

Indonesia bisa memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Kita tidak hanya menjadi pasar. Kita menjadi pemain. Kita tidak hanya menjual bahan mentah. Kita menguasai rantai nilai. Kita tidak hanya mengundang modal dari luar. Kita juga memiliki kekuatan modal untuk melakukan ekspansi. Dan yang tidak kalah penting, pengusaha nasional mendapatkan kesempatan untuk naik kelas.

Saya percaya Indonesia tidak akan menjadi negara maju hanya karena pemerintahnya kuat. Indonesia akan menjadi negara maju ketika pemerintahnya kuat, BUMN-nya kuat, industri nasionalnya kuat, dan pengusahanya juga kuat. Itulah sebabnya saya melihat kepercayaan Presiden kepada Dony Oskaria dalam konteks yang lebih besar dari sekadar jabatan.

Dony menjadi bagian dari sebuah pekerjaan yang jauh lebih besar: bagaimana Indonesia mengubah kekuatan yang kita miliki menjadi kekuatan yang benar-benar terasa dalam kehidupan ekonomi bangsa.

Saya Pernah Menjadi Muridnya

Di titik ini, saya kembali pada pengalaman pribadi. Saya mengenal Uda Dony sekitar 10 tahun lalu, pada 2016, ketika saya menjadi salah satu peserta angkatan pertama Minangkabau Business School and Entrepreneurship Center atau MBS-EC.

Di angkatan pertama itu ada Bang Fadly Amran dan Bang Adi dari Solok Radjo. Yang kami dapatkan saat itu bukan sekadar motivasi untuk menjadi pengusaha. Kami diajarkan bagaimana mengelola bisnis secara profesional. Bagaimana membuat laporan keuangan yang baik. Bagaimana membangun sistem. Bagaimana mengembangkan usaha agar bisa menjadi besar. Tetapi bagi saya, pelajaran yang paling penting justru cara berpikirnya. Kami diajarkan untuk tidak melihat Sumatera Barat sebagai batas.

Jakarta harus kita lihat sebagai ruang bermain. Asia juga ruang bermain. Bahkan dunia harus kita lihat sebagai ruang bermain. Sepuluh tahun kemudian, saya baru semakin memahami betapa pentingnya cara pandang tersebut. Karena orang yang dulu berdiri di depan kami mengajarkan bagaimana membangun bisnis agar bisa besar, hari ini berada di tengah pekerjaan membangun kekuatan ekonomi Indonesia.

Saya bangga pernah menjadi murid dari mentor yang luar biasa dan sangat menginspirasi.

Dari Call Center hingga Meja Pengambil Keputusan

Perjalanan Uda Dony juga mengajarkan satu hal yang sering kita lupakan: tidak ada posisi besar yang dibangun dalam satu malam. Ia memulai karier sebagai petugas call center di Bank Universal. Dari sana ia menjadi personal banker, kemudian kepala divisi. Kariernya berlanjut ke Bank Mega, CT Corp, Garuda Indonesia, sektor pariwisata, hingga memimpin InJourney. Pada Oktober 2024, ia dipercaya menjadi Wakil Menteri BUMN. Februari 2025, ia ditunjuk menjadi COO Danantara. Pada Oktober 2025, Presiden kembali memberikan kepercayaan kepadanya sebagai Kepala BP BUMN. (Antara News)

Saya melihat rangkaian itu bukan sebagai jalan pintas. Justru sebaliknya. Itu adalah perjalanan panjang seseorang yang terus belajar, berpindah

AKING
NEWS!



KLIPING BERITA

medan, mengambil tanggung jawab, dan membangun kapasitas. Karena itu, ketika anak muda melihat Uda Dony hari ini, saya berharap mereka tidak hanya melihat jabatannya. Lihatlah perjalanan sebelum jabatan itu datang. Sebab yang paling inspiratif dari sebuah keberhasilan bukanlah posisi akhirnya, tetapi proses yang membuat seseorang layak dipercaya berada di posisi tersebut.

Minang Harus Naik Kelas

Dony adalah putra Tanjung Alam, Tanah Datar. Ia datang dari sebuah kultur yang memiliki tradisi panjang: merantau, berdagang, belajar, dan membangun jaringan. Tetapi saya merasa kita tidak boleh terus-menerus hanya membanggakan tradisi itu tanpa memperbaruinya.

Dulu urang awak merantau membawa dagangan. Hari ini, anak muda Minang harus berani merantau membawa perusahaan, teknologi, investasi, pengetahuan, dan jaringan. Dunia sudah berubah. Cara berjuangya berubah. Tetapi semangatnya tetap sama: mandiri, berani mengambil risiko, dan membawa hasil perjuangan untuk sesuatu yang lebih besar.

Saya percaya diaspora Minangkabau memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita ada di berbagai kota dan negara. Ada pengusaha, profesional, akademisi, investor, birokrat, teknokrat, dan berbagai profesi lainnya. Namun, pertanyaan besarnya bukan berapa banyak orang Minang yang sukses. Pertanyaannya adalah: berapa banyak keberhasilan itu yang berhasil kita hubungkan menjadi kekuatan bersama?

Saya tidak ingin diaspora kita hanya menjadi daftar nama orang-orang sukses. Saya ingin diaspora menjadi jaringan. Yang sukses membuka jalan. Yang punya jaringan membuka akses. Yang punya ilmu membagikan ilmu. Yang punya modal membuka kesempatan. Dengan begitu, keberhasilan seseorang tidak berhenti menjadi cerita pribadi. Ia menjadi tangga bagi generasi berikutnya. Saya Tidak Ingin Hanya Ada Satu Dony Karena itu, saya punya satu mimpi. Kita jangan puas hanya memiliki satu Dony Oskaria.

Kita harus melahirkan 100 Dony Oskaria dari Ranah Minang.

Bukan berarti 100 orang harus menjadi pejabat atau CEO. Saya membayangkan ada yang menjadi pengusaha besar. Ada yang membangun perusahaan teknologi. Ada yang menjadi investor. Ada yang menjadi profesional kelas dunia. Ada yang menjadi akademisi. Ada yang menjadi teknokrat. Ada yang membawa perusahaan Minang ke pasar Asia.

Bentuknya boleh berbeda. Medannya boleh berbeda. Tetapi semangatnya sama: memiliki kapasitas dan keberanian untuk menjadi pemain. Sebab Indonesia menuju 2045 tidak cukup membutuhkan lebih banyak orang yang mencari pekerjaan. Kita membutuhkan orang yang menciptakan pekerjaan. Kita membutuhkan orang yang menciptakan teknologi.

Kita membutuhkan orang yang membangun industri. Kita membutuhkan orang yang menarik investasi. Kita membutuhkan orang yang berani membawa perusahaan Indonesia keluar dari batas Indonesia. Dan Sumatera Barat tidak boleh hanya menjadi

penonton. Ini Bukan Hanya Tugas Anak Muda Saya juga sadar, mengatakan anak muda harus maju jauh lebih mudah daripada menciptakan jalan agar mereka bisa maju. Karena itu, ini bukan hanya tugas anak muda. Ini juga tanggung jawab kami yang berada di pemerintahan dan politik.

Kalau kita ingin melahirkan pengusaha besar, kita harus menciptakan ekosistem yang memungkinkan mereka tumbuh. Kampus harus melahirkan talenta yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pemerintah harus membuka ruang kebijakan. Perbankan dan investor harus memperluas akses pembiayaan. Pengusaha harus membuka jaringan dan pasar. Media harus memberi ruang bagi gagasan dan karya. Organisasi pengusaha harus menjadi tempat bertumbuh, bukan sekadar tempat berkumpul.

Dan yang paling penting, Ranah dan Ranitau harus kembali terhubung. Saya percaya Sumatera Barat memiliki orang-orang hebat. Yang kita kurang adalah bagaimana orang-orang hebat itu saling menemukan, saling percaya, dan saling menguatkan.

Merajut Indonesia Maju

Delapan puluh satu tahun lalu, negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya. Dalam perjalanan menuju kemerdekaan itu, putra-putri berdarah Minangkabau ikut memainkan peranan penting. Mereka hadir dengan gagasan, pemikiran, perjuangan, diplomasi, dan keberanian untuk ikut merajut Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kemerdekaan itu sekarang menjadi warisan kita. Tetapi saya tidak melihat kemerdekaan sebagai garis akhir.

Merdeka adalah warisan. Membawa negara ini menjadi maju adalah tantangan. Dan menjadikannya kuat, mandiri, berdaulat secara ekonomi, serta disegani dunia adalah tanggung jawab generasi kita. Saya adalah anak muda yang optimistis. Saya percaya generasi saya tidak boleh hanya menjadi penonton dari perubahan besar yang sedang terjadi. Kami harus ikut bekerja. Membangun perusahaan. Menciptakan lapangan kerja. Menguasai teknologi. Menarik investasi. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Membawa perusahaan Indonesia ke dunia.

Saya percaya, Indonesia merdeka karena banyak peran putra-putri Minangkabau. Dan saya juga percaya, Indonesia akan maju ketika generasi Minangkabau hari ini kembali memberikan lakek tangan terbaiknya. Bukan sekadar dengan membanggakan siapa yang pernah kita miliki. Tetapi dengan melahirkan siapa yang akan kita banggakan 20 atau 30 tahun dari sekarang. Uda Dony bagi saya adalah salah satu contoh bahwa jalan itu ada. Saya pernah menjadi muridnya. Hari ini, saya ingin generasi saya menjadi murid dari zamannya sendiri: belajar lebih cepat, berani lebih jauh, dan bekerja lebih besar.

Sebab kita tidak hanya menerima kemerdekaan dari generasi sebelumnya. Kita juga sedang menentukan Indonesia seperti apa yang akan kita wariskan kepada generasi sesudah kita. Saya ingin menjadi bagian dari generasi itu. Generasi yang tidak hanya menjaga warisan kemerdekaan, tetapi berani membawa Indonesia ke babak berikutnya. Indonesia merdeka karena banyak peran orang Minang. Dan Indonesia akan maju dengan lakek tangan generasi Minang hari ini sebagai pilar-pilar utamanya. Mari kita merajut Indonesia maju! (*)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbang RABU 19 AGUSTUS 2026		7

Bank Nagari Salurkan Deviden dan CSR Rp381,49 M

Padang, Rakyat Sumbang—Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi semakin bermakna bagi Sumatera Barat. Pada Upacara Bendera 17 Agustus 2026 yang digelar di Istana Gubernur Sumatera Barat, PT Bank Nagari secara simbolis menyerahkan kontribusi kepada pemerintah daerah yang diserahkan oleh Hafid Dauli, Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari dan Andri Yulika, Komisaris Utama Bank Nagari berupa Dividen Tahun Buku 2025 serta Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Tahun 2026 kepada Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumate-

ra Barat.

Secara keseluruhan, nilai kontribusi tersebut mencapai Rp341.894.950.155, terdiri dari dividen Tahun Buku 2025 sebesar Rp339.354.950.155 dan bantuan sosial bidang pendidikan Tahun 2026 sebesar Rp2.540.000.000 untuk Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota.

Khusus untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bank Nagari menyerahkan dividen Tahun Buku 2025 sebesar Rp110.415.754.634.

Penyerahan secara simbolis yang dilakukan dalam rangkaian upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI tersebut menjadi simbol bahwa kinerja Bank Nagari tidak hanya memberikan manfaat secara bisnis, tetapi juga kembali kepada daerah dan masyarakat melalui kontribusi ekonomi dan sosial.

Kembali untuk Sumatera Barat

Direktur Kredit dan Syariah PT Bank Nagari, Hafid Dauli mengatakan, kontribusi melalui dividen dan bantuan pendidikan merupakan bagian dari komitmen Bank Nagari untuk terus tumbuh bersama daerah.

"Bagi Bank Nagari, pertumbuhan kinerja bukan hanya tentang pencapaian bisnis, tetapi juga bagaimana hasil dari kinerja tersebut dapat memberikan manfaat kembali kepada daerah dan masyarakat. Dividen merupakan bentuk kontribusi kepada pemegang saham, sementara dukungan di bidang pendidikan merupakan bagian dari komitmen sosial Bank Nagari untuk ikut membangun kualitas sumber daya manusia Sumatera Barat," katanya.

Direktur Utama PT Bank Nagari Gusti Candra secara terpisah mengatakan, momentum penyerahan kontribusi pada peringatan HUT Kemerdekaan RI memiliki makna tersendiri karena kemajuan suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari kekuatan ekonomi dan kualitas sumber daya manusianya.

"Kami melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Karena itu, Bank Nagari ingin mengambil bagian dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Kami berharap kontribusi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat," sebutnya.

Gusti menambahkan, Bank Nagari akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, tata kelola perusahaan, pengelolaan risiko, kualitas layanan serta kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Bank Nagari Selalu Berikan Manfaat

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi kontribusi Bank Nagari kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang diserahkan tepatan dengan momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Menurut Mahyeldi, sebagai bank milik daerah, Bank Nagari memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Sumatera Barat, tidak hanya melalui fungsi intermediasi perbankan, tetapi juga melalui kontribusi terhadap pendapatan daerah dan program sosial kemasyarakatan.

"Kita mengapresiasi kontribusi Bank Nagari kepada Sumatera Barat, baik melalui dividen maupun bantuan di bidang pendidikan. Ini menunjukkan bahwa Bank Nagari tidak hanya hadir

sebagai lembaga keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan daerah dan memberikan manfaat kepada masyarakat," katanya.

Mahyeldi berharap Bank Nagari dapat terus meningkatkan kinerja dan kontribusinya sehingga manfaat keberadaan bank dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat Sumatera Barat.

"Bank Nagari harus terus tumbuh menjadi bank yang sehat, kuat dan profesional, serta mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi daerah. Kita berharap peningkatan kinerja Bank Nagari akan berjalan seiring dengan peningkatan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Sumatera Barat," sebut Mahyeldi.

Dividen Tahun Buku 2025 yang diserahkan Bank Nagari kepada Provinsi Sumatera Barat serta pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp339.354.950.155. Dari total tersebut, Rp110.415.754.634 meru-

NEWS

BREAKING
NEWS!

85



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN

1AN

2

pakan dividen untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pembagian dividen tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi Bank Nagari sebagai badan usaha milik daerah kepada para pemegang saham pemerintah daerah.

Kontribusi melalui dividen juga mencerminkan adanya siklus manfaat dari keberadaan Bank Nagari di tengah perekonomian daerah. Kepercayaan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta fungsi intermediasi perbankan menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung pertumbuhan bisnis bank. Pada akhirnya, kinerja tersebut memberikan nilai tambah kembali kepada daerah melalui dividen.

Selain memberikan kontribusi melalui dividen, Bank Nagari juga menyalurkan bantuan sosial bidang pendidikan Tahun 2026 sebesar Rp2.540.000.000 untuk Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota.

Penyerahan bantuan terse-

but menjadi bagian dari komitmen Bank Nagari dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, khususnya dalam mendukung sektor pendidikan.

Gusti Candra menegaskan, Bank Nagari akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan masyarakat.

"Kepercayaan masyarakat dan pemegang saham adalah amanah yang harus kami jaga. Kami ingin Bank Nagari terus tumbuh bersama Sumatera Barat, sehingga setiap peningkatan kinerja dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi daerah dan masyarakat," jelasnya.

Melalui kinerja yang berkelanjutan, tata kelola yang baik, serta kontribusi ekonomi dan sosial, Bank Nagari menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari perjalanan pembangunan Sumatera Barat—tumbuh bersama daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (edg)



FOTO: ENDANG PRIBADI

DIREKTUR Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli dan Komisaris Utama Bank Nagari Andri Yulika menyerahkan Dividen Tahun Buku 2025 serta Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Tahun 2026 kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Senin (17/8).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar RABU, 19 AGUSTUS 2026		10

Lima Keltan Terima Bantuan Betor

Padang, Rakyat Sumbar — Lima kelompok tani (Keltan) di Kecamatan Kuraji Kota Padang menerima bantuan becak motor (Betor) yang bersumber dari dana Pokok-pokok Pikiran (Poker) Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandhi Rajo Budiman. Bantuan tersebut diserahkan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Selasa (18/8).

Kelima kelompok tani penerima bantuan tersebut adalah Lapau Munggu, Tuah Sakato, Serba Usaha, KWT Mekar Jaya, dan Summa Gadang.

Evi Yandhi Rajo Budiman menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata realisasi aspirasi masyarakat yang ia serap selama masa reses. "Ini adalah bentuk penerapan aspirasi warga saat reses. Dana poker memang kami prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Evi.

Evi menyebutkan, berbasis aspirasi ini dapat berjalan berkat sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif. Ia menilai sektor pertanian di Sumbar saat ini membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam menghadapi tantangan regenerasi petani.

Terlebih, kerahanan pangan merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus diselaraskan oleh pemerintah daerah.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandhi Rajo Budiman saat menyerahkan Betor kepada kelompok tani.

"Sektor pertanian butuh perhatian besar karena mayoritas petani kita sudah berumur. Jika tidak ada regenerasi dalam 10 tahun ke depan, kita bisa terancam bergantung pada impor. Pendapatan petani harus ditingkatkan agar sektor ini kembali dilirik sebagai profesi yang menjanjikan," sebut Evi.

Evi juga menggunakan agar bantuan betor ini digunakan se-

cara komunal untuk kepentingan seluruh anggota kelompok, bukan untuk kepentingan pribadi pengusaha. "Tolong rawat dan jaga barang bantuan ini dengan baik. Gunakan bersama-sama demi kemajuan kelompok, bukan untuk ketua saja," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar Afniwiman mengapresiasi kolaborasi konkret

ini. Ia mengakui keterbatasan anggaran dinas dalam menyehatkan petani tanpa adanya dukungan dari legislatif.

"Masyarakat tidak bisa sejahtera hanya lewat sosialisasi. Tanpa dukungan dana poker dari anggota dewan, program kami tidak akan berjalan maksimal. Kolaborasi inilah yang membuat petani bisa langsung menerima asas manfaat," pungkas Afniwiman. (byr/rel)

NEWS

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Barisan & Mera Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	RABU, 19 AGUSTUS 2026	3

Bank Nagari Salurkan Dividen dan Bantuan Pendidikan Rp341, 894 Miliar

KHUSUS untuk
Pemerintah
Provinsi
Sumatera
Barat, dividen
mencapai
Rp110.415.754.634
yang
diserahkan di
Istana
Gubernur
Sumbar, Senin
(17/8), IST



PADANG, HALUAN—PT Bank Nagari menyerahkan dividen dan bantuan pendidikan senilai total Rp341, 894 miliar untuk Sumatera Barat.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli serta Komisaris Utama Bank Nagari Andri Yulika menyerahkan secara simbolis kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah usai Upacara HUT RI ke-81 di Istana Gubernur Sumbar, Senin (17/8).

Dari total kontribusi tersebut, dividen Tahun Buku 2025 mencapai Rp339,354-950,155, sedangkan bantuan sosial bidang pendidikan sebesar Rp2,540,000,000 untuk Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota.

Khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dividen yang diserahkan

mencapai Rp110.415.754.634.

Direktur Kredit dan Syariah PT Bank Nagari, Hafid Dauli, mengatakan kontribusi tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Nagari untuk terus tumbuh bersama daerah.

"Bagi Bank Nagari, pertumbuhan kinerja bukan hanya tentang pencapaian bisnis, tetapi juga bagaimana hasil dari kinerja tersebut dapat memberikan manfaat kembali kepada daerah dan masyarakat.

Dividen merupakan bentuk kontribusi kepada pemegang saham, sementara dukungan di bidang pendidikan merupakan bagian dari komitmen sosial Bank Nagari untuk ikut membangun kualitas sumber daya manusia Sumatera Barat," ujarnya.

Direktur Utama PT Bank Nagari Gusti Candra mengatakan kemajuan daerah tidak dapat dilepaskan dari kekuatan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.

"Kami melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang karena itu, Bank Nagari ingin mengambil bagian dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat," katanya.

Gusti menambahkan, Bank Nagari akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, tata kelola perusahaan, pengelolaan risiko, kualitas layanan, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Nagari ingin memastikan pertumbuhan perusahaan berjalan seiring dengan semakin luasnya manfaat yang dirasakan masyarakat.

Gusti Candra menegaskan, Bank Nagari akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan masyarakat.

"Kepercayaan masyarakat dan pemegang saham adalah amanah yang harus kami jaga. Kami ingin Bank Nagari terus tumbuh bersama Sumatera Barat, sehingga setiap peningkatan kinerja dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi daerah dan masyarakat," ujarnya. (h/tia)

BREAKING NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 19 Agustus 2026 (5 Rabiul Awal 1448 H)	2

Lima Kelompok Tani di Kuranji Terima Bantuan Bentor

Padang, Singgalang

Lima kelompok tani di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, menerima bantuan becak motor (bentor) yang bersumber dari dana Pokok-Pokok Pkltan (Pokir) Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman.

Bantuan tersebut diserahkan secara resmi oleh Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat pada Selasa (18/8). Penyerahan yang berlangsung di ruang rapat dinas terkait ini juga dirangkaikan dengan agenda sosialisasi.

Evi Yandri Rajo Budiman menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata realisasi aspirasi masyarakat yang ia serap selama masa reses.

"Ini adalah bentuk penyerapan aspirasi warga saat reses. Dana pokir memang

kami prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Evi Yandri.

Menurut Evi, program berbasis aspirasi ini dapat berjalan berkat sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif.

Ia menilai sektor pertanian di Sumbang saat ini membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam menghadapi tantangan regenerasi petani. Terlebih, ketahanan pangan merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus diselaraskan oleh pemerintah daerah.

"Sektor pertanian butuh perhatian besar karena mayoritas petani kita sudah berumur. Jika tidak ada regenerasi dalam 10 tahun ke depan, kita bisa terancam bergantung pada impor. Pendapatan petani harus ditingkatkan agar sektor ini kembali dilirik sebagai profesi yang menjanjikan," urai

Evi.

Evi juga mengingatkan agar bantuan bentor ini digunakan secara komunal untuk kepentingan seluruh anggota kelompok, bukan untuk kepentingan pribadi pengurus.

"Tolong rawat dan jaga barang bantuan ini dengan baik. Gunakan bersama-sama demi kemajuan kelompok, bukan untuk ketua saja," tegasnya.

Lima kelompok tani penerima bantuan tersebut adalah Lapau Munggu, Tuah Sakato, Serba Usaha, KWT Mekar Jaya, dan Summa Gadang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbang, Afriwirman, mengapresiasi kolaborasi konkret ini. Ia mengakui keterbatasan anggaran dinas dalam menyejahterakan petani tanpa adanya dukungan dari legislatif.

"Masyarakat tidak bisa sejah

tera hanya lewat sosialisasi. Tanpa dukungan dana, pokir dari anggota dewan, program kami tidak akan berjalan maksimal. Kolaborasi inilah yang membuat petani bisa langsung menerima asas manfaat," tutur Afriwirman.

Afriwirman menambahkan, bantuan bentor ini dirancang untuk menekan biaya operasional sekaligus memudahkan petani mengangkut hasil panen ke pasar guna meningkatkan pendapatan keluarga.

Namun, ia mengingatkan agar kelompok tani merawat aset tersebut karena masih banyak kelompok tani lain yang mengantre untuk mendapatkan giliran bantuan.

"Kami ingin membantu, tetapi petani juga harus berkomitmen merawat bantuan ini. Jangan sampai cepat rusak karena kurang pemeliharaan," pungkasnya. (401)



SERAHKAN BANTUAN - Wakil Ketua DPRD Sumbang, Evi Yandri Rajo Budiman, didampingi Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbang saat menyerahkan bantuan bentor pada kelompok tani, Selasa (18/8). (ist)

BREAKING NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 19 Agustus 2026 (5 Rabiul Awal 1448 H)	4

DALAM BENTUK DIVIDEN DAN BANTUAN PENDIDIKAN

Bank Nagari Salurkan Rp341,89 Miliar

PADANG - SINGGALANG

Bank Nagari menyerahkan dividen tahun buku 2025 dan bantuan sosial bidang pendidikan tahun 2026 kepada Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.

Penyerahan dividen dan bantuan pendidikan itu pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8) lalu, di Istana Gubernur Sumatera Barat. Kontribusi tersebut diserahkan Hafid Dauli, Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari dan Andri Yulika, Komisaris Utama Bank Nagari kepada gubernur.

Secara keseluruhan, nilai kontribusi tersebut mencapai Rp341.894.950.155, terdiri dari dividen Tahun Buku 2025 sebesar Rp339.354.950.155 dan bantuan sosial bidang pendidikan Tahun 2026 sebesar Rp2.540.000.000 untuk Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota.

Khusus untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bank Nagari menyerahkan dividen Tahun Buku 2025 sebesar

Rp110.415.754.634.

Penyerahan secara simbolis yang dilakukan dalam rangkaian upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI tersebut menjadi simbol bahwa kinerja Bank Nagari tidak hanya memberikan manfaat secara bisnis, tetapi juga kembali kepada daerah dan masyarakat melalui kontribusi ekonomi dan sosial.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli mengatakan, kontribusi melalui dividen dan bantuan pendidikan merupakan bagian dari komitmen Bank Nagari untuk terus tumbuh bersama daerah.

"Bagi Bank Nagari, pertumbuhan kinerja bukan hanya tentang pencapaian bisnis, tetapi juga bagaimana hasil dari kinerja tersebut dapat memberikan manfaat kembali kepada daerah dan masyarakat. Dividen merupakan bentuk kontribusi kepada pemegang saham, sementara dukungan di bidang pendidikan merupakan bagian dari komitmen sosial Bank Nagari untuk ikut membangun kualitas sumber daya manusia Sumatera Barat."

Direktur Utama PT Bank Nagari Gusti Candra secara terpisah mengatakan, momentum penyerahan kontribusi pada peringat

tan HUT Kemerdekaan RI memiliki makna tersendiri karena kemajuan suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari kekuatan ekonomi dan kualitas sumber daya manusianya.

"Kami melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Karena itu, Bank Nagari ingin mengambil bagian dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Kami berharap kontribusi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat."

Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi kontribusi Bank Nagari kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang diserahkan bertepatan dengan momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI.

Menurut Mahyeldi, sebagai bank milik daerah, Bank Nagari memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Sumatera Barat, tidak hanya melalui fungsi intermediasi perbankan, tetapi juga melalui kontribusi terhadap pendapatan daerah dan program sosial kemasyarakatan.

Mahyeldi berharap Bank Nagari dapat terus meningkatkan kinerja dan kontribusinya sehingga manfaat keberadaan bank dapat dirasakan semakin

luas oleh masyarakat Sumatera Barat.

"Bank Nagari harus terus tumbuh menjadi bank yang sehat, kuat dan profesional, serta mampu memberikan kontribusi yang semakin besar bagi daerah. Kita berharap peningkatan kinerja Bank Nagari akan berjalan seiring dengan peningkatan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Sumatera Barat."

Dividen untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dividen Tahun Buku 2025 yang diserahkan Bank Nagari kepada Provinsi Sumatera Barat serta pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp339.354.950.155.

Dari total tersebut, Rp110.415.754.634 merupakan dividen untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pembagian dividen tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi Bank Nagari sebagai badan usaha milik daerah kepada para pemegang saham pemerintah daerah.

Selain memberikan kontribusi melalui dividen, Bank Nagari juga menyalurkan bantuan sosial bidang pendidikan tahun 2026 sebesar Rp2.540.000.000 untuk Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota. (006)

DREAMING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



SERAHKAN - Hafid Dauli, Direktur Kredit dan Syariah Bank menyerahkan dividen kepada Gubernur Mahyeldi Ansharullah pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8) lalu, di Istana Gubernur Sumatera Barat. (Ist)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	RABU, 19 AGUSTUS 2026	4

Evi Yandri Salurkan Bentor Pokir untuk Petani Kuranji

PADANG, KP — Ancaman krisis regenerasi petani di Sumatera Barat menjadi perhatian serius jajaran legislatif. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kelangkaan petani usia muda dalam satu dekade ke depan dinilai bakal memaksa daerah bergantung pada pasokan pangan impor.

Guna menjaga kelangsungan sektor pertanian sekaligus mendorong pendapatan warga, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengalokasikan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) untuk membantu sarana transportasi hasil panen bagi para petani di Kota Padang.

Sebanyak lima kelompok tani di Kecamatan Kuranji menerima bantuan armada becak motor (bentor). Penyerahan bantuan ini difasilitasi oleh Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar, Selasa (18/8).

Sinergi antara DPRD dan Pemprov Sumbar ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan mendasar para petani di lapangan, khususnya dalam memangkas biaya distribusi hasil bumi menuju pasar.

Evi Yandri mengungkapkan, mayoritas pelaku usaha tani saat ini sudah memasuki usia lanjut.

Kondisi tersebut menuntut adanya perbaikan tingkat kesejahteraan agar profesi petani kembali diminati oleh generasi muda.

"Mayoritas petani kita sudah berumur. Jika tidak ada regenerasi dalam 10 tahun ke depan, kita bisa terancam bergantung pada impor," katanya.

Ia menegaskan, peningkatan pendapatan petani tidak hanya bergantung pada bantuan sarana produksi seperti bibit atau pupuk, tetapi juga efisiensi angkutan hasil panen. Bantuan bentor ini diharapkan mampu menekan biaya transportasi dari area perkebunan atau sawah menuju titik kumpul.

Wakil pimpinan dewan tersebut mengingatkan agar unit bentor yang disalurkan tidak dimonopoli oleh pengurus kelompok. Fasilitas kendaraan roda tiga tersebut wajib difungsikan sebagai milik bersama untuk seluruh anggota.

"Tolong rawat dan jaga barang bantuan ini dengan baik. Gunakan bersama-sama demi kemajuan kelompok, bukan untuk ketua saja," tegas Evi Yandri.

Adapun lima kelompok tani di Kecamatan Kuranji yang menerima bantuan bentor tersebut meliputi Kelompok Tani Lapau Munggu, Tuah Sakato, Serba Usaha, KWT Mekar Jaya, dan Sumua Gadang.

Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar Afniwirman menyatakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah membuat dukungan dana Pokir dewan sangat krusial dalam merealisasikan bantuan fisik bagi masyarakat.

"Masyarakat tidak bisa sejahtera hanya lewat sosialisasi. Tanpa dukungan dana Pokir dari anggota dewan, program kami tidak akan berjalan maksimal," ujar Afniwirman.

Ia berharap efisiensi biaya angkut yang didapat dari penggunaan bentor ini dapat langsung memangkas pengeluaran operasional. Dengan begitu, margin keuntungan yang diperoleh keluarga petani bisa meningkat lebih optimal. (fai)

NEWS

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KORAN



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman menyerahkan secara simbolis bantuan becak motor kepada perwakilan kelompok tani di Padang.

NEWS

**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
		10

Perkuat Reformasi Hukum di Sumbar

Padang, Rakyat Sumbar — Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 menjadi momentum bagi Kementerian Hukum untuk meneguhkan kembali komitmennya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat, cepat, dan mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Semangat tersebut juga tercermin dari berbagai capaian pemerintah daerah di Sumatera Barat dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pelaksanaan reformasi hukum.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya pada Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Jakarta. Sambutan tersebut dibacakan oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, dalam upacara peringatan yang digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Rabu (19/8).

Menteri Hukum menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja Kementerian/Lembaga yang selama ini turut mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum. Menurutnya, sinergi, kolaborasi, dan komitmen yang dibangun bersama merupakan modal penting untuk mewujudkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Peringatan Hari Pengayoman, lanjutnya, bukan sekadar momentum untuk mengenang perjalanan sebuah institusi, tetapi juga menjadi saat untuk kembali menjawab pertanyaan mendasar: untuk siapa Kementerian Hukum bekerja?

"Untuk siapa kita bekerja? Dan jawabannya jelas. Kita bekerja untuk



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman saat menyerahkan Betor kepada kelompok tani.

nan dan seluruh kerja pemerintah-an pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan rakyat. Bagi Kementerian Hukum, hal tersebut harus diwujudkan melalui pelayanan yang memberikan kepastian, perlindungan, sekaligus solusi atas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Menteri Hukum menegaskan bahwa hukum tidak boleh terasa jauh dari masyarakat dan tidak boleh berhenti sebagai kumpulan peraturan. Hukum harus hadir untuk menjawab persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.

Semangat itu kemudian diwujudkan melalui budaya kerja "PASTI Ada Solusi". Menurut Menteri Hukum, PASTI Ada Solusi tidak boleh berhenti sebagai slogan atau program, melainkan harus menjadi budaya kerja seluruh jajaran Ke-

kerja yang lebih sederhana, cepat, efektif, serta mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Hukum didorong menjadi organisasi yang semakin sederhana dalam proses, cepat dalam mengambil keputusan, kuat di wilayah, dan mudah diakses masyarakat. Pemanfaatan teknologi harus terus dioptimalkan untuk mempercepat pelayanan, sementara data digunakan sebagai dasar dalam menghasilkan keputusan yang lebih tepat.

Kewenangan juga perlu ditempatkan sedekat mungkin dengan masyarakat sepanjang dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel. Sebab, masyarakat tidak berkepentingan dengan rumitnya struktur organisasi pemerintah. Yang mereka butuhkan adalah kepastian apakah persoalan yang di-

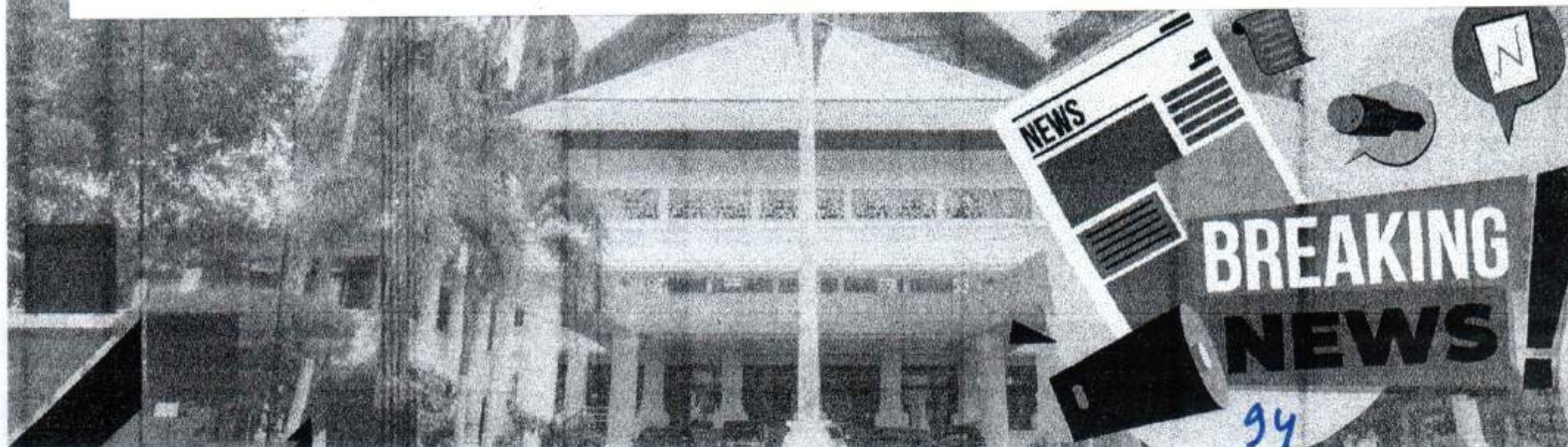
memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat.

Pada momentum yang sama, Menteri Hukum turut menyampaikan rasa prihatin dan solidaritas kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi bencana.

"Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Kementerian Hukum, saya menyampaikan rasa prihatin dan solidaritas yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak," ujarnya.

Ia berharap seluruh masyarakat yang terdampak bencana diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi kondisi tersebut.

Menutup sambutannya, Menteri Hukum kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak akan mengingat berapa banyak dokumen yang dihasilkan pemerintah, melainkan





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG KAMIS, 20 AGUSTUS 2026		4

Rafdinal Dorong Keterampilan Menjahit bagi Kaum Ibu di Bukittinggi

BUKITTINGGI, KP - Anggota DPRD Sumbar, Rafdinal menggelar pelatihan menjahit pakaian wanita dewasa bagi 16 perempuan di Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), Kota Bukittinggi. Kegiatan yang memanfaatkan dana pokok-pokok pikiran (pokir) senilai Rp325 juta itu bertujuan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi perempuan.

Program bertajuk Pelatihan Kerja Klaster Kompetensi Garment Apparel selama 240 Jam Pelajaran (JP) ini digarap bersama Balai Latihan Kerja (BLK) Payakumbuh. Selama satu bulan penuh, para peserta yang didominasi ibu rumah tangga usia produktif digembleng mulai dari teknik dasar hingga mahir membuat pakaian wanita.

Penutupan pelatihan berlangsung di Kelurahan Aur Kuning, Rabu (19/8), dihadiri Lurah Aur Kuning Suhendra, Kasi Pemerintahan Kecamatan ABTB Reza, Kepala BLK Payakumbuh Satria Edi, serta jajaran Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan Kota Bukittinggi.

Rafdinal menegaskan, pembekalan ilmu menjahit ini bertujuan agar kaum perempuan mampu membuka usaha mandiri demi menopang ekonomi keluarga. Kendati demikian, ia menyoroti kendala utama yang kerap dihadapi lulusan pelatihan, yakni ketiadaan bantuan modal alat seperti mesin jahit.

"Yang menjadi kendala saat ini adalah mereka tidak diberikan alat atau mesin jahit. Padahal, mesin jahit merupakan kebutuhan utama untuk mengembangkan keterampilan ini. Kalau tidak dilengkapi, tentu akan sedikit sulit bagi mereka untuk berkembang," kata Rafdinal.

Meski regulasi pelatihan BLK tidak memuat alokasi bantuan alat, legislator Sumbar tersebut berjanji bakal berkoordinasi lintas dinas untuk memperjuangkan bantuan mesin jahit.

Selain pelatihan menjahit, alokasi dana pokir Rp325 juta milik Rafdinal tahun ini juga menyasar pelatihan servis telepon seluler dan program kewirausahaan bagi masyarakat. (fai)



ANGGOTA DPRD Sumbar Rafdinal memberikan arahan saat penutupan Pelatihan Menjahit Pakaian Wanita Dewasa di Kelurahan Aur Kuning, Bukittinggi.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	KAMIS, 20 AGUSTUS 2026	6

Tak Sekadar Raih Penghargaan, JDIH DPRD Sumbar Permudah Masyarakat Akses Produk Hukum

PENGHARGAAN Peringkat IV Terbaik Nasional kategori Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi menjadi bukti keseriusan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) membuka akses informasi hukum kepada masyarakat. Capaian tersebut menempatkan DPRD Sumbar sebagai satu-satunya lembaga legislatif di Sumbar yang meraih penghargaan JDIH Nasional 2026.

Penghargaan yang diterima Ketua DPRD Sumbar Muhidi dalam rangkaian Hari Pengayoman ke-81, Rabu (19/8), mencerminkan upaya DPRD Sumbar menata dan menyajikan informasi hukum agar mudah ditemukan dan dimanfaatkan masyarakat.

Melalui JDIH, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen terkait kerja DPRD, mulai dari Peraturan Daerah (Perda), Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), keputusan DPRD dan pimpinan DPRD, naskah akademik, hingga noutulen dan risalah rapat. Dokumentasi proses pembentukan Perda juga menjadi bagian dari informasi yang dikelola.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. "Yang paling penting dari penghargaan ini adalah bagaimana JDIH benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Muhidi.

Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan produk hukum dan proses pembentukannya dapat diketahui publik. Karena itu, pengelolaan informasi hukum harus terus dikembangkan mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. "Informasi hukum harus semakin mudah diakses. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas me

ngenai berbagai produk hukum maupun proses yang dilakukan DPRD," ujarnya.

Muhidi menegaskan, penghargaan tersebut bukan tujuan akhir. DPRD Sumbar akan terus membenahi pengelolaan JDIH, termasuk memperkuat digitalisasi agar informasi hukum semakin mudah dijangkau masyarakat.

"Penghargaan ini bukan akhir, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan, memperkuat digitalisasi, dan membuat informasi hukum semakin mudah dijangkau masyarakat," tuturnya.

Penilaian JDIH tidak hanya didasarkan pada ketersediaan dokumen, tetapi juga inovasi dan statistik pengunjung website. Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan informasi yang tersedia benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan publik.

Sementara itu, Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar Alpius Sarumaha menekankan, pengelolaan informasi dan pelayanan hukum harus bermuara pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pelayanan pemerintahan tidak hanya diukur dari tertibnya administrasi, tetapi juga manfaat yang dirasakan masyarakat. "Hukum tidak boleh terasa jauh dari masyarakat. Hukum harus memberikan kepastian, perlindungan, dan menghadirkan solusi," katanya.

Karena itu, semangat pengayoman harus diwujudkan melalui pelayanan yang nyata dan tidak berbelit. "Pengayoman memiliki makna yang besar. Mengayomi tidak boleh berhenti pada rasa prihatin. Harus bergerak dengan kerja nyata, bukan sekadar seremoni dan slogan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya.

Penghargaan tersebut memperkuat peran JDIH DPRD Sumbar sebagai instrumen transparansi dan keterbukaan informasi hukum bagi masyarakat. (*)

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi menerima Piagam Penghargaan Peringkat IV Terbaik Nasional kategori Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi yang diserahkan Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Alpius Sarumaha, dalam rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81, Rabu (19/8).





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
	Rakyat Sumbar KAMIS, 20 AGUSTUS 2026	9

DPRD Sumbar Tetapkan Rancangan KUA-PPAS

Padang, Rakyat Sumbar — DPRD Provinsi Sumbar menetapkan Rancangan KUA-PPAS 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026. Rancangan tersebut menjadi pedoman terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Keputusan DPRD tersebut diberi nomor, yakni Nomor :13/SB/Tahun 2026 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan KUA Tahun 2027 untuk ditetapkan menjadi KUA Tahun 2027.

Nomor :14/SB/ Tahun 2026 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan PPAS Tahun 2027 untuk ditetapkan menjadi PPAS Tahun 2027.

Nomor : 11/SB/Tahun 2026 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan KUA Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Perubahan KUA Tahun 2026.

Nomor : 12/SB/ Tahun 2026 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Perubahan PPAS Tahun 2026.

"KUA-PPAS Tahun 2027 dan Perubahan KUA-PPAS tahun 2026 yang telah disepakati, menjadi pedoman OPD dalam penyusunan RKA 2027 dan Perubahan RKA 2026 dan menjadi pedoman pula dalam penyusunan Ranperda APBD 2027 dan Ranperda Perubahan APBD 2026," kata Ketua DPRD Sumbar Muhidi, saat memimpin rapat paripurna di ruang sidang utama, Jumat, (14/8) malam.

Ia menambahkan, sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan OPD untuk memedomani kebijakan anggaran yang

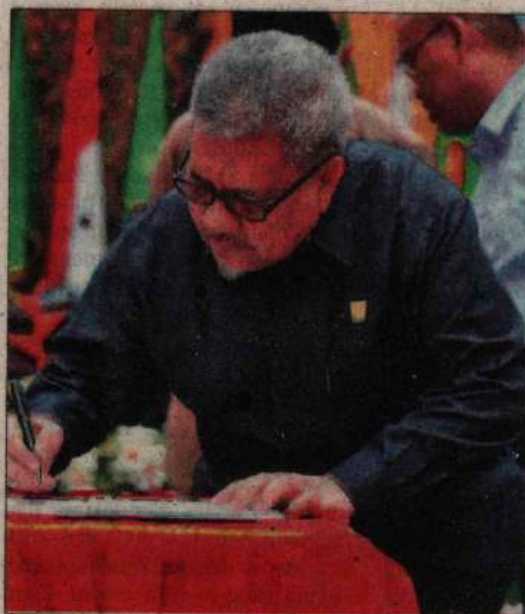


KETUA DPRD Sumbar Muhidi didampingi para wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, M. Iqra Chissa Putra, Nanda Satria, Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Sekdaprov Arry Yuswandi, berfoto bersama saat rapat penetapan Rancangan KUA-PPAS 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 pada ruang sidang utama, Jumat, (14/8) malam.

telah disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2027 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026 termasuk dalam penetapan target kinerja program dan kegiatan.

Ia menyebutkan, mengacu kepada materi muatan KUA-PPAS yang ditetapkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, fokus pembahasan, diarahkan pada asumsi makro ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

"Yang akan ditampung dan disepakati dalam KUA-PPAS Tahun 2027 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026 yang sejalan dengan program prioritas RPJMD, potensi dan kemampuan keuangan daerah serta penyelesaiannya dengan target base line yang ditetapkan," pungkasnya. (*)



KETUA DPRD Sumbar Muhidi saat menandatangani kesepakatan bersama penetapan Rancangan KUA-PPAS 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 pada ruang sidang utama, Jumat, (14/8) malam.

BREAKING NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN

N



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, saat menandatangani kesepakatan bersama penetapan Rancangan KUA-PPAS 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 pada ruang sidang utama, Jumat, (14/8) malam.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra, saat menandatangani kesepakatan bersama penetapan Rancangan KUA-PPAS 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 pada ruang sidang utama, Jumat, (14/8) malam.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria saat menandatangani kesepakatan bersama penetapan Rancangan KUA-PPAS 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 pada ruang sidang utama, Jumat, (14/8) malam.



GOVERNUR Sumbar Mahyeldi saat menandatangani kesepakatan bersama penetapan Rancangan KUA-PPAS 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 pada ruang sidang utama, Jumat, (14/8) malam.

NEWS

**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	KAMIS, 20 AGUSTUS 2026	2

Masuk Lima Besar Nasional

JDIH DPRD Sumbar Didorong Makin Dekat dengan Masyarakat

PADANG, METRO

Prestasi DPRD Sumatra Barat dalam pengelolaan informasi hukum mendapat pengakuan di tingkat nasional. Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), DPRD Sumbar meraih peringkat IV terbaik nasional kategori DPRD Provinsi pada ajang JDIH Nasional 2026.

Capaian tersebut sekaligus menempatkan DPRD Sumbar sebagai satu-satunya DPRD di Sumbar yang memperoleh penghargaan pada ajang tersebut. Penghargaan diterima langsung Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dalam rangkaian Hari Pengayoman ke-81, Rabu (19/8).

Bagi DPRD Sumbar, penghargaan tersebut bukan semata-mata tentang posisi dalam pemeringkatan. Capaian itu menjadi gambaran atas upaya lembaga dalam mengelola berbagai dokumen hukum dan menyajikannya sebagai in-

formasi yang dapat diakses masyarakat.

Penilaian JDIH mencakup sejumlah aspek, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, penataan hingga penyebarluasan dokumen produk hukum DPRD yang diunggah melalui website JDIH DPRD Sumbar.

Dokumen yang menjadi bagian dari penilaian antara lain Peraturan Daerah, rancangan peraturan daerah (Ranperda), Surat Keputusan (SK) DPRD, SK Pimpinan DPRD, SK Sekretaris DPRD, naskah akademik, nótulen rapat, risalah rapat, serta buku perpustakaan.

Selain kelengkapan dokumen, dokumentasi proses pembahasan Peraturan Daerah juga menjadi bagian yang dinilai. Aspek inovasi dalam pengelolaan JDIH serta statistik pengunjung website turut menjadi indikator penilaian.

Dengan cakupan tersebut, pengelolaan JDIH tidak hanya berkaitan dengan

penyimpanan dokumen hukum. Lebih dari itu, bagaimana berbagai informasi tersebut ditata dan disebarluaskan sehingga dapat ditemukan, dipahami, serta dimanfaatkan oleh masyarakat.

Melalui JDIH DPRD Sumbar, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislatif. Informasi tersebut mencakup produk hukum sekaligus dokumentasi proses pembentukan peraturan yang dilakukan DPRD.

Muhidi mengatakan, penghargaan tersebut harus menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki pelayanan informasi publik, terutama informasi yang berkaitan dengan hukum dan kerja DPRD.

"Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana keberadaan JDIH memberikan

manfaat dan kemudahan bagi masyarakat," kata Muhidi.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui produk hukum maupun proses pembentukannya. Karena itu, informasi tersebut harus disajikan secara terbuka, jelas, dan mudah ditemukan.

"Informasi hukum harus semakin mudah diakses. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai berbagai produk hukum maupun proses yang dilakukan DPRD," ujarnya.

Muhidi menegaskan, capaian di tingkat nasional tersebut tidak boleh membuat DPRD Sumbar berhenti melakukan pembenahan. Pengembangan JDIH akan terus diarahkan pada pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi hukum dengan lebih cepat dan praktis.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Kamis, 20 Agustus 2026 (6 Rabiul Awal 1448 H)	4

SERAP ASPIRASI MASYARAKAT

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Serahkan Ban- tuan Becak Motor

Lima kelompok tani di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, menerima bantuan becak motor (betor) yang bersumber dari dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman.

Bantuan tersebut diserahkan secara resmi oleh Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar pada Selasa (18/8). Penyerahan yang berlangsung di ruang rapat dinas terkait ini juga dirangkaikan dengan agenda sosialisasi.

Evi Yandri Rajo Budiman menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata realisasi aspirasi masyarakat yang ia serap selama masa reses.

"Ini adalah bentuk penyerapan aspirasi warga saat reses. Dana pokir memang kami prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Evi Yandri.

Menurut Evi, program berbasis aspirasi ini dapat berjalan berkat sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif. Ia menilai sektor pertanian di Sumbar saat ini membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam menghadapi tantangan regenerasi petani. Terlebih, ketahanan pangan merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus diselaraskan oleh pemerintah daerah.

"Sektor pertanian butuh

perhatian besar karena mayoritas petani kita sudah berumur. Jika tidak ada regenerasi dalam 10 tahun ke depan, kita bisa terancam bergantung pada impor. Pendapatan petani harus ditingkatkan agar sektor ini kembali dilirik sebagai profesi yang menjanjikan," urai Evi.

Evi juga mengingatkan agar bantuan betor ini digunakan secara komunal untuk kepentingan seluruh anggota kelompok, bukan untuk kepentingan pribadi pengurus.

"Tolong rawat dan jaga barang bantuan ini dengan baik. Gunakan bersama-sama demi kemajuan kelompok, bukan untuk ketua saja," tegasnya.

Adapun lima kelompok tani penerima bantuan tersebut adalah Lapau Munggu, Tuah Sakato, Serba Usaha, KWT Mekar Jaya, dan Sumua Gadang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman, mengapresiasi kolaborasi konkret ini. Ia mengakui

keterbatasan anggaran dinas dalam menyejahterakan petani tanpa adanya dukungan dari legislatif.

"Masyarakat tidak bisa sejahtera hanya lewat sosialisasi. Tanpa dukungan dana pokir dari anggota dewan, program kami tidak akan berjalan maksimal. Kolaborasi inilah yang membuat petani bisa langsung menerima asas manfaat," tutur Afniwirman.

Afniwirman menambahkan, bantuan betor ini dirancang untuk menekan biaya opera-

sional sekaligus memudahkan petani mengangkut hasil panen ke pasar guna meningkatkan pendapatan keluarga. Namun, ia mengingatkan agar kelompok tani merawat aset tersebut karena masih banyak kelompok tani lain yang mengantre untuk mendapatkan giliran bantuan.

"Kami ingin membantu, tetapi petani juga harus berkomitmen merawat bantuan ini. Jangan sampai cepat rusak karena kurang pemeliharaan," pungkasnya. (*)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Kamis, 20 Agustus 2026 (6 Rabiul Awal 1448 H)	8

DPRD Sumbar Raih Penghargaan JDIH Nasional Tahun 2026

PADANG - SINGGALANG

DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengukir prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional 2026, DPRD Sumbar sukses mengamankan peringkat keempat terbaik untuk kategori DPRD Provinsi.

Pencapaian ini sekaligus mengukuhkan posisi mereka sebagai satu-satunya lembaga legislatif dari ranah Minang yang memboyong penghargaan tersebut.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menerima langsung penghargaan tersebut pada perayaan Hari Pengayoman ke-81 di Padang, Rabu (19/8). Prestasi ini menjadi buah dari konsistensi pengelolaan data dan keterbukaan informasi sepanjang tahun 2025.

Tim penilai nasional tidak hanya mengecek kelengkapan dokumen hukum, tetapi juga mengukur efektivitas digita-

lisasi, inovasi sistem, jumlah kunjungan situs web, hingga kemudahan akses bagi publik.

Melalui laman JDIH, masyarakat kini bisa memantau produk hukum daerah mulai dari peraturan daerah (perda), rancangan perda, keputusan pimpinan, naskah akademik, hingga risalah rapat.

Muhidi menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar pajangan, melainkan pemantik untuk terus bertransformasi.

"Ini kebanggaan bersama. Namun, esensi utamanya adalah bagaimana JDIH benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Akses informasi hukum harus semakin transparan dan mudah dijangkau," ujar Muhidi se usai menerima penghargaan.

Senada dengan hal itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumbar, Alpius Sarumaha, mengingatkan pentingnya memangkas sekat birokrasi demi pelayanan publik.

Ia menekankan bahwa reformasi hukum harus berorientasi pada solusi masyarakat, bukan sekadar urusan administratif.

"Kita bekerja untuk rakyat. Jadi, saat masyarakat datang

membawa masalah, jangan kita tambah dengan persoalan baru yang berbelit-belit. Semangat pengayoman itu harus mewujudkan dalam kerja nyata, bukan slogan semata," kata Alpius. (401)



TERIMA PENGHARGAAN - Ketua DPRD Sumbar Muhidi menerima penghargaan JDIH Nasional 2026 peringkat IV kategori DPRD Provinsi dari Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar Alpius Sarumaha pada peringatan Hari Pengayoman ke-81 di Padang, Rabu (19/8). (1st)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 20 AGUSTUS 2026	2

Ketua DPRD Sumbar Serap Aspirasi Warga Lubuk Minturun

PADANG, HALUAN— Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi memanfaatkan masa reses untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Dalam kunjungannya ke Musala Darussalam, Kelurahan Lubuk Minturun, Selasa (18/8), berbagai persoalan masyarakat menjadi bahan dialog, mulai dari pendidikan, pengelolaan APBD hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Muhidi mengatakan, reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Aspirasi tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran daerah.

Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis dalam menentukan arah penggunaan anggaran daerah bersama kepala daerah. Pemerintah daerah tidak dapat menggunakan APBD begitu saja tanpa melalui proses pembahasan dan persetujuan DPRD.

"APBD itu bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas pembangunan," ujar Muhidi.

Ia menyebutkan, dinamika dunia yang terus berubah berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi daerah. Karena itu, Sumbar harus menyiapkan masyarakat yang mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan.

Salah satu sektor yang dinilai penting untuk diperkuat adalah pendidikan. Penguatan pendidikan, kata Muhidi, tidak hanya menyangkut peserta didik, tetapi juga kepala sekolah

dan guru sebagai garda terdepan dalam mencetak generasi masa depan.

"Dunia hari ini terus berubah. Karena itu, pendidikan harus kita perkuat. Mulai dari kepala sekolah, guru, sampai anak-anak sekolah harus dipersiapkan agar mampu menghadapi tantangan ke depan," katanya.

Selain pendidikan, Muhidi juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Menurutnya, pelaku usaha tidak cukup hanya memiliki kemauan untuk berusaha, tetapi juga perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan agar mampu mengembangkan usaha.

"Kita harus masuk dengan bimbingan dan pelatihan. UMKM harus kita dorong agar usahanya berkembang lebih baik, mampu membaca peluang dan tidak berhenti pada usaha yang berjalan seadanya," ungkapnya.

Muhidi juga mengajak masyarakat membangun budaya belajar dan tidak ragu mengambil pengalaman dari orang

lain yang telah lebih dahulu berhasil.

Menurutnya, keberhasilan tidak hanya ditentukan modal, tetapi juga kemauan untuk belajar, membangun jaringan, dan berada di lingkungan yang mampu memberikan motivasi positif.

"Kalau ingin sukses, carilah kawan yang sudah sukses. Bukan untuk sekadar ikut menikmati keberhasilannya, tetapi untuk belajar bagaimana mereka bisa sampai di titik itu. Dari sana kita bisa mendapatkan pengalaman sekaligus motivasi," tuturnya.

Ia berharap kegiatan reses tidak berhenti sebagai forum penyampaian aspirasi, tetapi menjadi awal dari upaya bersama dalam mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

Muhidi menekankan, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Dengan komunikasi yang kuat serta aspirasi yang disampaikan secara langsung, kebijakan yang dihasilkan diharapkan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (h/len)



Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi memanfaatkan masa reses untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat di Lubuk Minturun, Kota Padang. IST

ING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 20 AGUSTUS 2026 /	4

TINGKATKAN EKONOMI KELUARGA

Rafdinal Bekali Peremp- puan Aur Kuning Kete- rampilan Menjahit

BUKITTINGGI, HALUAN — Anggota DP-
RD Provinsi Sumatera Barat dari Komisi
III, Rafdinal alokasikan pokok pikiran (pokir)
melalui kegiatan pelatihan menjahit bagi
kaum perempuan di Kelurahan Aur Kuning,
Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB),
Kota Bukittinggi.

Pelatihan menjahit pakaian
wanita dewasa tersebut diikuti
16 peserta dan berlangsung
selama satu bulan. Para peserta
mendapatkan pelatihan mulai
dari dasar-dasar menjahit hing-
ga keterampilan membuat
pakaian wanita dewasa.

Kegiatan tersebut meru-
pakan Pelatihan Kerja berda-
sarkan Klaster Kompetensi
Kejuruan Garment Apparel
dengan total 240 jam pelajaran
(JP). Pelatihan dilaksanakan oleh
Balai Pelatihan Kerja (BLK)
Payakumbuh, Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Pro-
vinsi Sumatera Barat melalui
Tahun Anggaran 2026.

Penutupan pelatihan dilak-
sanakan di Kelurahan Aur
Kuning, Rabu (19/8). Kegiatan
tersebut dihadiri Rafdinal, unsur
pemerintahan kecamatan dan
kelurahan, serta jajaran Dinas
Koperasi, UKM dan Kete-
nagakerjaan Kota Bukittinggi
dan BLK Payakumbuh.

Hadir dalam kegiatan ter-
sebut Lurah Aur Kuning Su-
hendra, Camat ABTB yang

diwakili Kasi Pemerintahan
Reza, Pengantar Kerja Fung-
sional Dinas Koperasi, UKM
dan Ketenagakerjaan Kota
Bukittinggi Maizar, Kepala
BLK Payakumbuh Satria Edi,
serta M. Ikhsan dari Tata Usaha
BLK Payakumbuh.

Dalam sambutannya, Rafdi-
nal mengatakan, pelatihan
tersebut diharapkan tidak
berhenti pada pemberian kete-
rampilan, tetapi menjadi modal
bagi peserta untuk mening-
katkan pendapatan dan pere-
konomian keluarga.

"Setelah mengikuti pelatihan
ini tentu pengalaman dan kete-
rampilan mereka bertambah.
Sebanyak 16 peserta ini diha-
rapkan bisa memanfaatkan
ilmu yang didapat untuk me-
nambah pendapatan dan me-
ningkatkan ekonomi keluarga,"
ujar Rafdinal.

Menurutnya, sebagian besar
peserta masih berada pada usia
produktif. Bahkan, peserta
dengan usia tertinggi sekitar 40
tahun. Kondisi tersebut dinilai
menjadi modal untuk me-

ngembangkan keterampilan
menjahit menjadi usaha man-
diri.

Karena itu, Rafdinal ber-
harap pemerintah daerah,
kecamatan, maupun kelurahan
turut memantau keberlanjutan
usaha para peserta setelah
pelatihan berakhir.

"Pelatihan ini berada di
bawah Dinas Ketenagakerjaan
melalui BLK, dan tugas pela-
tihan sampai di sini sudah
selesai. Namun, kita berharap
pemerintah daerah, kecamatan
maupun kelurahan tetap mel-
akukan pemantauan terhadap
perkembangan usaha mereka,"
katanya.

Di sisi lain, Rafdinal me-
nyoroti kendala yang mungkin
dihadapi peserta setelah menye-
lesaikan pelatihan, terutama
terkait ketersediaan mesin dan
peralatan menjahit.

Menurutnya, keterampilan
yang telah diperoleh akan sulit
dikembangkan secara optimal
apabila peserta tidak memiliki
peralatan yang memadai untuk
memulai usaha.

"Yang menjadi kendala saat
ini adalah mereka tidak dibe-
rikan alat atau mesin jahit.
Padahal, mesin jahit merupakan
kebutuhan utama untuk me-
ngembangkan keterampilan ini.
Kalau tidak dilengkapi, tentu
akan sedikit sulit bagi mereka
untuk berkembang. Paling tidak

DIKIRING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



BEKALI PEREMPUAN— Anggota DPRD Komisi III DPRD Sumbar, Rafdinal mengalokasikan pokok pikiran (pokir) melalui kegiatan pelatihan menjahit bagi kaum perempuan di Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), Kota Bukittinggi. IST

mereka hanya bisa menerima jahitan dari orang lain,” jelasnya.

Rafdinal berharap para peserta tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan tersebut menjadi usaha yang menghasilkan produk dan pendapatan.

Terkait bantuan peralatan, Rafdinal mengakui bahwa secara regulasi kegiatan pelatihan tersebut memang tidak menyediakan mesin jahit bagi peserta. Meski demikian, ia

akan berupaya mencari alternatif melalui koordinasi dengan pihak dan dinas terkait.

“Secara regulasi memang tidak diberikan alat. Namun, nanti akan kita coba dengan cara lain yang memungkinkan. Kita akan mencari informasi dan mudah-mudahan ada dinas terkait lainnya yang bisa memberikan bantuan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rafdinal menyebutkan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 terdapat tiga kegiatan yang disalurkan melalui

dana pokir.

Selain pelatihan menjahit, program tersebut mencakup pelatihan servis telepon seluler (handphone) dan satu kegiatan lainnya di bidang kewirausahaan.

“Di tahun 2026 ini ada tiga kegiatan yang kita salurkan melalui dana pokir. Salah satunya pelatihan menjahit, kemudian servis handphone dan satu lagi kegiatan kewirausahaan. Untuk tiga kegiatan tersebut, total dana pokir sekitar Rp325 juta,” pungkas Rafdinal. (h/len)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	KAMIS, 20 AGUSTUS 2026 /	6

SATU-SATUNYA DI SUMBAR

JDIH DPRD Sumbar Raih Peringkat IV

Nasional

PADANG, HALUAN — Prestasi DPRD Sumatera Barat dalam pengelolaan informasi hukum mendapat pengakuan di tingkat nasional. Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), DPRD Sumbar meraih peringkat IV terbaik nasional kategori DPRD Provinsi pada ajang JDIH Nasional 2026.

Capaian tersebut sekaligus menempatkan DPRD Sumbar sebagai satu-satunya DPRD di Sumatera Barat yang memperoleh penghargaan pada ajang tersebut. Penghargaan diterima langsung Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dalam rangkaian Hari Pengayoman ke-81 yang digelar di Hall Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumbar,

Rabu (19/8).

Bagi DPRD Sumbar, penghargaan tersebut bukan semata-mata tentang posisi dalam pemeringkatan. Capaian itu menjadi gambaran atas upaya lembaga dalam mengelola berbagai dokumen hukum dan menyajikannya sebagai informasi yang dapat diakses masyarakat.

Penilaian JDIH mencakup

jumlah aspek, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, penataan hingga penyebaran dokumen produk hukum DPRD yang diunggah melalui website JDIH DPRD Sumbar.

Dokumen yang menjadi bagian dari penilaian antara lain Peraturan Daerah, rancangan peraturan daerah (Ranperda), Surat Keputusan (SK) DPRD, SK Pimpinan DPRD, SK Sekretaris DPRD, naskah akademik, notulen rapat, risalah rapat, serta buku perpustakaan.

Selain kelengkapan dokumen, dokumentasi proses pembahasan Peraturan Daerah juga menjadi bagian yang dinilai. Aspek inovasi dalam pengelolaan JDIH serta statistik

pengunjung website turut menjadi indikator penilaian.

Dengan cakupan tersebut, pengelolaan JDIH tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dokumen hukum. Lebih dari itu, bagaimana berbagai informasi tersebut ditata dan disebarluaskan sehingga dapat ditemukan, dipahami, serta dimanfaatkan oleh masyarakat.

Melalui JDIH DPRD Sumbar, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislatif. Informasi tersebut mencakup produk hukum sekaligus dokumentasi proses pembentukan peraturan yang dilakukan DPRD.

Muhidi mengatakan, penghargaan tersebut harus menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki pelayanan informasi publik, terutama informasi yang berkaitan dengan hukum dan kerja DPRD.

"Penghargaan ini tentu

menjadi kebanggaan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana keberadaan JDIH memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat," kata Muhidi.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui produk hukum maupun proses pembentukannya. Karena itu, informasi tersebut harus disajikan secara terbuka, jelas, dan mudah ditemukan.

"Informasi hukum harus semakin mudah diakses. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai berbagai produk hukum maupun proses yang dilakukan DPRD," ujarnya.

Muhidi menegaskan, capaian di tingkat nasional tersebut tidak boleh membuat DPRD Sumbar berhenti melakukan pembenahan. Pengembangan JDIH akan terus diarahkan pada pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sehingga masyarakat dapat mem-

peroleh informasi hukum dengan lebih cepat dan praktis.

"Penghargaan ini bukan akhir. Justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan, memperkuat digitalisasi, dan membuat informasi hukum semakin mudah dijangkau masyarakat," tuturnya.

Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, mengatakan pelayanan hukum pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pelayanan bukan hanya terletak pada tertibnya administrasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dan lembaga pelayanan menghadirkan solusi bagi masyarakat.

"Hukum tidak boleh terasa jauh dari masyarakat. Hukum harus memberikan kepastian, perlindungan dan menghadirkan solusi," katanya.

Ia menilai semangat pengayoman harus diterjemahkan

MAKING
NEWS!

102



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

melalui pelayanan yang responsif dan tidak mempersulit masyarakat. Setiap persoalan yang dibawa masyarakat seharusnya mendapat jalan keluar, bukan justru menimbulkan persoalan baru akibat proses birokrasi yang berbelit.

"Pengayoman memiliki makna yang besar. Mengayomi tidak boleh berhenti pada rasa prihatin. Harus bergerak dengan kerja nyata, bukan sekadar seremoni dan slogan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya.

Penghargaan JDIH Nasional 2026 tersebut menjadi dorongan bagi DPRD Sumbar untuk terus memperkuat keterbukaan informasi hukum. JDIH diharapkan tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan dokumen, tetapi berkembang sebagai sarana bagi masyarakat untuk memahami produk hukum dan mengikuti proses kerja lembaga legislatif secara lebih terbuka. (*)



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi saat menerima penghargaan untuk JDIH DPRD Sumbar



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi (kiri) saat menerima penghargaan untuk JDIH DPRD Sumbar dari Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, Alpius Sarumaha (kanan)





KORA	ANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar JUMAT, 21 AGUSTUS 2026		9

Masyarakat harus Manfaatkan Program Pembangunan

Laporan
HANDI YANUAR

Harian Rakyat Sumbar

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengatakan masyarakat supaya lebih aktif memanfaatkan berbagai program pembangunan seperti penguatan ekonomi, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur.

"SETIAP tahun ada rembuk RW, kelurahan, kecamatan sampai kota dan provinsi. Ini harus dimanfaatkan

secara maksimal untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat, baik pengembangan ekonomi, pendidikan maupun pembangunan fisik," kata Muhidi, saat reses di Masjid An Nur Jati Rawang, Kelurahan Jati, Padang, Rabu (19/8).

Ia menyebut Kelurahan Jati selama ini telah menjadi salah satu kawasan yang ikut mendapatkan perhatian melalui berbagai program, termasuk pelatihan bagi pelaku UMKM serta dukungan terhadap pembangunan infrastruktur.

Ia mengatakan, pembangunan jalan di RW 1 juga telah masuk da-

lam perencanaan setelah dilakukan survei. Pekerjaan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada bulan mendatang.

"Alhamdulillah, beberapa aspirasi masyarakat sudah kita tindak lanjuti. Untuk pembangunan jalan di RW 1 sudah dilakukan survei dan masuk dalam perencanaan, insyaallah bulan depan mulai dilaksanakan," kata Muhidi.

Selain infrastruktur, Muhidi juga menyampaikan adanya dukungan melalui bantuan hibah untuk masjid serta berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat ha-

rus memanfaatkan momentum rembuk RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota dan provinsi sebagai ruang menyampaikan kebutuhan secara terukur.

Namun, Muhidi menegaskan bahwa berbagai program pemerintah akan berjalan maksimal jika dibarengi kemauan dan partisipasi masyarakat.

"Yang paling penting tentu ada kemauan. Pemerintah bisa membuka peluang dan memberikan dukungan, tetapi masyarakat juga harus memiliki semangat untuk berkembang dan memanfaatkan peluang tersebut," pungkasnya.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, saat reses di Masjid An Nur Jati Rawang, Kelurahan Jati, Rabu (19/8).

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar JUMAT, 21 AGUSTUS 2026		10

JDIH DPRD Sumbar Lima Besar Nasional

Padang, Rakyat Sumbar — Prestasi DPRD Sumatera Barat dalam pengelolaan informasi hukum mendapat pengakuan di tingkat nasional. Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), DPRD Sumbar meraih peringkat IV terbaik nasional kategori DPRD Provinsi pada ajang JDIH Nasional 2026.

Capaian tersebut sekaligus menempatkan DPRD Sumbar sebagai satu-satunya DPRD di Sumatera Barat yang memperoleh penghargaan pada ajang tersebut. Penghargaan diterima langsung Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dalam rangkaian Hari Pengayoman ke-81, Rabu (19/8).

Penghargaan tersebut bukan semata-mata tentang posisi dalam pemeringkatan. Capaian itu menjadi gambaran atas upaya lembaga dalam mengelola berbagai dokumen hukum dan menyajikannya sebagai informasi yang dapat diakses masyarakat.

Penilaian JDIH mencakup sejumlah aspek, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, penataan hingga penyebarluasan dokumen produk hukum DPRD yang diunggah melalui website JDIH DPRD Sumbar.

Dokumen yang menjadi bagian dari penilaian antara lain Peraturan Daerah, rancangan peraturan daerah (Ranperda), Surat Keputusan (SK) DPRD, SK Pimpinan DPRD, SK Sekretaris DPRD, naskah akademik, notulen rapat, risalah rapat, serta buku perpustakaan.

Selain kelengkapan dokumen, dokumentasi proses pembahasan Peraturan Daerah juga menjadi bagian yang dinilai. Aspek inovasi dalam pengelolaan JDIH serta statistik pengunjung website turut menjadi indikator penilaian.

Dengan cakupan tersebut, pengelolaan JDIH tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dokumen hukum. Lebih dari itu, bagaimana berbagai informasi tersebut ditata dan disebarluaskan sehingga dapat ditemukan, dipahami, serta dimanfaatkan oleh masyarakat.

Melalui JDIH DPRD Sumbar, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang berkaitan

pelayanan informasi publik, terutama informasi yang berkaitan dengan hukum dan kerja DPRD.

"Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana keberadaan JDIH memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat," kata Muhidi.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui produk hukum maupun proses pembentukannya. Karena itu, informasi tersebut harus disajikan secara terbuka, jelas, dan mudah ditemukan.

"Informasi hukum harus semakin mudah diakses. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai berbagai produk hukum maupun proses yang dilakukan DPRD," ujarnya.

Muhidi menegaskan, capaian di tingkat nasional tersebut tidak boleh membuat DPRD Sumbar berhenti melakukan pembenahan. Pengembangan JDIH akan terus diarahkan pada pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi hukum dengan lebih cepat dan praktis.

"Penghargaan ini bukan akhir. Justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan, memperkuat digitalisasi, dan membuat informasi hukum semakin mudah dijangkau masyarakat," tuturnya.

Pt Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, mengatakan pelayanan hukum pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pelayanan bukan hanya terletak pada tertibnya administrasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dan lembaga pelayanan menghadirkan solusi bagi masyarakat.

"Hukum tidak boleh terasa jauh dari masyarakat. Hukum harus memberikan kepastian, perlindungan dan menghadirkan solusi," katanya.

Ia menilai semangat pengayoman harus diterjemahkan melalui pelayanan yang responsif dan tidak mempersulit masyarakat. Setiap persoalan yang dibawa masyarakat seharusnya mendapat jalan keluar, bukan justru menimbulkan persoalan baru.

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SABTU, 22 AGUSTUS 2026	6

Fraksi-fraksi DPRD Sumbar Beri Catatan Strategis untuk APBD 2027 yang Lebih Produktif

FRAKSI-FRAKSI DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memberikan sejumlah catatan strategis terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, DPRD meminta pemerintah daerah tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Catatan tersebut disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sumbar dalam pendapat akhir terhadap KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 pada rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (14/8). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra. Dihadiri Sekda Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi.

Fraksi-fraksi menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan PAD. Optimalisasi penerimaan dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar.

Fraksi PAN melalui Daswanto mendorong pemerintah mengoptimalkan sejumlah sumber PAD, mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), retribusi daerah, pengelolaan aset hingga peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

PAN juga meminta pemerintah membuka sumber pendapatan baru melalui kerja sama dengan dunia usaha. Di sisi belanja, anggaran diminta diarahkan pada sektor yang memberikan hasil terukur, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Belanja modal dan pemerataan infrastruktur juga menjadi perhatian. PAN meminta pemerintah memperkuat pembangunan jalan, jembatan, jaringan dan irigasi, sementara belanja operasional harus dikendalikan serta dievaluasi berdasarkan keluaran dan hasil program.

Untuk penyertaan modal kepada BUMD, PAN meminta pemerintah menetapkan target kinerja, rencana bisnis, target dividen dan mekanisme evaluasi yang jelas.

Sorotan serupa disampaikan Fraksi Gerindra melalui Verry Mulyadi. Gerindra menilai potensi PAD Sumbar masih belum tergarap secara maksimal meski hasil pembahasan telah meningkatkan target PAD sekitar Rp261,35 miliar.

Peningkatan tersebut berasal antara lain dari PKB sekitar Rp40 miliar, PBBKB Rp85 miliar, PAP Rp105 miliar, PAP sekitar Rp640 juta, Opsen MBLB Rp7,5 miliar, serta peningkatan dividen BUMD.

Gerindra menilai target tersebut masih dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Pemerintah juga diminta memperkuat peran Satgas dan Juru Sita Pajak Daerah serta mempercepat penagihan piutang pajak.

Selain itu, pemerintah diminta

membangun sistem data perpajakan yang lebih akurat, terintegrasi dan berbasis digital.

Sementara Fraksi Demokrat menekankan agar APBD 2027 menjadi anggaran yang produktif, inklusif dan berkelanjutan dengan orientasi pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment.

Menurut Demokrat, belanja daerah tidak boleh hanya terserap untuk kebutuhan rutin pemerintahan. APBD harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sektor UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, industri pengolahan dan perdagangan di nilai perlu mendapat perhatian karena memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Fraksi Golkar melalui Sitti Izzati Aziz juga menyoroti target makroekonomi dalam KUA-PPAS 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,9 persen, tingkat kemiskinan 4,64 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,23 persen dan Indeks Pembangunan Manusia 78,04.

Golkar menilai target tersebut cukup tinggi dan sulit dicapai jika hanya mengandalkan kemampuan APBD Provinsi Sumbar. Karena itu, pemerintah diminta menyiapkan strategi yang lebih konkret serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan fiskal dan program pembangunan.

Fraksi NasDem mengingatkan agar pelaksanaan APBD 2027 tetap berpegang pada prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja produktif harus menjadi perhatian agar anggaran daerah benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara Fraksi PKS memberikan perhatian terhadap Perubahan KUA-PPAS 2026. PKS menilai semester II 2026 harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan PAD, terutama dari PKB, PAP, PAB dan Opsen MBLB.

PKS juga meminta tambahan pendapatan transfer yang dialokasikan untuk penanganan dampak bencana 2025 digunakan sesuai peruntukan. Penanganan pascabencana dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada rehabilitasi fisik, tetapi juga harus menyentuh pemulihan ekonomi masyarakat.

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KORAN

HALAMAN

Peningkatan belanja modal dalam Perubahan KUA-PPAS 2026 juga mendapat perhatian positif. Infrastruktur pelayanan publik dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum, catatan fraksi-fraksi menunjukkan adanya tuntutan agar Pemprov Sumbang tidak hanya berfokus mengejar angka pendapatan, tetapi juga meningkatkan kualitas belanja.

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan APBD.

Tahapan tersebut menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD, mengendalikan belanja rutin dan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbang.*



**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



FRAKSI-FRAKSI DPRD Sumbar memberikan sejumlah catatan strategis terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026. Catatan tersebut disampaikan dalam pendapat akhir fraksi terhadap KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat (14/8). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra. Dihadiri Sekda Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Sabtu, 22 Agustus 2026 (8 Rabiul Awal 1448 H)	4

RESES DPRD SUMBAR MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2025-2026

Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Jemput Aspirasi Masyarakat

Memanfaatkan masa reses perseorangan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026, seluruh unsur pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Agenda konstitusional yang berlangsung dari tanggal 18 hingga 24 Agustus 2026 ini bertujuan untuk menjemput, mendengar, dan menghimpun seluruh bentuk aspirasi serta keluhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Seluruh pokok pikiran, masukan, tata kelola fasilitas publik, hingga keluhan yang dihimpun oleh para legislator selama turun ke lapangan ini nantinya akan disistematisasikan ke dalam laporan resmi dewan.

Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk diintegrasikan secara konkret ke dalam perencanaan program kerja pembangunan dan penganggaran daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengawali agenda resesnya dengan menggelar pertemuan tatap muka bersama masyarakat di Musala Darussalam, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Selasa (18/8/2026).

Berbagai persoalan krusial menjadi bahan dialog interaktif, mulai dari pembenahan sektor pendidikan, transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga strategi penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Muhidi menjelaskan peran strategis DPRD bersama kepala daerah dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah, di mana pemerintah daerah tidak dapat membelanjakan

APBD tanpa persetujuan legislatif. APBD bukan sekadar deretan angka di atas kertas, melainkan bagaimana anggaran tersebut benar-benar didistribusikan secara adil dan memberikan manfaat nyata bagi hajat hidup orang banyak.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas kepala sekolah, guru, serta pelaku UMKM melalui bimbingan dan pelatihan kerja agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Di lokasi berbeda, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, menggelar pertemuan reses untuk menjaring aspirasi di SMAN 17 Padang, Kelurahan Atr Pacah, Kota Padang, Kamis (20/8/2026).

Sekolah baru yang lahir dari inisiasi masyarakat ini dilaporkan masih minim sarana prasarana. Pihak sekolah bersama perwakilan OSIS mengusulkan pengadaan Ruang Kelas Baru (RKB), laboratorium TIK dan IPA, ruang UKS yang lebih memadai, hingga fasilitas musala.

Ketiadaan tempat ibadah di dalam lingkungan sekolah memaksa siswa beribadah jauh di luar area belajar sehingga sering kali terlambat masuk kelas.

Kepala SMAN 17 Padang, Arnaldy, bersama Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumbar, Mahyan, menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen Evi Yandri yang sebelumnya telah merealisasikan pembangunan akses jalan masuk menuju sekolah serta menyalurkan bantuan komputer jinjing (chromebook) melalui alokasi dana Pokok Pikiran (Pokir).

Evi Yandri menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan bagian dari program prioritas nasional yang sejalan dengan visi Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Seluruh poin aspirasi ini telah dicatat untuk ditindaklanjuti secara bertahap pada penyusunan anggaran daerah berikutnya.

Langkah penyerapan aspirasi secara intensif di Kota Padang juga dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, melalui Reses Perorangan di lingkungan SMAN 10 Padang.

Nanda menyatakan bahwa beragam masukan dan kebutuhan sosiologis yang berkembang di tengah masyarakat akan dijadikan sebagai bahan evaluasi internal dewan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran di tingkat provinsi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar lainnya, M. Iqra Chissa Putra, menggelar pertemuan tatap muka bersama konstituen di Koto Baru, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

Iqra menekankan bahwa esensi dari kegiatan reses bukanlah sekadar formalitas mendengarkan keluhan warga, melainkan sebuah kewajiban konstitusional untuk memastikan setiap suara masyarakat mendapatkan ruang yang layak untuk diperjuangkan dalam

NEWS

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

melahirkan kebijakan daerah yang tepat sasaran.

Masih dalam rangkaian masa reses, Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Muhammad Yasin, mengunjungi Kelompok Tani Naga Intan di Korong Pondok Kayu, Nagari Batu Kalang Utara, Kecamatan Padang Sago, Kamis (20/8/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan menyerahkan satu unit becak motor (bentor) yang bersumber dari program Pokir miliknya. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Padang Sago, Plt Wali Nagari Batu Kalang Utara, serta pengurus kelompok tani setempat.

Plt Wali Nagari Batu Kalang Utara, Hartika Nelis, menyampaikan terima kasih atas bantuan kendaraan roda tiga tersebut karena dapat memperlancar mobilitas dan pengangkutan hasil tani anggota kelompok.

Apresiasi serupa disampaikan oleh Camat Padang Sago, Zarmiati, yang menyebut bantuan ini sangat berarti bagi warga di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah saat ini.

Muhammad Yasin, yang juga menjabat sebagai Ketua Bapem-perda DPRD Sumbar, mengungkapkan bahwa sejak dilantik dirinya telah menyalurkan bantuan kepada lebih dari 50 kelompok tani di Padang Pariaman.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar, Irsyad Safar, melaksanakan kegiatan reses di Masjid Musli-

min, Jorong Padang Balimbiang, Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (20/8/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Camat Wahyu Simamora, Wali Nagari Farid Putra, perangkat jorong, tokoh adat, kelompok tani, serta masyarakat setempat. Dalam dialog tersebut, warga mengusulkan peningkatan kapasitas ninik mamak dan Bundo Kanduang demi menjaga nilai kebudayaan sekaligus meningkatkan peran mereka dalam pembangunan nagari.

Selain itu, masyarakat mendesak perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di Nagari Bukik Sikumpa untuk mendukung mobilitas warga dan mendukung peroko nomian sektor pertanian.

Pada bidang pertanian dan ekonomi, warga mengusulkan bantuan mesin pembajak (cultivator), bentor, alat pencacah sampah, pakan ternak, serta kolam terpal untuk Kelompok Tani Ikan Limau Abuang Sakato. Warga juga berharap adanya dukungan anggaran untuk kelanjutan pembangunan Masjid Muslimin dan Kantor Kerpataan Adat Nagari (KAN).

Menanggapi usulan tersebut, Irsyad Safar menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan dihimpun dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD Sumbar agar masuk dalam skala prioritas program pembangunan daerah.

Di lokasi berbeda, Anggota

DPRD Sumbar, Ali Muda, menggelar reses untuk menjangkau aspirasi masyarakat di Jorong Air Jernih, Nagari Ranah Koto Tinggi, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Nagari Ali Sadikin beserta tokoh masyarakat setempat. Warga memanfaatkan pertemuan ini untuk mengadukan persoalan banjir tahunan yang kerap melanda permukiman dan mengganggu aktivitas harian mereka.

Selain masalah banjir, masyarakat meminta perbaikan jalan kampung serta akses menuju kawasan perkebunan yang saat ini kondisinya rusak parah sehingga menghambat mobilitas hasil panen. Pada sektor pertanian dan kepemudaan, masyarakat mengusulkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan), bantuan bibit ternak sapi dan kambing untuk dikembangkan sebagai usaha produktif, serta pembangunan lapangan sepak bola sebagai wadah kegiatan positif generasi muda nagari.

Aspirasi lain yang disampaikan meliputi dukungan sarana prasarana majelis taklim dan pembangunan pos ronda di tiap jorong untuk meningkatkan keamanan lingkungan. Ali Muda berkomitmen untuk mengawal dan memperjuangkan seluruh keluhan tersebut dalam pembahasan program pembangunan daerah Provinsi Sumbar agar terealisasi secara tepat sasaran. (*)



REAKING
NEWS!

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KORAN

AMAN



BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Haris Esmu Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	SABTU, 22 AGUSTUS 2026	4

Fraksi-Fraksi DPRD Sumbang Dorong Belanja 2027 Tepat Sasaran

PADANG, HALUAN — Fraksi-fraksi DPRD Sumbang meminta kebijakan belanja dalam APBD 2027 diarahkan pada program prioritas yang tepat sasaran, menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dorongan itu disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sumbang dalam rapat kerja dengan agenda penyampaian pendapat akhir terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027, baru-baru ini.

Dalam KUA-PPAS 2027, alokasi belanja daerah disepakati sebesar Rp5,718 triliun. Angka tersebut turun sekitar Rp691 miliar atau 10,78 persen dibandingkan APBD 2026.

Fraksi Gerindra dengan juru bicara Verry Mulyadi menilai kondisi fiskal daerah mengharuskan pemerintah melakukan efisiensi. Namun, efisiensi tidak boleh berujung pada pengurangan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kita harus membedakan antara belanja yang sekadar menghabiskan anggaran dengan belanja yang menghasilkan manfaat publik. Perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat-rapat yang tidak memberikan dampak langsung, serta belanja yang tidak memiliki indikator manfaat yang jelas harus menjadi objek evaluasi," ujarnya.

Sebaliknya, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, pertanian, UMKM dan penguatan ekonomi nagari harus tetap menjadi prioritas.

Fraksi Gerindra juga menyoroti alokasi belanja modal dalam KUA-PPAS 2027 yang mencapai sekitar Rp383,9 miliar. Angka tersebut turun

18,51 persen dibandingkan APBD 2026. Dari jumlah itu, belanja modal gedung dan bangunan dialokasikan sekitar Rp197,28 miliar. Sedangkan belanja jalan, jaringan dan irigasi mencapai sekitar Rp119,86 miliar.

Mencermati alokasi tersebut, Fraksi Gerindra meminta pemerintah memastikan belanja modal benar-benar diarahkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.

"Kami meminta agar setiap belanja modal benar-benar didasarkan pada skala prioritas. Pembangunan infrastruktur jangan hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi harus menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.

Verry juga meminta pembangunan jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar lainnya dilakukan secara merata.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan tertentu. Kabupaten dan kota, wilayah utara dan

selatan, kawasan pesisir, daerah kepulauan maupun wilayah yang masih tertinggal harus mendapat perhatian secara proporsional.

Sementara itu, Fraksi Demokrat menilai belanja daerah harus mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar membiayai rutinitas pemerintahan.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Agus Syahdeman, mengatakan anggaran perlu diarahkan lebih kuat kepada

sektor-sektor produktif, seperti UMKM dan koperasi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, industri pengolahan dan perdagangan.

"APBD harus bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pembangunan infrastruktur yang merata, konektivitas antarwilayah, pelayanan perizinan yang efisien serta kepastian pelayanan publik," ujarnya.

Menurut Agus, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pasar, sentra produksi dan infrastruktur ekonomi lainnya harus dipilih berdasarkan kemampuannya membuka akses, menekan biaya logistik, meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar.



118



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

"Belanja modal tidak boleh berhenti pada pencapaian output fisik. Setiap rupiah belanja harus diuji berdasarkan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan dampak bergandanya terhadap perekonomian masyarakat," katanya.

Fraksi PDI Perjuangan dan PKB melalui juru bicara Donizar juga meminta pemerintah daerah melakukan penajaman terhadap prioritas belanja.

Menurut Donizar, APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga harus menjadi instrumen fiskal yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan.

Karena itu, pemerintah daerah diminta mengurangi belanja yang kurang produktif, meningkatkan efisiensi belanja operasional serta memperbesar porsi belanja modal yang secara langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun Fraksi Golkar melalui juru bicara Siti Izzati Aziz meminta pelaksanaan belanja dilakukan secara efektif dan

selektif sesuai prioritas pembangunan.

"Pelaksanaan anggaran juga harus memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang telah disepakati," tukasnya.

Di sisi lain, Fraksi PKS menyoroti pendapatan daerah sebagai salah satu penopang kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.

Juru bicara Fraksi PKS, Nurfirmanwansyah, menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan awal KUA-PPAS 2027 diproyeksikan sebesar Rp3 triliun. Setelah pembahasan, terdapat tambahan Rp261,345 miliar sehingga PAD menjadi sekitar Rp3,261 triliun. Tambahan tersebut terutama berasal dari pajak daerah dan dividen Bank Nagari.

Fraksi PKS mengapresiasi peningkatan PAD tersebut. Namun, fraksi ini menilai potensi PAD Sumbar masih

belum sepenuhnya tergali sehingga optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah perlu terus dilakukan.

"Sejumlah sumber PAD masih perlu dioptimalkan, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta retribusi," ujar Nurfirmanwansyah.

Secara umum Fraksi-fraksi DPRD Sumbar berharap kebijakan belanja dalam APBD 2027 tidak semata-mata mengejar realisasi anggaran. Setiap program dan kegiatan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan penguatan perekonomian masyarakat. (adv)



Rapat kerja DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap KUA PPAS Tahun 2027 dan Perubahan

BREAKING NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KO



Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan dan PKB, Donizar saat menyampaikan dokumen pendapat akhir fraksinya kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa



Juru Bicara Fraksi Golkar, Sitti Izzati Aziz saat menyampaikan dokumen pendapat akhir fraksinya kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa

NEWS

**BREAKING
NEWS!**

120



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



Juru bicara Fraksi PKS, Nurfirmansyah saat menyampaikan dokumen pendapat akhir fraksinya kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa sebagai pimpinan rapat

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Verry Mulyadi saat menyampaikan dokumen pendapat akhir fraksinya kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa



Juru Bicara Fraksi PAN, Daswanto saat menyampaikan dokumen pendapat akhir fraksinya kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa sebagai pimpinan rapat



Juru bicara Fraksi Nasdem, Asril saat menyampaikan dokumen pendapat akhir fraksinya kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU 22 AGUSTUS 2026	7

Sumbar Dituntut Gerak lebih Cepat

PIDATO kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto bukan sekadar agenda tahunan. Bagi DPRD Sumbar, paparan capaian pemerintah pusat dan arah RAPBN 2027 harus menjadi alarm agar pembangunan di daerah bergerak lebih cepat, terukur, dan terasa langsung oleh masyarakat.

Pesan itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Sumbar yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo, pekan lalu. Muhidi didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satria, dan Iqra Chissa. Hadir pula Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Forkopimda, serta jajaran kepala OPD.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan atau 663 hari pemerintahan. Presiden juga menekankan penguatan ketahanan nasional, termasuk pangan dan energi. (Sekretariat Negara)

Untuk 2027, pemerintah menyiapkan belanja negara Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6 persen, dengan defisit dijaga 2,40 persen terhadap PDB. (Sekretariat Negara)

Delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) menjadi poros kebijakan: kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta

penurunan kemiskinan. (Sekretariat Negara)

Bagi Sumbar, arah tersebut memiliki relevansi langsung. Ekonomi Sumbar pada triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan. Pertumbuhan terutama ditopang sektor akomodasi dan makan minum, ekspor serta konsumsi pemerintah. Pada saat yang sama, kemiskinan Sumbar pada Maret 2026 berada di angka 5,27 persen. (BPS Sumbar)

Angka pertumbuhan itu posi-

tif, tetapi tantangannya adalah memastikan pertumbuhan tidak berhenti sebagai statistik. Hilirisasi komoditas lokal, penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, infrastruktur, hingga perlindungan masyarakat dari risiko bencana harus diterjemahkan menjadi program yang konkret.

Muhidi menegaskan laporan kinerja pemerintah pusat harus menjadi bahan evaluasi bagi daerah, terutama untuk mengukur efektivitas kebijakan dan dampaknya terhadap

kesejahteraan masyarakat.

"Laporan kinerja lembaga negara dan paparan target presiden ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kita semua untuk mengukur tingkat efektivitas, profesionalitas, dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Muhidi.

Ia meminta pemerintah daerah dan DPRD memperkuat sinergi agar delapan prioritas nasional tidak berhenti di atas dokumen perencanaan, tetapi benar-benar

diturunkan menjadi kebijakan daerah yang tepat sasaran.

Momentum ini sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi Sumbar. Dengan ruang fiskal dan arah kebijakan nasional yang semakin jelas, daerah dituntut mampu memilih program yang berdampak besar, memangkas belanja yang tidak produktif, serta mempercepat pelaksanaan pembangunan.

"Mari kita lanjutkan pembangunan daerah yang sedang berjalan. Kita bawa Sumatera Barat

bergerak lebih cepat, mandiri, sejahtera, serta tetap teguh menjaga nilai adat, beradab, dan berbudaya dalam bingkai NKRI," pungkaskan Muhidi.

Dengan demikian, makna kemerdekaan di tingkat daerah tidak cukup dirayakan lewat seremoni. Ukurannya jauh lebih sederhana: apakah ekonomi tumbuh, lapangan kerja bertambah, kemiskinan turun, layanan publik membaik, dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan. (r)

NEWS

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SISU SUMATERA BARAT

ING PEDITA

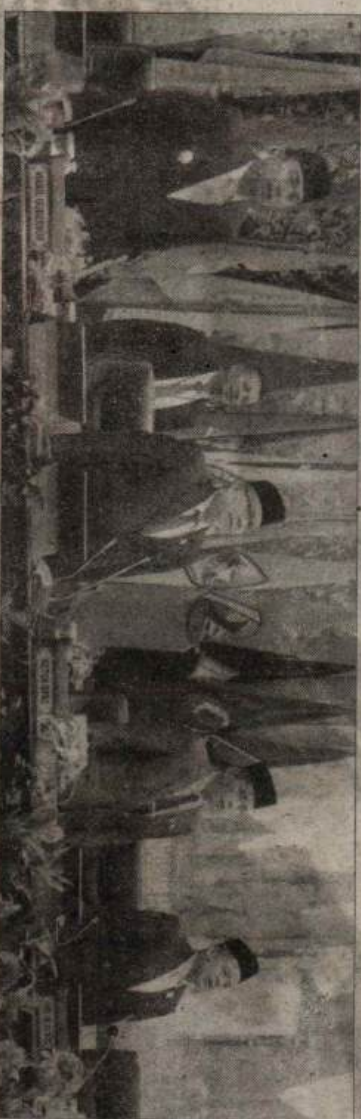
KETUA DPRD Sumbar Muhidi memimpin rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo, pekan lalu. Muhidi didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satra, dan Iqra Chissa.



SUASANA rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo, pekan lalu. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Muhidi.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi bersama Wagub Sumbar Vasko Ruseimy bersama wakil ketua DPRD Sumbar sewaktu rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo.



BREAKING
NEWS!

123



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SABTU 22 AGUSTUS 2026	2

Melihat Reses Donizar di Kecamatan Tigo Nagari Dari Jalan Usaha Tani, Surau hingga Budaya jadi Aspi

Aula Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kamis (20/8), terasa sesak. Kursi-kursi yang disiapkan untuk kegiatan reses anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKB, Donizar, tak lagi mampu menampung warga yang datang.

WILIAN ABIB—
Pasaman

SEBAGIAN masyarakat memenuhi ruangan. Sebagian lainnya berada di luar aula. Mereka tetap bertahan mengikuti kegiatan, menunggu kesempatan menyampaikan apa yang selama ini menjadi kebutuhan di nagari.

Suasana tersebut menggambarkan tingginya antusiasme masyarakat mengikuti reses Donizar. Tak hanya warga, kegiatan itu juga dihadiri Kepala polsek Tigo Nagari, Camat Tigo Nagari, sejumlah wali nagari, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya.

Di tengah kerumunan warga, Donizar menyampaikan bahwa reses merupakan bagian dari tugas anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan



MEDIA CENTRE DONIZAR UNTUK PADUK

MEMBLUDAK: Ratusan warga menghadiri reses anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKB Donizar di Aula Kantor Wali Nagari Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Pasaman, Kamis (20/8). Aula tak mampu menampung seluruh masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi.

persoalan sekaligus menyampaikan kebutuhan pembangunan di daerahnya.

"DPRD hadir untuk masyarakat. Salah satu tugas kami adalah menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya melalui lembaga DPRD," ujar Donizar.

Namun, pertemuan itu tidak hanya diisi dengan penyampaian aspirasi pembangunan. Donizar juga memberikan edukasi politik kepada

masyarakat, khususnya mengenai praktik politik uang.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan pemberian uang sebagai dasar dalam menentukan pilihan politik. Menurutnya, politik uang justru dapat membawa dampak buruk bagi daerah maupun nagari. "Yang membuat buruk daerah atau nagari itu adalah politik uang," tegasnya.

Satu per Satu Aspirasi Disampaikan

Setelah pemaparan Donizar, suasana beralih pada sesi penyampaian aspirasi. Warga secara bergantian menyampaikan kebutuhan yang mereka rasakan di lingkungan masing-masing.

Persoalan infrastruktur menjadi salah satu aspirasi yang mencuat. Warga menyampaikan kebutuhan pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani. Jalan tersebut dinilai penting bagi aktivitas masyarakat, terutama untuk mendukung kegiatan pertanian dan mobilitas warga.

Aspirasi lain datang terkait akses jalan menuju sekolah. Warga berharap kondisi akses pendidikan mendapat perhatian sehingga aktivitas anak-anak menuju sekolah dapat berlangsung lebih baik.

Tidak hanya infrastruktur, kebutuhan keagamaan juga disampaikan. Masyarakat mengusulkan bantuan untuk surau sebagai penunjang kegi-

tan keagamaan di tengah masyarakat.

Dari bidang sosial dan budaya, warga juga menyampaikan harapan adanya dukungan terhadap kegiatan kesenian tradisional. Salah satunya berupa bantuan seragam untuk kegiatan silat.

Aspirasi terus mengalir. Beragam persoalan masyarakat disampaikan secara langsung kepada Donizar, mulai dari kebutuhan pembangunan hingga dukungan terhadap kegiatan sosial, keagamaan, kesenian dan kebudayaan.

Bagi masyarakat, reses menjadi kesempatan untuk membawa persoalan yang mereka hadapi sehari-hari langsung ke hadapan wakil rakyat. Donizar pun menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi bagian dari bahan reses untuk dibawa dan diperjuangkan melalui tugasnya sebagai anggota DPRD Sumbar. (*)



NEWS



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SENIN, 24 AGUSTUS 2026	6

Reses di Alai Parak Kopi, Muhidi Janji Kawal Pembinaan Drainase



KETUA DPRD Sumbar Muhidi menyerap aspirasi ratusan warga dan jemaah majelis taklim pada kegiatan reses di Masjid Mukhlisin, Kelurahan Alai Parak Kopi, Padang.

PADANG, KP — Persoalan banjir musiman yang masih menghantui warga Kota Padang menjadi perhatian serius Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi. Saat menggelar kegiatan reses di Masjid Mukhlisin, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Sabtu (22/8), Muhidi diujani aspirasi warga mengenai buruknya sistem drainase dan riol di wilayah tersebut.

Sejumlah tokoh masyarakat, bundo kanduang, hingga ibu-ibu majelis taklim yang hadir menegaskan bahwa pembenahan saluran air merupakan kebutuhan mendesak. Mampatnya riol dinilai menjadi pemicu utama genangan air dan banjir saat intensitas hujan tinggi mengguyur kawasan Alai Parak Kopi.

Muhidi menegaskan bahwa seluruh masukan warga terkait infrastruktur pengendalian banjir akan langsung dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait di Pemerintah Provinsi dan Pem-

ko Padang agar segera mendapatkan perbaikan fisik yang terukur. "Yang paling penting adalah bagaimana kebutuhan masyarakat ini menjadi prioritas dan manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Muhidi.

Selain urusan drainase, Muhidi juga mengingatkan masyarakat untuk fokus membekali generasi muda dengan keterampilan praktis (skill). Menurutnya, persaingan kerja yang makin ketat mewajibkan para pelajar memiliki keahlian khusus di samping selimbar ijazah formal agar tidak menambah angka pengangguran.

Muhidi juga menegaskan agar kondisi ekonomi yang sulit jangan sampai dijadikan alasan bagi para orang tua untuk memberhentikan sekolah anak-anak mereka. Pemprov Sumbar bersama DPRD terus berkomitmen mengawal alokasi bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu. (fai)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Senin, 24 Agustus 2026 (10 Rabiul Awal 1448 H)	4

MASA RESES PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2025-2026

Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Serap Aspirasi SMAN 17 Padang

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman, meninjau aspirasi siswa dan guru SMAN 17 Padang di Kelurahan Air Pacah, Kota Padang, Kamis (20/8). Pertemuan dalam masa reses ini bertujuan menghimpun langsung kebutuhan sektor pendidikan.

SMAN 17 Padang merupakan sekolah baru yang didirikan atas inisiasi warga. Sistem zonasi PPDB kerap menyulitkan calon siswa di Air Pacah untuk melanjutkan pendidikan. Akses ke sekolah terdekat lain, seperti SMAN 5 Padang di Balai Baru, dinilai terlalu jauh.

Sebagai sekolah baru, SMAN 17 Padang masih minim sarana. Pihak sekolah dan siswa mengusulkan pengadaan ruang kelas baru (RKB), laboratorium TIK dan IPA, ruang UKS, serta fasilitas ibadah.

"Kami sangat membutuhkan musala. Pak. Lokasi ibadah saat ini jauh dari area belajar. Kami sering terlambat masuk kelas," ujar seorang siswa.

Siswa lain mengungkapkan ruang UKS yang hanya bisa memuat satu ranjang. Kondisi ini menyulitkan penanganan medis darurat, terutama saat upacara bendera. Perwakilan siswa juga mengharapkan adanya ruang sekretariat OSIS.

Sementara itu, guru meminta penambahan ruang kelas baru untuk meningkatkan daya tampung sekolah. Langkah mendesak ini diperlukan guna mengakomodasi lulusan SMP di zona Air Pacah pada tahun ajaran mendatang.

Kepala SMAN 17 Padang, Arnaldi, menjelaskan bahwa jumlah siswa terus meningkat sejak sekolah diinisiasi pada 2021 dan mulai dibangun pada 2022.

"Saat awal berdiri, Pak Evi sangat membantu sekolah ini. Akses jalan masuk bahkan dibangun menggunakan dana pokok-

pokok pikiran (pokir) beliau. Jalannya selesai lebih dulu sebelum bangunan sekolah rampung. Kami sangat mengapresiasi komitmen ini," ungkap Arnaldi.

Selain jalan ada beberapa lagi yang diupayakan evyandri untuk SMAN 17. Baru baru ini, Evi Yandri juga memperjuangkan bantuan komputer jinjing (chromebook) melalui dana pokir untuk mendukung digitalisasi dan ujian siswa.

Apresiasi juga datang dari Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumbar, Mahyan. Ia memuji konsistensi Evi Yandri yang mengalokasikan anggaran pokir demi pemenuhan sarana prasarana sekolah di Sumbar.

Merespons hal itu, Evi Yandri menegaskan bahwa pendidikan merupakan program prioritas nasional. Kebijakan ini selaras dengan visi Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

"Kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah hal mendasar untuk

kemajuan negara. Pintu utamanya adalah memperbaiki sektor pendidikan," tegas legislator Partai Gerindra tersebut.

Di hadapan siswa, Evi berpesan agar generasi muda menjaga disiplin. Ia meminta mereka menjauhi narkoba, lawuran, dan seks bebas. "Jangan pernah coba-coba. Sekali terjebak, masa depan rusak. Ingat pengorbanan orang tua di rumah. Fokuslah belajar dan kejar cita-cita," pesan Evi.

Terkait usulan fasilitas fisik, Evi menyatakan tim staf telah mencatat seluruh aspirasi untuk ditindaklanjuti pada penyusunan anggaran daerah berikutnya.

"Pembangunan tentu bertahap. Namun, sektor pendidikan selalu mendapat porsi karena merupakan program prioritas. Kami bersama sekolah dan dinas terkait akan mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini komite sekolah, Lurah Air Pacah, serta Sekretaris Camat Koto Ta-

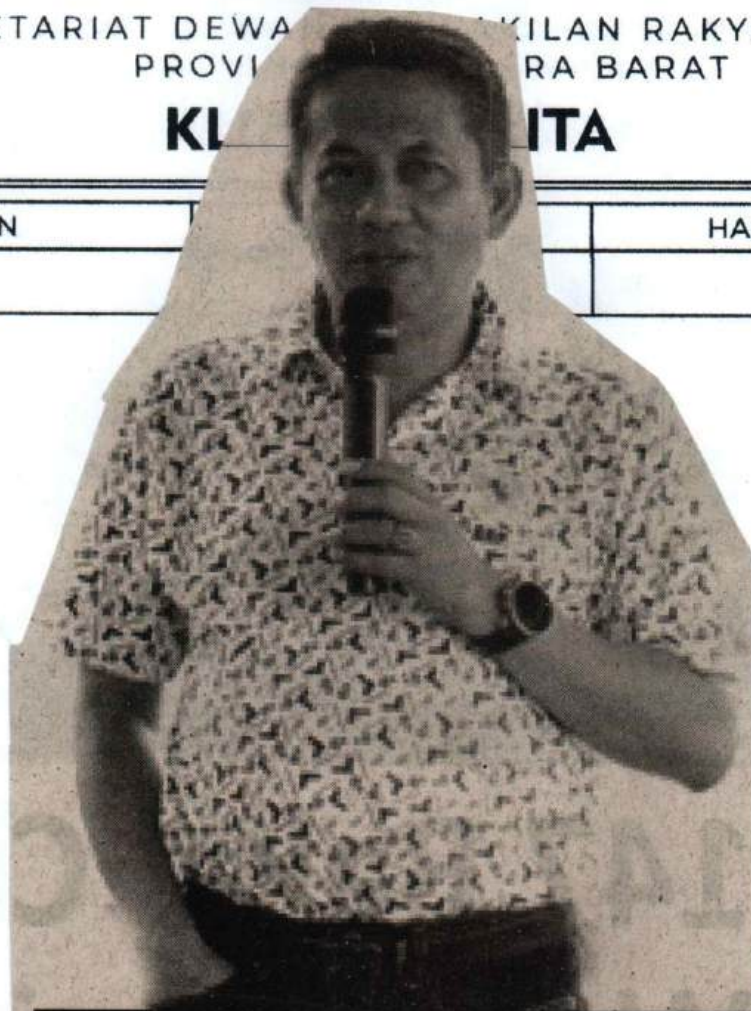
BREAKING NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMBARA BARAT

KLIP ITA

KORAN	HALAMAN



EVI YANDRI RAJO BUDIMAN, S.IP
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar



**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SENIN 24 AGUSTUS 2026	5

DARI BETOR, EVI BICARA MASA DEPAN PETANI

BANTUAN becak motor (betor) untuk lima kelompok tani di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, bukan sekadar tambahan alat angkut hasil panen. Di balik bantuan yang bersumber dari dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, terselip persoalan lebih besar: masa depan petani dan ketahanan pangan Sumbar.

Bantuan tersebut diserahkan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar di ruang rapat dinas terkait, baru-baru ini. Penyerahan sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi.

Lima kelompok tani yang menerima bantuan itu ialah Lapau Munggu, Tuah Sakato, Serba Usaha, KWT Mekar Jaya, dan Sumua Gadang.

Evi mengatakan, bantuan tersebut lahir dari aspirasi masyarakat yang diseraunya ketika meres. Dana Pokir, menurutnya, harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk program

yang menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

"Ini adalah bentuk penerapan aspirasi warga saat meres. Dana pokir memang kami prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Evi Yandri.

Namun, Evi tidak ingin bantuan betor berhenti sebagai distribusi kendaraan kepada kelompok tani. Ia justru menyoroti problem yang lebih mendasar: petani Sumbar semakin menua, sementara regenerasinya belum berjalan kuat.

"Sektor pertanian butuh perhatian besar karena mayoritas petani kita sudah berumur. Jika tidak ada regenerasi dalam 10 tahun ke depan, kita bisa terancam bergantung pada impor," tegasnya.

Menurut Evi, persoalan regenerasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengajak anak muda masuk ke sektor pertanian. Pendapatan petani harus lebih menjanjikan sehingga bertani tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan dengan masa depan yang suram.

"Pendapatan petani harus ditingkatkan agar sektor ini kembali dilirik sebagai profesi yang menjanjikan," katanya.

Peringatan itu menjadi relevan di tengah agenda ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Evi menilai, pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan agenda tersebut ke dalam kebijakan yang benar-benar memperkuat petani, bukan sekadar menambah kegiatan seremonial.

Ia menyebut sinergi legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar kebutuhan petani dapat diterjemahkan menjadi program konkret.

"Jangan jadi Fasilitas Pengurus

Evi juga memberi pesan tegas kepada penerima bantuan. Betor harus menjadi aset bersama, bukan kendaraan pribadi ketua atau pengurus kelompok tani.

"Tolong rawat dan jaga barang bantuan ini dengan baik. Gunakan bersama-sama demi kemajuan kel-

ompok, bukan untuk ketua saja," tegasnya.

Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman, mengakui dukungan legislatif melalui dana Pokir diperlukan karena kemampuan anggaran dinas terbatas.

"Masyarakat tidak bisa sejahtera hanya lewat sosialisasi. Tanpa dukungan dana pokir dari anggota dewan,

program kami tidak akan berjalan maksimal. Kolaborasi inilah yang membuat petani bisa langsung menerima asas manfaat," tutur Afniwirman.

Menurut Afniwirman, betor dirancang untuk menjawab persoalan yang sangat praktis: mahalanya operasional dan sulitnya mengangkut hasil panen ke pasar. Dengan sarana angkut sendiri, biaya distribusi diharapkan lebih rendah dan

pendapatan keluarga petani dapat meningkat.

Tetapi bantuan itu juga membawa konsekuensi. Kelompok tani penerima wajib merawat aset agar tidak cepat rusak. Apalagi, masih banyak kelompok tani lain yang menunggu giliran mendapatkan bantuan.

"Kami ingin membantu, tetapi petani juga harus berkomitmen merawat bantuan ini. Jangan sampai cepat ru-

sak karena kurang pemeliharaan," pungkas Afniwirman.

Bagi Kuranji, betor mungkin hanya sebuah kendaraan. Tetapi bagi sektor pertanian Sumbar, efektivitas bantuan ini akan diuji dari satu hal: apakah ia benar-benar mampu memangkas biaya petani, meningkatkan pendapatan, dan membuat bertani kembali layak dipilih generasi berikutnya. (*)

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman menyerahkan bantuan becak motor kepada kelompok tani yang bersumber dari pokir di Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar, baru-baru ini.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman bersama kelompok tani penerima bantuan becak motor, serta pimpinan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar, baru-baru ini.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman memberi arahan kepada kelompok tani penerima bantuan becak motor di Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumbar, baru-baru ini.

**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG	SENIN, 24 AGUSTUS 2026	3

Reses ke SMAN 12 Padang

Evi Yandri Janji Perjuangkan Fasilitas Sekolah Terdampak Banjir

PADANG, METO

Sebagai salah satu sekolah yang terdampak parah bencana hidrometeorologi pada 27 November lalu, SMA Negeri 12 Nanggalo, Padang memerlukan perbaikan sarana dan prasarana.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, turun langsung menjemput aspirasi pihak sekolah pada Jumat (21/8). Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangkaian reses perseorangan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025-2026.

Kepada Evi Yandri, seorang guru meminta bantuan pengadaan mobiler berupa meja, kursi, dan loker guru.

"Kami memerlukan meja dan kursi baru, Pak. Fasilitas yang lama sudah tidak layak pakai karena terendam lumpur saat banjir bandang kemarin," ujar guru tersebut.

Bencana November lalu memang tidak hanya merendam SMAN 12 Padang dengan air, tetapi juga menyisakan endapan lumpur yang tebal di area sekolah.

"Saat pembersihan lumpur pascabencana, Pak Evi langsung datang meninjau ke sini. Kami sangat berterima kasih atas kepedulian beliau. Tahun ini, kami juga menerima bantuan laptop dari dana pokok pikiran (pokir) Pak Evi," kata guru lainnya.

SMAN 12 Padang tercatat sering terdampak banjir, termasuk pada 3 Agustus lalu, namun untungnya air cepat surut. Namun, banjir pada November menjadi yang terparah karena material lumpur terbawa.

"Pak, mohon dicarikan solusi agar sekolah dan jalan akses ke sini tidak banjir lagi. Kami kesulitan untuk datang belajar," keluh salah seorang siswa.

Selain banjir, keluhan mengenai krisis air bersih juga mencuat dalam pertemuan tersebut.

"Air sekolah keruh dan berbau besi. bahkan kadang tidak ada air. Padahal sangat dibutuhkan untuk berwudu dan keperluan toilet," ungkap seorang siswi.

Pihak sekolah membenarkan kendala tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi seribu lebih siswa dan guru, sekolah telah membuat empat sumur bor dengan kedalaman hingga 60 meter. Namun, air yang keluar tetap keruh.

"Kalau menggunakan layanan PDAM airnya jernih, tetapi alirannya sering mati sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan sekolah," jelas salah seorang guru.

Persoalan lain yang dihadapi sekolah adalah ketiadaan lapangan olahraga yang memadai. Lahan lapangan yang ada saat ini sebagian besar sudah terpakai untuk pembangunan gedung baru.

"Tahun 2027 kami menghadapi penilaian akreditasi sekolah. Tanpa lapangan olahraga yang layak, nilai akreditasi kami terancam turun," keluh guru olahraga.

Akibat keterbatasan fasilitas ini, terkadang siswa terpaksa mengikuti materi jam olahraga di dalam ruang kelas. Sementara untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti futsal dan basket, siswa terpaksa menyewa lapangan di luar sekolah dengan biaya mandiri.

"Sewa lapangan futsal mencapai Rp200 ribu per jam. Kasihan siswa yang punya semangat tinggi untuk berolahraga," tambahnya. Siswa juga berharap mendapat bantuan alat penunjang ekstrakurikuler seperti alat musik tradisional talempong dan tenda PMR.

Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Evi Yandri meminta pihak sekolah segera menyusun perencanaan pembangunan yang matang.

"Harus ada master plan yang jelas. Jangan sampai saat kepala sekolah ber-

ganti, kebijakannya ikut berubah. Itu akan menyulitkan pembangunan," tegas Evi.

Evi berjanji akan membawa persoalan fisik, pengadaan mobiler, fasilitas lapangan, hingga penyediaan air bersih ini untuk dibahas bersama Dinas Pendidikan Sumbar untuk memastikan anggaran pemenuhannya secara bertahap.

Di akhir pertemuan, Evi Yandri sempat menguji respons siswa mengenai kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh siswa kompak meminta program tersebut diteruskan, meski mereka memberikan catatan kritis terkait kualitas makanan.

"Kami ingin program ini lanjut, Pak. Namun kualitasnya harus diperbaiki. Menunya jangan telur terus-menerus, dan kebersihannya harus dijaga," ujar seorang siswa berseloroh.

Selain siswa dan guru, pada pertemuan itu juga turut hadir Kabid pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumbar, Mahyan, pengawas sekolah dan Sekcam Nanggalo. (rel)

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



RESES—Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman bersama para guru dan siswa di SMA Negeri 12 Nanggalo, Padang.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Menerbitkan Kehidupan Masyarakat	SENIN, 24 AGUSTUS 2026	23

RESES KE SMAN 12 PADANG

Evi Yandri Janji Perjuangkan Fasilitas Sekolah Terdampak Banjir

PADANG, HALUAN — Sebagai salah satu sekolah yang terdampak parah bencana hidrometeorologi pada 27 November lalu, SMA Negeri 12 Nanggalo, Padang memerlukan perbaikan sarana dan prasarana.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, turun langsung menjemput aspirasi pihak sekolah pada Jumat (21/8). Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangkaian reses perorangan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025-2026.

Kepada Evi Yandri, seorang guru meminta bantuan pengadaan mobiler berupa meja, kursi, dan loker guru.

"Kami memerlukan meja dan kursi baru, Pak. Fasilitas yang lama sudah tidak layak pakai karena terendam lumpur saat banjir bandang kemarin," ujar guru tersebut.

Bencana November lalu memang tidak hanya merendam SMAN 12 Padang dengan air, tetapi juga menyisakan endapan lumpur yang tebal di area sekolah.

"Saat pembersihan lumpur pascabencana, Pak Evi langsung datang meninjau ke sini. Kami sangat berterima kasih atas kepedulian beliau. Tahun ini, kami juga menerima bantuan laptop dari dana pokok pikiran (pokir) Pak Evi," kata guru lainnya.

SMAN 12 Padang tercatat sering terdampak banjir, termasuk pada 3 Agustus lalu, namun untung air cepat surut. Namun, banjir pada November menjadi yang terparah karena material lumpur terbuwa.

"Pak, mohon dicarikan solusi agar sekolah dan jalan akses ke sini tidak banjir lagi. Kami kesulitan untuk datang belajar," keluh salah seorang siswa.

Selain banjir, keluhan mengenai krisis air bersih juga mencuat dalam pertemuan

tersebut.

"Air sekolah keruh dan berbau besi. bahkan kadang tidak ada air. Padahal sangat dibutuhkan untuk berwudu dan keperluan toilet," ungkap seorang siswi.

Pihak sekolah membenarkan kendala tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi seribu lebih siswa dan guru, sekolah telah membuat empat sumur bor dengan kedalaman hingga 60 meter. Namun, air yang keluar tetap keruh.

"Kalau menggunakan layanan PDAM airnya jernih, tetapi alirannya sering mati sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan sekolah," jelas salah seorang guru.

Persoalan lain yang dihadapi sekolah adalah ketiadaan lapangan olahraga yang memadai. Lahan lapangan yang ada saat ini sebagian besar sudah terpakai untuk pembangunan gedung baru.

"Tahun 2027 kami menghadapi penilaian akreditasi sekolah. Tanpa lapangan olahraga yang layak, nilai akreditasi kami terancam turun," keluh

NEWS

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



GELAR RESES— Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman saat melaksanakan reses di SMA Negeri 12 Nanggalo. IST

guru olahraga.

Akibat keterbatasan fasilitas ini, terkadang siswa terpaksa mengikuti materi jam olahraga di dalam ruang kelas. Sementara untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti futsal dan basket, siswa terpaksa menyewa lapangan di luar sekolah dengan biaya mandiri.

“Sewa lapangan futsal mencapai Rp200 ribu per jam. Kasihan siswa yang punya

semangat tinggi untuk berolahraga,” tambahnya. Siswa juga berharap mendapat bantuan alat penunjang ekstrakurikuler seperti alat musik tradisional talempong dan tenda PMR.

Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Evi Yandri meminta pihak sekolah segera menyusun perencanaan pembangunan yang matang.

“Harus ada master plan

yang jelas. Jangan sampai saat kepala sekolah berganti, kebijakannya ikut berubah. Itu akan menyulitkan pembangunan,” tegas Evi.

Evi berjanji akan membawa persoalan fisik, pengadaan mobil, fasilitas lapangan, hingga penyediaan air bersih ini untuk dibahas bersama Dinas Pendidikan Sumbar untuk memastikan anggaran pemenuhannya secara bertahap. (*)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
		4

Ketua DPRD Sumbar Tekankan Pentingnya Pendidikan hingga SMA

PADANG, HALUAN — Kondisi ekonomi yang sulit jangan sampai menjadi alasan anak-anak di Kota Padang berhenti mengenyam pendidikan. Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mendorong masyarakat memastikan anak-anak minimal menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau SMK sebagai bekal menghadapi persaingan dunia kerja.

Hal itu disampaikan Muhidi di hadapan lebih dari 150 warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg), saat melaksanakan reses di Masjid Khusnul Khotimah, Jumat (21/8).

“Walaupun ekonomi sedang sulit sekarang, jangan sampai anak tidak sekolah. Kalau tidak bisa melanjutkan ke SMA, bisa memilih SMK,” ujar Muhidi.

Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan dunia yang semakin cepat. Karena itu, anak-anak tidak cukup hanya dibekali pendidikan formal, tetapi juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Muhidi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala sekolah untuk mendorong terjalannya komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Sumbar. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi lulusan sekolah, khususnya SMK, untuk memasuki dunia kerja.

“Perkembangan globalisasi tidak bisa kita tolak. Karena itu, anak-anak harus disiapkan dengan berbagai bekal, termasuk kemampuan bahasa asing dan ilmu pengetahuan. Minimal anak-anak kita harus tamat SMA atau SMK,” katanya.

Ia menilai keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja menjadi penting agar anak-anak tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat diterapkan setelah menyelesaikan pendidikan.

Muhidi juga menekankan pentingnya kebersamaan antara masyarakat, pemerintah, sekolah, dan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan sekaligus memperjuangkan aspirasi yang disampaikan.

“Sebagai representasi masyarakat, saya berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan serta persoalan mereka,” ujarnya.

Dalam reses tersebut, sejumlah warga turut menyampaikan berbagai persoalan, terutama terkait pendidikan dan pembinaan generasi muda.

Citra, salah seorang warga Kampung Baru yang selama sekitar enam tahun terlibat dalam penanganan anak putus sekolah melalui yayasan, mengatakan masih terdapat sejumlah kendala bagi

anak-anak untuk kembali melanjutkan pendidikan.

Salah satunya terkait biaya pengambilan ijazah. Selain itu, diperlukan dukungan untuk pengembangan program pembinaan anak putus sekolah ke depan.

“Kami sudah sekitar enam tahun bergelut dalam membantu anak-anak putus sekolah. Namun masih ada kendala, terutama anak-anak yang belum memiliki biaya untuk mengambil ijazah,” katanya.

Selain persoalan pendidikan, aspirasi juga disampaikan pengurus Karang Taruna Kelurahan Kampung Baru. Organisasi kepemudaan yang baru dilantik pada 17 Agustus 2026 itu menyampaikan kebutuhan pembinaan dan dukungan sarana untuk menjalankan berbagai program kepemudaan di tingkat kelurahan.

Pengurus Karang Taruna berharap adanya bimbingan teknis bagi pengurus serta dukungan sarana pendukung organisasi, sehingga dapat menjalankan amanah sekaligus meningkatkan kegiatan bagi generasi muda di wilayah tersebut.

Berbagai aspirasi yang disampaikan warga tersebut menjadi bagian dari agenda reses Muhidi dalam menyerap secara langsung kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan menjadi bahan bagi DPRD Sumbar dalam memperjuangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (h/len)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



LAKSANAKAN RESES— Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat melaksanakan reses di Masjid Khusnul Khotimah, Jumat (21/8). IST





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
	Rakyat Sumbar SENIN 24 AGUSTUS 2026	5

Zulkenedi Said Tampung Aspirasi SMAN 1 Pasaman

Pasaman Barat, Rakyat Sumbar—Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Dr. Zulkenedi Zaid, S.Sos, SH, M.Si., MM., MH., M.AP, melaksanakan reses di SMAN 1 Pasaman pada Sabtu (22/8).

Kegiatan reses tersebut guna mendengar dan menampung aspirasi dari tenaga pendidik serta siswa di hadirinya Kepala Sekolah SMAN 1 Pasaman Suhelmi, S.Pd., M.Pd, Komite Syafrudin, seluruh guru dan pegawai, staf, pengurus OSIS, Pramuka beserta undangan lainnya.

Kepala Sekolah SMAN 1 Pasaman Suhelmi mengucapkan selamat datang anggota DPRD Sumatera Barat Dr. Zulkenedi Zaid dalam pelaksanaan reses di sekolah.

"Dengan adanya kegiatan ini, aspirasi dari sekolah dan siswa tentu akan tersampaikan langsung," katanya.

Dikatakannya, ditahun 2026 jumlah siswa terus meningkat saat ini ada sebanyak 1029 orang siswa dengan memiliki 3 kelas asrama dan 27 kelas reguler dengan jumlah guru 62 orang, yang terdiri dari guru PNS 49 orang dan guru honor 13 orang.

Ia berharap, kehadiran anggota DPRD Sumatera Barat Dr. Zulkenedi Zaid, yang juga alumni SMAN 1 Pasaman, nantinya segala aspirasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan direalisasikan untuk peningkatan mutu pendidikan," sebutnya

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Zulkenedi Zaid, menyampaikan, generasi muda yang sedang menempuh pendidikan, merupakan cikal bakal penerus bangsa, jadi bagi adik sekalian jangan sia siakan waktu untuk belajar

"Semakin berpendidikan semakin banyak menambah wawasan dan jauh dari narkoba, jangan pernah coba-coba. Sekali terjebak, masa depan rusak. Ingat pengorbanan orang tua di rumah. Fokuslah untuk tetap meraih prestasi setinggi mungkin," sebutnya.

Selanjutnya, di dalam sesi penyampaian aspirasi, yang disampaikan oleh guru maupun siswa meliputi, pembangunan aula SMAN 1 Pasaman dan pagar sekolah serta alat musik sekolah, fasilitas olahraga maupun aspirasi lainnya

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Zulkenedi Zaid meminta SMAN 1 Pasaman agar segera mengusulkan di tahun 2027 kepadanya, untuk direalisasikan ke dalam pikirnya pada tahun 2028. (bud)



(Foto: Ahmad Budiawan)

ANGGOTA Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Dr. Zulkenedi Said saat menggelar reses perorangan di SMAN 1 Pasaman, Sabtu (22/8).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 26 Agustus 2026 (12 Rabiul Awal 1448 H)	2

RESES PERORANGAN MASA PERSIDANGAN KETIGA

Anggota DPRD Sumbang Indra Catri Tampung Aspirasi Masyarakat Agam

AGAM - SINGGALANG

Anggota DPRD Sumbang Indra Catri melakukan reses perorangan masa persidangan ketiga tahun 2025/2026 yang dilaksanakan di gedung Istana Bung Hatta Bukittinggi, Minggu (23/8).

mendapatkan bantuan dan perhatian dari pemerintah, baik dalam pendanaan juga pembinaan, dapat berkembang seiring perkembangan zaman.

"Kami sangat berharap adanya support anggaran dana dari pemerintah agar program pembinaan dan momen yang diikuti dibantu sesuai kebutuhan, supaya dapat diikuti secara berkelanjutan," katanya.

Dalam momen tersebut juga adanya aspirasi masyarakat Malalak Timur yang menghenikan kelanjutan program pembangunan normalisasi sungai yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan masyarakat dari aliran sungai untuk mengairi sawah masyarakat.

"Aliran air sungai tidak sampai ke irigasi yang ada, karena kondisi sungai rusak

dan memprihatinkan hingga saat ini," katanya.

Demikian juga dari adanya harapan masyarakat Agam untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat nagari melalui badan usaha nagari atau Bumrag.

"Kini tidak lagi berjalan lancar, karena minimnya bantuan dan pembinaan dari pihak berkompeten," katanya.

Waluhagari Lasi Adri juga mengeluhkan kondisi jalan usaha tani yang belum maksimal terwujud, sehingga dibutuhkan dana yang memadai untuk mewujudkan dalam mendorong percepatan peningkatan ekonomi masyarakat.

Warga Batu Taba Ampok Angkek juga berharap jembatan yang diperbaiki lagi untuk kelancaran transportasi di daerah tersebut.

Dalam kegiatan itu, Indra

Catri akan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dari kepentingan sarana dan prasarana masyarakat juga meningkatkan pemberdayaan sumber dana manusia.

"Meski saya tidak memiliki anggaran yang memadai dalam program tersebut, akan tetapi akan dicari solusi, sehingga dapat dipenuhi walau tidak banyak yang bisa dibantu," katanya.

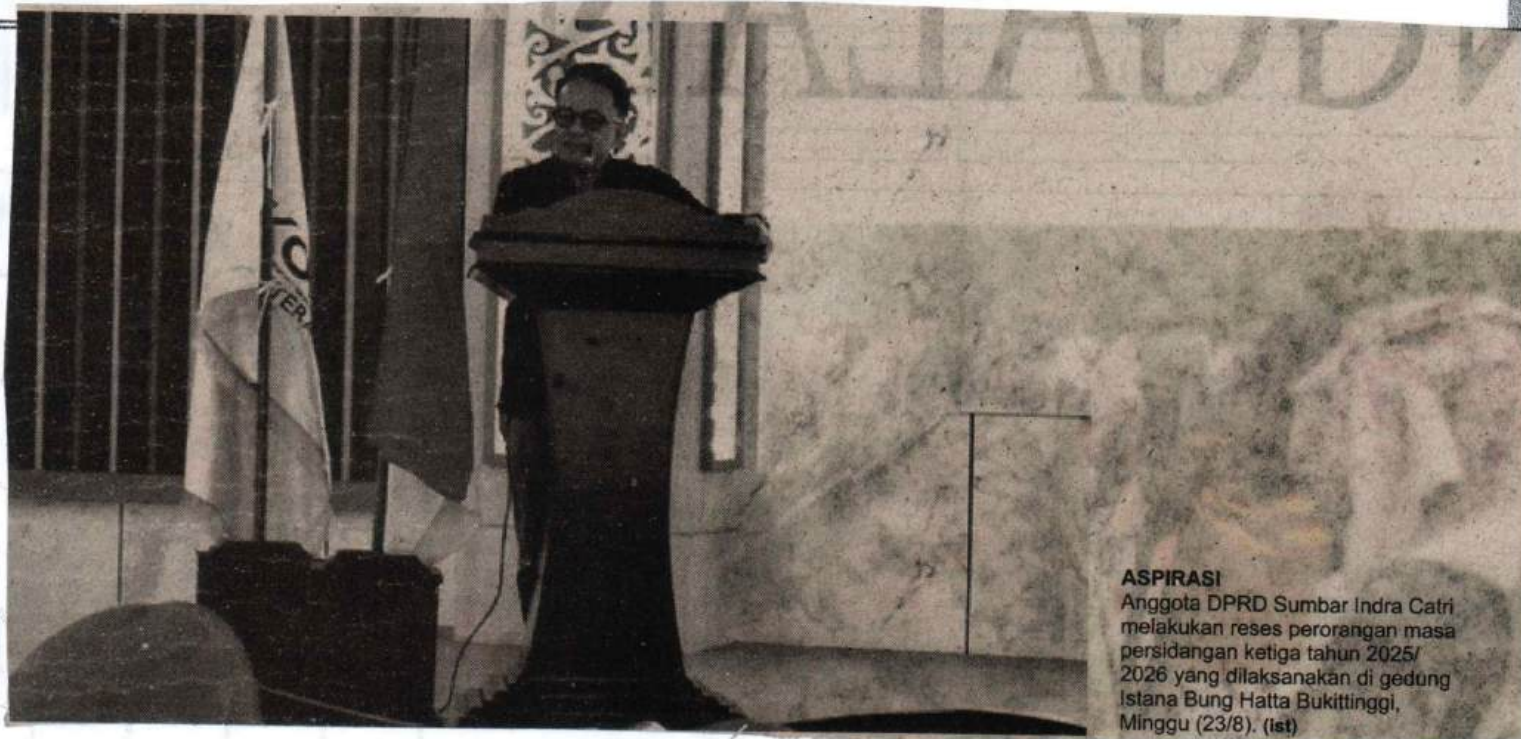
Semua aspirasi masyarakat dicatat dan dilaporkan kepada pihak berkompeten untuk memenuhi sesuai kebutuhan masyarakat.

"Mudah-mudahan harapan dan keluhan yang disampaikan masyarakat dalam mendorong percepatan peningkatan pembangunan sesuai yang diinginkan," katanya. (210)



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



ASPIRASI

Anggota DPRD Sumbar Indra Catri melakukan reses perorangan masa persidangan ketiga tahun 2025/2026 yang dilaksanakan di gedung Istana Bung Hatta Bukittinggi, Minggu (23/8). (Ist)





KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 26 Agustus 2026 (12 Rabiul Awal 1448 H)	4

Komisi V Pelajari Tata Kelola Sektor Olahraga Sumsel

PALEMBANG - SINGGALANG

Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mempelajari tata kelola pembinaan dan pengembangan olahraga di Sumatera Selatan, mulai dari pola pembinaan atlet, pengembangan olahraga prestasi hingga penguatan kelembagaan.

Studi komparatif ini juga menjadi bagian dari upaya Komisi V mencari referensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Keolahragaan Sumbar.

Kunjungan kerja tersebut dilakukan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Selatan, baru-baru ini. Rombongan Komisi V DPRD Sumbar disambut Kepala Dispora Provinsi Sumatera Selatan, M. Alfajri Zabidi.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum untuk menggali pengalaman Sumatera Selatan dalam mengelola sektor olahraga, terutama terkait pola pembiayaan dan penganggaran yang dapat mendukung pembinaan atlet serta pelaksanaan berbagai kegiatan olahraga.

"Kita juga mempelajari pola penganggaran agar tidak terhambat regulasi dan berdampak pada sektor pengembangan dan event keolahragaan," kata Lazuardi.

Menurutnya, pengembangan olahraga tidak cukup hanya berbicara mengenai prestasi atlet. Tata kelola kelembagaan, sistem pembinaan yang berkelanjutan, dukungan sarana dan prasarana, serta kepastian pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem olahraga yang mampu melahirkan atlet berprestasi.

Karena itu, Komisi V menggali informasi mengenai pola pembinaan atlet, pengembangan olahraga prestasi, hingga tata kelola kelembagaan yang diterapkan di Sumatera Selatan.

Pengalaman tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam penyusunan kebijakan olahraga di Sumbar.

Lazuardi mengatakan, studi komparatif tersebut penting dilakukan agar kebijakan yang disusun dalam Ranperda Keolahragaan tidak berhenti pada aspek regulasi, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata dalam pengembangan olahraga di daerah.

"Kita ingin mendapatkan gambaran bagaimana tata kelola olahraga yang berjalan di daerah lain, termasuk bagaimana pembiayaan dan pembinaan atlet dilakukan. Ini akan menjadi referensi bagi kita dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan Sumatera Barat," ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi V berharap model pengelolaan yang diterapkan Sumatera Selatan dapat menjadi salah satu referensi yang kemudian disesuaikan dengan kondisi, kemampuan anggaran, serta potensi olahraga Sumbar.

Dengan tata kelola yang lebih baik, pembinaan atlet diharapkan tidak dilakukan secara sporadis, tetapi terencana sejak pembibitan, pembinaan, hingga peningkatan prestasi. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi atlet Sumbar dapat berkembang secara maksimal dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Selain pertukaran informasi, kunjungan tersebut juga diarahkan untuk membuka ruang komunikasi dan kerja sama antarlembaga dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga.

Sementara itu, Kepala Dis-

pora Provinsi Sumatera Selatan, M. Alfajri Zabidi, menyambut baik kunjungan Komisi V DPRD Sumbar. Menurutnya, pertukaran informasi dan pengalaman antardaerah penting untuk memperkuat kebijakan serta program pembangunan kepemudaan dan olahraga.

Ia berharap sinergi yang terbangun dapat memberikan kontribusi positif terhadap lahirnya generasi muda yang aktif, kreatif, berprestasi, dan memiliki daya saing.

"Kunjungan kerja ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus bertukar informasi, pengalaman, dan strategi dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga di masing-masing daerah," ujarnya.

Menurut Alfajri, kolaborasi antardaerah perlu terus diperkuat agar berbagai program pengembangan pemuda dan olahraga dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Studi komparatif tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Komisi V DPRD Sumbar untuk mendorong lahirnya tata kelola olahraga yang lebih profesional, terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada prestasi. (*)





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



**BREAKING
NEWS!**



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Rabu, 26 Agustus 2026 (12 Rabiul Awal 1448 H)	8

Ridhwan Dt. Tumbijo Siap Bantu SMKN 1 Lubuk Basung

AGAM - Ridwan Dt Tumbijo Anggota DPRD Sumbar menyatakan siap membantu kebutuhan sarana dan prasarana SMKN 1 Lubuk Basung yang dibutuhkan melakukan program atau pikiran yang ada demi kelancaran proses pembelajaran di sekolah setempat.

Hal ini disampaikan saat melakukan Reses Perorangan anggota DPRD Sumbar masa persidangan ketiga tahun 2025 yang dilakukan di Masjid SMKN 1 Lubuk Basung, Senin (24/8).

"Kita mengupayakan mencari solusi terbaik dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan di SMKN 1 Lubuk Basung dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan," katanya Ridhwan.

Menurutnya, kebutuhan yang disampaikan oleh pihak sekolah dan harapan siswa merupakan kebutuhan yang mendesak dan akan dijadikan program utama untuk membantu pihak sekolah sesuai yang diinginkan.

Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam menyalurkan bantuan sarana dan prasarana serta pembinaan lainnya yang dibutuhkan sekolah.

Dalam hal ini, Kepala SMKN 1 Lubuk Basung Verizal menyatakan terima kasih banyak atas respon dan dukungan yang diberikan anggota DPRD Sumbar Ridhwan Dt. Tumbijo, dan berharap terwujud sesuai dengan kondisi yang ada.

"Setidaknya beberapa kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah kebutuhan komputer, kendaraan roda dua untuk praktek siswa, perbaikan gedung PBM dan dukungan lainnya dapat diwujudkan nanti," katanya.

Bagi pihak sekolah, semua keluhan yang disampaikan kepada wakil rakyat tersebut merupakan kebutuhan yang sangat mendesak saat ini untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran di sekolah, dan dukungan dan peningkatan status kepegawaian yang bekerja di sekolah.(210)



RESES - Anggota DPRD Sumbar Ridhwan Dt Tumbijo saat melakukan Reses Perorangan di SMKN 1 Lubuk Basung, Senin (23/8). (ist)

NEWS

BREAKING
NEWS!



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	RABU, 26 AGUSTUS 2026	6

TRASE TOL 'MAKAN' LAHAN PRODUKTIF DAN ULAYAT

Masyarakat Pandai Sikek Mengadu ke DPRD Sumbar

TANAH DATAR, KP - Rencana pembangunan jalan tol yang membelah Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, mendukung penolakan keras dari masyarakat setempat. Khawatir kehilangan ruang hidup dan tanah pusaka, warga mendesak pemerintah segera menga-

lihkan trase agar tidak menggerus permukiman, lahan pertanian produktif, serta tanah ulayat nagari.

Aspirasi penolakan tersebut disampaikan langsung perwakilan Anak Nagari Pandai Sikek, Rahmat Ramadan, saat menyambangi gedung

DPRD Sumatera Barat Kamis lalu (20/8), dan diterima secara resmi oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi.

"Mewakili masyarakat, kami meminta pembangunan tol mencari jalur alternatif yang tidak melewati perumahan warga maupun lahan pertanian. Aspirasi ini sudah kami sampaikan ke DPRD dan diterima langsung Ketua DPRD Sumbar, Bapak Muhidi," tegas Rahmat Ramadan kepada wartawan, Selasa (25/8).

Ia membeberkan, penolakan tegas ini merupakan keputusan mengikat hasil Musyawarah Penghulu Nan Anam Puluh Nagari Pandai Sikek. Para tokoh adat menilai pemaksaan trase di lokasi yang direncanakan berpotensi memicu konflik sosial yang luas serta merusak tatanan kehidupan warga.

Lahan yang rencananya dilalui jalur tol selama ini menjadi tumpuan utama mata pencaharian warga, sementara ketersediaan lahan pertanian produktif di Nagari Pandai Sikek terbilang amat terbatas. Kehilangan petak tanah dipastikan akan melumpuhkan perekonomian masyarakat.

Penetapan trase tol turut memunculkan ancaman pada tanah ulayat yang menopang identitas serta warisan adat Nagari Pandai Sikek. Warga juga mencemaskan dampak pembangunan yang berisiko menggeser pandam pakuburan, sarana ibadah, hingga merusak sumber mata air dan saluran irigasi vital.

"Jika trase tol ini tetap dipaksakan, masyarakat berpotensi kehilangan lahan sekaligus sum-

ber penghidupan mereka," kata Rahmat.

Ia mengingatkan, perlakuan terhadap tanah ulayat tidak bisa disamakan dengan lahan pribadi lantaran menyangkut norma adat. Pemerintah diminta tidak menutup mata dan hanya berpatokan pada kalkulasi investasi serta konektivitas semata.

Secara regulasi, sikap penolakan Musyawarah Penghulu Nan Anam Puluh tersebut memiliki pijakan hukum kuat, seperti Perda Sumbar Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan KAN, Perda Sumbar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, hingga Peraturan Nagari Pandai Sikek Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Adat Salingka Nagari.

Merespons gelombang protes tersebut, Ketua DPRD Sumbar Muhidi memastikan bakal mengkaji secara mendalam aduan masyarakat adat Nagari Pandai Sikek melalui lintas komisi.

"Aspirasi dari masyarakat Pandai Sikek sudah kami terima. Ini akan kita bahas di tingkat DPRD untuk dikaji lebih lanjut, termasuk mencermati persoalan tanah ulayat, permukiman, lahan pertanian, dan hal-hal lain yang menjadi kekhawatiran masyarakat," ujar Muhidi.

Muhidi menegaskan, kajian komprehensif ini krusial dilakukan demi memastikan proyek infrastruktur strategis nasional tetap sejalan tanpa mengorbankan hak-hak dan kepentingan masyarakat terdampak di akar rumput. (fai)

NEWS

BREAKING
NEWS!

143



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



PERWAKILAN Anak Nagari Pandai Sikek, Rahmat Ramadan (kiri), menyerahkan dokumen resmi penolakan trase tol hasil Musyawarah Penghulu Nan Anam Puluh Nagari Pandai Sikek kepada Ketua DPRD Sumbar Muhidi (kanan) di Gedung DPRD Sumbar, Padang, baru-baru ini.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	RABU, 26 AGUSTUS 2026	1

Kelanjutan Tol Padang— Pekanbaru Kembali Tuai Penolakan

TANAH DATAR, HALUAN—Rencana kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang—Pekanbaru kembali menuai penolakan. Kali ini, masyarakat Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar yang meminta pemerintah untuk mengalihkan trase tol yang melewati nagari me-

reka, lantaran dinilai mengancam permukiman, lahan pertanian produktif, dan tanah ulayat.

Perwakilan warga Nagari Pandai Sikek, Rahmat Ramadan menyebutkan, penolakan tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPRD Sumbar, Mu-

hidi pada Kamis (20/8) lalu. Dengan ini, ia berharap persoalan tersebut menjadi perhatian DPRD, pemerintah daerah, dan pihak terkait sehingga dapat dicarikan solusi.

Ia mengatakan, penolakan trase tol ini juga merupakan hasil Musyawarah Penghulu Nan Anam Puluh Nagari Pandai Sikek. Mereka menilai menilai trase tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius jika tetap melewati kawasan permukiman dan tanah ulayat.

Ia menyebut, trase yang bakal dibangun tersebut berada di kawasan permukiman dan lahan pertanian produktif yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. "Jika trase tol ini tetap dipaksakan, masyarakat berpotensi kehilangan lahan sekaligus sumber penghidupan mereka," katanya.

Ketersediaan lahan pertanian produktif di Nagari Pandai Sikek sendiri, ujarnya, relatif terbatas. Oleh karena itu, kehilangan lahan akibat pembangunan tol akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Selain permukiman dan lahan pertanian, trase tol juga menyentuh tanah ulayat. Bagi masyarakat Pandai Sikek, tanah ulayat merupakan bagian dari identitas dan warisan adat yang harus dijaga. Masyarakat juga mengkhawatirkan keberadaan pandam pakuburan dan sarana ibadah di sekitar trase. Pembangunan tol dikhawatirkan mengganggu sumber mata air dan jaringan irigasi yang selama ini menopang kebutuhan warga dan aktivitas pertanian. "Masyarakat yang berada di kawasan terdampak khawatir kehilangan rumah dan lahan pertanian yang selama ini menjadi tempat bergantung hidup," ujarnya.

Rahmat juga mengingatkan potensi konflik horizontal jika pembangunan menyentuh tanah ulayat. Menurutnya, tanah ulayat memiliki karakteristik tersendiri dan tidak dapat diperlakukan sama dengan tanah milik pribadi.

Untuk itu, ia meminta pemerintah tidak hanya mempertimbangkan pembangunan tol dari sisi konektivitas dan investasi, tetapi juga memperhatikan masyarakat adat, tanah ulayat, dan sumber penghidupan warga.

"Sikap menolak trase ini merupakan keputusan resmi Musyawarah Penghulu Nan Anam Puluh Nagari Pandai Sikek. Keputusan ini diambil untuk menjaga kelestarian adat dan syarak, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat. Saya sebagai perwakilan masyarakat telah menyampaikan permasalahan ini ke DPRD dan berharap bisa ditindaklanjuti," ucapnya.

Ia juga menegaskan, keputusan masyarakat adat Pandai Sikek menolak trase tol dan meminta dialihkan ke tempat lain berpedoman pada sejumlah regulasi. Di antaranya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat di Lingkungan KAN, Perda Sumbar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, serta Peraturan Nagari Pandai Sikek Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Adat Salingka Nagari.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengatakan, aspirasi itu akan dibahas di tingkat DPRD Sumbar untuk dikaji lebih lanjut. "Aspirasi dari masyarakat Pandai Sikek sudah kami terima. Ini akan kami bahas di tingkat DPRD untuk dikaji lebih lanjut, termasuk mencermati persoalan tanah ulayat, permukiman, lahan pertanian, dan hal-hal lain yang menjadi kekhawatiran masyarakat," ujar Muhidi.

Ia mengungkapkan bahwa pembahasan tersebut penting agar pembangunan infrastruktur strategis tetap berjalan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang terdampak. (h/len)

KING
WS!

145



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	KAMIS, 27 AGUSTUS 2026	1

KASUS YOGI GILANG

Nanda Satria Minta Hakim Pertimbangkan Realitas Sosial

PADANG, KP — Per-
kara hukum yang men-
jerat Yogi Gilang Arya Se-
tia, warga Sikakap, Kabu-
paten Kepulauan Menta-
wai atas dugaan penju-
alan kembali layanan in-
ternet Starlink, menyita
perhatian Pimpinan DP-
RD Sumatera Barat.

Wakil Ketua DPRD



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria.

Sumbar, Nanda Satria, meminta majelis ha-
kim dan jaksa penuntut umum mempertim-
bangkan realitas sosial serta keterbatasan
akses komunikasi di daerah terpencil da-

lam memutuskan perkara
tersebut.

Data Diskominfo-
tik Sumbar mencatat se-
tidaknya masih terda-
pat 137 titik blank spot
di Sumbar pada 2026.

Dari jumlah terse-
but, Kepulauan Menta-
wai menyumbang ang-
ka terbesar dengan 42

desa yang terisolasi dari jaringan internet.

Nanda menegaskan bahwa pihaknya
tidak bermaksud membenarkan pelanggaran

an regulasi perizinan usaha. Namun, 'aksi nekad'
Yogi setidaknya telah menjadi pencerah dan so-
lusi instan bagi warga Sikakap yang selama ini
terbatas akses informasi dan pendidikan digital.

"Gilang ini memberikan solusi bagi daerah
yang blank spot. Di satu sisi dia membantu ma-
syarakat. Kita sama-sama tahu Mentawai itu dae-
rah yang banyak blank spot-nya. Tanpa bermak-
sud mengganggu proses hukum yang ada, tentu
kami mohon dipertimbangkan dan diberikan ke-
ringanan," kata Nanda Satria, Rabu (26/8).

Politisi muda ini menilai kasus Yogi seharus-
nya menjadi momentum pembenahan bagi pe-
merintah daerah dan pusat. Menurutnya, Keme-
nterian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama
para operator telekomunikasi harus bertindak
cepat menuntaskan ketimpangan infrastruktur
digital di pulau terluar, agar warga tidak mencari
jalan pintas yang berisiko terjerat hukum.

Nanda juga mengingatkan para pelaku usa-
ha untuk melengkapi legalitas administrasi serta
mendorong Pemprov Sumbar memperkuat fung-
si pembimbingan izin usaha di daerah terpencil.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, usa-
ha gigih menembus isolasi sinyal di pelosok Ke-
pulauan Mentawai berujung pahit bagi Yogi Gi-
lang Arya Setia (39 tahun).

Pemuda asal Sikakap yang berniat memer-
dekakan warga dari kawasan blank spot ini justru
harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri
(PN) Padang dan mendekam di Rutan Anak Air ak-
ibat tuduhan penyedia layanan telekomunikasi
tanpa izin.

Tergerak oleh realita getir banyaknya blank-
spot di Mentawai, Yogi memberanikan diri bertin-

dak sejak 2023. Ia memboyong perangkat Star-
link, memasangnya di kediaman pribadi, lalu
membagikan sinyal internet ke rumah-rumah
warga memanfaatkan jaringan MikroTik serta
bentangan kabel optik.

Akses internet tersebut dialirkan dengan
skema berbayar untuk menutup biaya operasio-
nal. Warga dikenakan biaya pemasangan sekitar
Rp500 ribu hingga Rp1 juta, dilanjutkan pembe-
lian voucher kuota berkecepatan tinggi, seperti
paket 2 GB seharga Rp10 ribu.

Namun, Jaksa menjerat Yogi dengan dakwa-
an tunggal Pasal 47 *juncto* Pasal 11 ayat (1) Un-
dang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Te-
lekomunikasi, yang telah diubah melalui Pasal 71
angka 10 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja. Ancaman hukumannya tak main-main. Ku-
rungan penjara maksimal 6 tahun serta denda pa-
ling banyak Rp600 juta.

Romi Martianus, selaku penasihat hukum ter-
dakwa, mempertanyakan konstruksi hukum yang
menyasar kliennya. Ia menegaskan bahwa PT
Mentawai Network Provider tempat Yogi bertin-
dak selaku Komisaris Utama, telah berbadan hu-
kum resmi sejak 2 Oktober 2025 dan menganto-
ngi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menurut Romi, celah kelengkapan adminis-
trasi semestinya diselesaikan lewat mekanisme
pembinaan, bukan mendahulukan pemidanaan.
Ia menyandarkan argumennya pada Pasal 613
UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pi-
dana yang menginduk pada KUHP Nasional. Atu-
ran tersebut menegaskan sanksi atau denda ad-
ministratif wajib diprioritaskan ketimbang vonis
pidana pada tindak pelanggaran sektoral. (fai)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	KAMIS, 27 AGUSTUS 2026	2

Ekonomi Keluarga Sulit, Ketua DPRD Sumbar Dorong Anak Tetap Sekolah Hingga SMA/SMK

EKONOMI sulit jangan sampai menjadi alasan membunuh mimpi anak untuk menngenyam pendidikan tinggi. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menyerukan kepada para orang tua agar terus mengawal pendidikan anak-anak mereka minimal hingga jenjang SMA atau SMK.

Hal tersebut disampaikan Muhidi di hadapan lebih dari 150 warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg), Kota Padang, saat menggelar agenda reses di Masjid Khusnul Khotimah, Jumat (21/8).

Muhidi menegaskan, di tengah era globalisasi yang serba cepat, generasi muda dituntut memiliki keterampilan praktis (skill), penguasaan teknologi, dan kemampuan bahasa asing. Jenjang SMK dinilai menjadi salah satu jalan pintas terbaik untuk mencetak lulusan yang siap pakai dan terserap di dunia industri.

"Walaupun ekonomi sedang sulit sekarang, jangan sampai anak tidak sekolah. Kalau tidak bisa melanjutkan ke SMA, bisa memilih SMK. Perkembangan globalisasi tidak bisa kita tolak, anak-anak harus disiapkan dengan berbagai bekal. Minimal anak-anak kita harus tamat SMA atau SMK," kata Muhidi.

Dalam reses tersebut, pengurus yayasan penanganan anak putus sekolah, Citra, mengeluhkan masih banyaknya anak miskin yang terkendala biaya pengambilan ijazah. Sementara itu, pengurus Karang Taruna Kampung Baru mengusulkan bimbingan teknis dan dukungan sarana program kepemudaan.

Muhidi menyambut hangat seluruh aspirasi tersebut dan berjanji akan mengoordinasikannya bersama pihak sekolah, dinas terkait, serta sektor industri demi membuka peluang kerja bagi lulusan dan mengurai masalah kendala ijazah warga kurang mampu. *





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar Muhidi menyampaikan sambutan saat reses di Masjid Khususul Khotimah, Kelurahan Kampung Baru, Lubuk Begalung.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, saat menyerap aspirasi warga Kelurahan Kampung Baru, Lubuk Begalung.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi berfoto bersama saat reses di Masjid Khususul Khotimah, Kelurahan Kampung Baru, Lubuk Begalung.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan	KAMIS, 27 AGUSTUS 2026	4

PERTIMBANGKAN KONDISI WARGA MENTAWAI

Nanda Satria Minta Yogi Diberi Keringan an Hukum

PADANG, HALUAN — Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria meminta hakim dan jaksa penuntut umum mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dalam menangani perkara Yogi Gilang Arya Setia, warga Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang menjalani proses hukum terkait dugaan menjual kembali layanan internet Starlink.

Nanda mengatakan, proses hukum terhadap Yogi tetap harus dihormati. Namun, perkara tersebut juga perlu dilihat dalam konteks kondisi masyarakat di lapangan, khususnya keterbatasan akses internet yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sumatera Barat, masih terdapat 137 titik blank spot di Sumbar pada 2026. Kepulauan Mentawai menjadi salah satu wilayah yang menghadapi persoalan akses komunikasi cukup besar, dengan blank spot tersebar di 42 desa.

"Kalau secara regulasi tentu kita tidak bisa kesampingkan bahwa dia salah. Kita tidak mau membenarkan itu juga," kata Nanda.

Namun demikian, sambung Nanda, aktivitas Yogi setidaknya telah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Sikakap yang berada di wilayah dengan keterbatasan jaringan telekomunikasi.

"Yogi ini memberikan solusi bagi daerah yang blank spot, dia membantu masyarakat. Kita

sama-sama tahu Mentawai itu daerah yang banyak blank spotnya," ujarnya.

Karena itu, Nanda berharap kondisi ini menjadi salah satu konteks yang dipertimbangkan dalam proses hukum Yogi. Menurutnya, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi membuat sebagian masyarakat di daerah terpencil harus men-

cari alternatif untuk mendapatkan akses internet.

"Tanpa bermaksud mengganggu proses hukum yang ada, kita berharap ini bisa menjadi pertimbangan dan Yogi ini bisa diberikan keringanan," katanya.

Di sisi lain, Nanda menegaskan permintaan keringanan tersebut bukan berarti membenarkan kegiatan usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat maupun pelaku usaha, terutama mereka yang menjalankan aktivitas ekonomi di wilayah dengan keterbatasan akses layanan.

"Kalau bisa, pembimbingan dari pemerintah yang perlu kita kuatkan," ujarnya.

Ia juga mengatakan, masih banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan sebelum seluruh proses administrasi dan perizinannya selesai. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diantisipasi melalui pembinaan dan pemberian pemahaman sejak awal.

"Kalau kita mau buka-bukaan, berapa banyak pengusaha yang menjalankan usahanya dulu baru mengurus izin dan lain-lain. Banyak juga yang seperti itu," katanya.

Dalam hal ini, terhadap pelaku usaha ia mengingatkan agar tetap memenuhi ketentuan hukum dalam menjalankan usaha. Legalitas dan kelengkapan perizinan, menurutnya,

**BREAKING
NEWS!**

149



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

harus menjadi bagian dari kesadaran dalam menjalankan usaha.

“Kesadaran dalam berusaha itu harus legal. Ini mulai harus dikuatkan dari sekarang,” tegasnya.

Lebih jauh, Nanda menilai perkara Yogi juga menunjukkan adanya persoalan terkait pemerataan infrastruktur digital di Sumatera Barat. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun seluruh infrastruktur telekomunikasi.

Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), bersama penyedia layanan telekomunikasi, memperluas jangkauan internet ke wilayah kepulauan, pedalaman, dan daerah yang belum terjangkau layanan secara optimal.

“Amat sayang kalau misalnya masih ada daerah-daerah yang blank spot. Kita selalu suarakan itu, baik ke Komdigi ataupun ke DPR RI, bagaimana agar semua daerah di Sumatera Barat tidak ada lagi blank spot-nya,” ujar Nanda.

Dikatakannya, internet kini bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, tetapi telah menjadi kebutuhan masyarakat untuk pendidikan, aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga komunikasi.

“Anggaran kita di daerah juga sangat terbatas. Karena itu, kita mendorong pemerintah pusat untuk lebih aktif memberikan perhatian kepada daerah-daerah supaya ada keadilan akses bagi semua masyarakat,” katanya.

Bagi Nanda, perkara Yogi seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki dua persoalan sekaligus. Masyarakat dan pelaku usaha perlu memahami pentingnya menjalankan kegiatan sesuai ketentuan hukum, sementara pemerintah harus memastikan kebutuhan



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria

masyarakat terhadap akses internet dapat dipenuhi secara merata.

Kasus Yogi Gilang Arya Setia bermula ketika ia membeli perangkat internet satelit Starlink untuk dipasang di wisma milik orang tuanya di Desa Sikakap pada 2024.

Minimnya sinyal telekomunikasi di Sikakap kemudian membuat warga, instansi pemerintah, BUMN, hingga kantor kepolisian setempat memanfaatkan koneksi internet di lokasi tersebut.

Melihat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi, Yogi kemudian mengembangkan jangkauan jaringan dan mendirikan PT Mentawai Network Provider. Melalui perusahaan tersebut, Yogi menjalankan kegiatan penjualan kembali layanan internet Starlink.

PT Mentawai Network Provider disebut telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dari pemerintah pusat pada 2 Oktober 2025. Sementara sejumlah izin operasional pendukung lainnya masih dalam proses.

Pada 22 Oktober 2025, Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menerbitkan Laporan Polisi (LP) Model A terkait dugaan usaha telekomunikasi tanpa izin. Yogi kemudian ditangkap dan ditahan sejak 8 Juli 2026.

Kuasa hukum Yogi, Romi Martianus menilai, terdapat sejumlah persoalan dalam proses hukum yang dijalani kliennya, mulai dari tahap penyidikan hingga perkara diperiksa di pengadilan.

Menurut Romi, penggunaan LP Model A dinilai tidak tepat. Ia juga menilai keberadaan NIB menunjukkan adanya iktikad pihak Yogi untuk menjalankan kegiatan usaha secara legal.

“Ada tiga kejanggalan yang kami lihat. Penggunaan LP Model A dinilai tidak tepat karena biasanya diperuntukkan bagi kasus pidana berat seperti narkoba, pembunuhan, atau korupsi, sementara usaha Yogi memiliki iktikad baik lewat kepemilikan NIB,” ungkap Romi.

Romi juga mempersoalkan

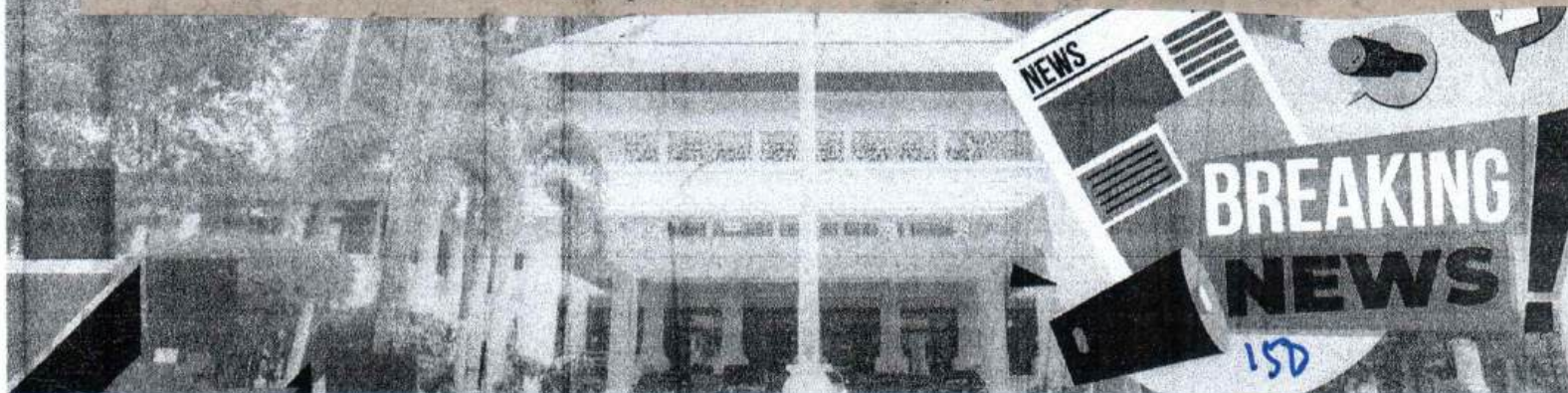
subjek hukum dalam perkara tersebut. Menurutnya, saat laporan polisi diterbitkan pada 22 Oktober 2025, Yogi telah berstatus sebagai Komisaris Utama PT Mentawai Network Provider.

Selain itu, ia menyebut penyidik melakukan penyitaan terhadap aset atas nama pribadi Yogi, bukan atas nama PT Mentawai Network Provider yang menyelenggarakan layanan tersebut.

“Kami menganggap ini cacat formil,” ujarnya.

Romi berpendapat perkara tersebut semestinya diselesaikan melalui mekanisme administratif, bukan pidana. Menurutnya, ketentuan UU Telekomunikasi yang disangkakan berkaitan dengan aspek perizinan.

Atas dasar itu, kuasa hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Yogi yang saat ini ditahan di Rutan Anak Air Kota Padang. Permohonan tersebut juga didasarkan pada pertimbangan agar akses internet yang dibutuhkan warga Mentawai tidak terputus. (h/len)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Mempertahankan Kehidupan Masyarakat	KAMIS, 27 AGUSTUS 2026	8

RESES KE SMAN 12 PADANG

Wakil Ketua DPRD Sumbar Perjuangkan Fasi- litas Sekolah Pascabanjir

PADANG, HALUAN — Sebagai salah satu sekolah yang terdampak parah bencana hidrometeorologi pada 27 November lalu, SMA Negeri 12 Nanggalo, Padang memerlukan perbaikan sarana dan prasarana.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, turun langsung menjemput aspirasi pihak sekolah pada Jumat (21/8). Pertemuan terse-

but berlangsung dalam rangkaian reses perseorangan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025-2026.

Kepada Evi Yandri, seorang guru meminta bantuan pengadaan mobiler berupa meja, kursi, dan loker guru.

"Kami memerlukan meja dan kursi baru, Pak. Fasilitas yang lama sudah tidak layak pakai karena terendam lumpur saat banjir bandang kemarin," ujar guru tersebut.

Bencana November lalu memang tidak hanya merendam SMAN 12 Padang dengan air, tetapi juga menyisakan endapan lumpur yang tebal di area sekolah.

"Saat pembersihan lumpur pascabencana, Pak Evi langsung datang meninjau ke sini. Kami sangat berterima kasih atas kepedulian beliau. Tahun ini, kami juga menerima bantuan laptop dari dana pokok pikiran (pokir) Pak Evi," kata guru lainnya.

SMAN 12 Padang tercatat sering terdampak banjir, termasuk pada 3 Agustus lalu, namun untung air cepat surut.

Namun, banjir pada November menjadi yang terparah karena material lumpur terbawa.

"Pak, mohon dicarikan solusi agar sekolah dan jalan akses ke sini tidak banjir lagi. Kami kesulitan untuk datang belajar," keluh salah seorang siswa.

Selain banjir, keluhan mengenai krisis air bersih juga mencuat dalam pertemuan tersebut.

"Air sekolah keruh dan berbau besi. bahkan kadang tidak ada air. Padahal sangat dibutuhkan untuk berwudu dan keperluan toilet," ungkap seorang siswi.

Pihak sekolah membenarkan kendala tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi seribu lebih siswa dan guru,

sekolah telah membuat empat sumur bor dengan kedalaman hingga 60 meter. Namun, air yang keluar tetap keruh.

"Kalau menggunakan layanan PDAM airnya jernih, tetapi alirannya sering mati sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan sekolah," jelas salah seorang guru.

Persoalan lain yang dihadapi sekolah adalah ketiadaan lapangan olahraga yang memadai. Lahan lapangan yang ada saat ini sebagian besar sudah terpakai untuk pembangunan gedung baru.

"Tahun 2027 kami, menghadapi penilaian akreditasi sekolah. Tanpa lapangan olahraga yang layak, nilai akreditasi kami terancam turun," keluh guru olahraga.

Akibat keterbatasan fasilitas ini, terkadang siswa terpaksa mengikuti materi jam olahraga di dalam ruang kelas. Sementara

untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti futsal dan basket, siswa terpaksa menyewa lapangan di luar sekolah dengan biaya mandiri.

"Sewa lapangan futsal mencapai Rp200 ribu per jam. Kasihan siswa yang punya semangat tinggi untuk berolahraga," tambahnya. Siswa juga berharap mendapat bantuan alat penunjang ekstrakurikuler seperti alat musik tradisional talempong dan tenda PMR.

Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Evi Yandri meminta pihak sekolah segera menyusun perencanaan pembangunan yang matang.

"Harus ada master plan yang jelas. Jangan sampai saat kepala sekolah berganti, kebijakannya ikut berubah. Itu akan menyulitkan pembangunan," tegas Evi.

Evi berjanji akan membawa persoalan fisik, pengadaan



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRO KL

mobiler, fasilitas lapangan, hingga penyediaan air bersih ini untuk dibahas bersama Dinas Pendidikan Sumbar untuk memastikan anggaran pemenuhannya secara bertahap.

Di akhir pertemuan, Evi Yandri sempat menguji respons siswa mengenai kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh siswa kompak meminta program tersebut diteruskan, meski mereka memberikan catatan kritis terkait kualitas makanan.

"Kami ingin program ini lanjut, Pak. Namun kualitasnya harus diperbaiki. Menunya jangan telur terus-menerus, dan kebersihannya harus dijaga," ujar seorang siswa berseloroh.

Selain siswa dan guru, pada pertemuan itu juga turut hadir Kabid pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumbar, Mahyan, pengawas sekolah dan Sekcam Nanggalo. (*)



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman saat reses di SMA Negeri 12 Nanggalo, Padang



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman



KEGIATAN reses Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman di SMA Negeri 12 Nanggalo, Padang





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG JUMAT, 28 AGUSTUS 2026		4

KASUS VIDEO ASUSILA

Nofrizon Desak Tes Psikologi Pejabat



NOFRIZON

PADANG, KP

- Kasus dugaan video asusila yang menyeret Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berinisial C menuai sorotan. Anggota DPRD Sumatera Barat Fraksi PPP

Nofrizon menilai, program Subuh Mubarakah dan wirid rutin bagi pejabat setempat gagal membentuk moral serta integritas.

"Sangat disayangkan jika kegiatan keagamaan tersebut hanya rutinitas seremonial belaka. Kegiatan keagamaan seharusnya tercermin dalam perilaku sehari-hari pejabat publik," kata Nofrizon, Kamis (27/8).

Menurutnya, pembinaan moral aparatur dinilai membutuhkan pendekatan lain di luar agenda keagamaan. Oleh karena itu, Nofrizon mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menerapkan tes psikologi bagi seluruh pejabat eselon II dan III. Ujian ini bertujuan mengukur kepribadian, karakter, dan integritas mereka di luar urusan administratif.

"Pejabat eselon dua dan tiga memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin instansi. Mereka juga memikul beban menjaga nama baik institusi pemerintahan di mata masyarakat," kata Nofrizon,

Meski demikian, ia meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi kasus video asusila yang melibatkan oknum pejabat dan ASN Pemprov Sumbar itu.

"Kepastian hukum tetap harus menunggu hasil pemeriksaan resmi dari aparat yang berwenang," pungkasnya. (fai)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	JUMAT, 28 AGUSTUS 2026	2

Komisi II DPRD Sumbar Matangkan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

KOMISI II DPRD Sumatera Barat mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani melalui Focus Group Discussion pada Rabu (26/8). FGD tersebut digelar untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Ranperda agar sesuai dengan kondisi riil petani di lapangan.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan OPD Pemprov Sumbar, kepala dinas pertanian kabupaten dan kota, akademisi perguruan tinggi, lembaga profesi, serta organisasi sektor pertanian.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Khairuddin Simanjuntak menegaskan perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi salah satu fokus utama komisinya.

"Dalam tahapan penyusunan Perda ini kami mengundang seluruh stakeholder dan pemerhati pertanian untuk memberikan masukan terhadap Ranperda yang tengah dibahas," ujar Khairuddin.

Ia menjelaskan, penyusunan Perda ini telah melalui serangkaian tahapan, mulai dari pembahasan bersama dinas terkait, penyerapan

aspirasi petani di daerah, studi banding, hingga konsultasi ke kementerian.

Melalui Perda ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki payung hukum yang kuat untuk mendukung petani, baik dalam penyediaan sarana prasarana maupun penganggaran yang berpihak pada kesejahteraan.

"Kita berharap para petani bisa terlindungi dengan adanya Perda ini. Contohnya, kalau gagal panen ada asuransi yang membantu petani," kata Khairuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria menilai regulasi ini sangat krusial mengingat pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Ia menyebutkan bahwa petani daerah masih dihadapkan pada keterbatasan modal, akses sarana produksi, teknologi, serta risiko fluktuasi harga komoditas.

"Ranperda ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi petani Sumatera Barat dalam memperoleh perlindungan dari risiko gagal panen, fluktuasi harga, hingga bencana alam," kata Nanda.

Ia menambahkan, Perda ini nantinya juga memuat kemudahan akses pembiayaan, asuransi pertanian, penguatan kelembagaan, penyuluhan, serta perbaikan sistem pemasaran hasil tani. *

NEWS

BREAKING
NEWS!

154



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



SUASANA FGD pembahasan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang digelar Komisi II DPRD Sumatera Barat bersama jajaran OPD dan pemangku kepentingan pertanian di Padang, Rabu (26/8).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar JUMAT, 28 AGUSTUS 2026		9

Renja, Instrumen Efektivitas Program Kerja

Laporan
HANDI YANUAR

Harian Rakyat Sumbar
Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan perlu disusun Rencana Kerja (Renja) berisikan rencana anggaran, target capaian kinerja, serta langkah-langkah pelaksanaannya dalam kurun waktu tertentu.

"SESUAI dengan PP 12 Tahun 2018, dalam rangka memastikan tercapainya target yang ditetapkan secara efektif, efisien, terencana dan

sistimatis," kata Muhidi, saat rapat paripurna Penetapan Rencana Kerja DPRD tahun 2027, di ruang sidang utama, Kamis, (27/8).

Ia melanjutkan, selain sebagai dokumen perencanaan, Renja juga merupakan instrumen untuk mengukur kinerja serta efektivitas dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.

"DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Renja ta-

hunan," ucapnya.

Ia menyebutkan, Renja DPRD akan menjadi pedoman penyusunan kegiatan dan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

"Sesuai Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Renja DPRD disusun, dikoordinasikan, disinkronisasikan oleh Badan Musyawarah berdasarkan Renja masing-masing alat kelengkapan DPRD," ungkapnya.

Ia mengakhiri, telah ditetapkan Renja DPRD tahun 2027, ma-

ka DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki dokumen perencanaan program dan kegiatan dan target kinerja yang akan dicapai untuk tahun 2027. Keputusan DPRD tersebut diberi Nomor: 15/SB/2027 tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2027.

"Tentu kita berharap, pelaksanaan program dan kegiatan DPRD dan alat kelengkapan DPRD, dapat lebih terencana, sistimatis dan target kinerja yang jelas," pungkas Muhidi, didampingi wakil ketua Evi Yandri dan Nanda Satria.



KETUA DPRD Provinsi Sumbar Muhidi, didampingi wakil ketua Evi Yandri dan Nanda Satria, saat memimpin rapat paripurna, Kamis, (27/8).



KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Rakyat Sumbar JUMAT, 28 AGUSTUS 2026		9

Akomodir Laporan Reses dalam Penyusunan RKPD

DPRD Sumbar
Gelar Paripurna
Penyerahan
Laporan Reses Masa
Persidangan Ketiga

Padang, Rakyat Sumbar — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mengatakan laporan reses masa persidangan ketiga tahun 2025/2026, supaya terakomodir menjadi bahan masukan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), sebagai bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD dan rencana anggaran Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kami minta kepada masing-masing Komisi untuk dapat mengawal dan menindaklanjutinya melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masing-masing mitra kerja Komisi," kata Muhidi, saat memimpin rapat paripurna agenda Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Ketiga tahun 2025/2026, di ruang sidang utama, Kamis, (27/8).

Ia melanjutkan, reses masa sidang ketiga tahun 2025/2026 telah dilaksanakan sejak tanggal 18 sampai dengan 24 Agustus 2026, sesuai dengan agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"DPRD berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan reses dan laporan kinerjanya selama masa persidangan tersebut di hadapan rapat paripurna DPRD, dalam rangka akuntabilitas, transparansi serta pertanggungjawaban moral dan politis diakhir masa persidangan,"



FOTO - FOTO : HANDIYANUAR/RAKYATSUMBAR

KETUA DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menyerahkan laporan reses masa sidang ketiga tahun 2025/2026 kepada Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, saat rapat paripurna di ruang sidang utama, Kamis, (27/8).

ucap Muhidi.

Menurut Muhidi, pelaksanaan reses telah ditampung berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Aspirasi berupa usulan yang baru, maupun mengingatkan kembali usulan sebelumnya yang belum ditindak lanjuti dalam program pembangunan daerah.

"Aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu merupakan tugas dan tanggung-jawab kita bersama untuk memperjuangkannya,

baik bagi Anggota DPRD, maupun bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, bagaimana aspirasi masyarakat bisa ditampung dalam program pembangunan daerah," ungkapnya.

Pada rapat tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga mengagendakan rapat paripurna Penetapan Rencana Kerja DPRD tahun 2027 dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025/2026 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2026/2027.

DPRD Provinsi Sumatera Barat pun menetapkan Rencana

Kerja (Renja) tahun 2027. Keputusan DPRD tersebut diberi Nomor:15/SB/2027 tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2027.

"Telah ditetapkan Renja DPRD tahun 2027, maka DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki dokumen perencanaan program, kegiatan dan target kinerja yang akan dicapai tahun 2027. Tentu kami berharap, pelaksanaan program DPRD dan alat kelengkapan DPRD, dapat lebih terencana, sistematis dan target kinerja yang jelas," pungkas Muhidi. (*)

BREAKING
NEWS!

157



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORA

AMAN



KETUA DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi, didampingi para wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satria, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, berfoto bersama saat rapat paripurna di ruang sidang utama, Kamis, (27/8).



KETUA DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi, memimpin didampingi para wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satria, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, saat memimpin rapat paripurna di ruang sidang utama, Kamis, (27/8).



SEJUMLAH anggota DPRD Provinsi Sumbar saat mengikuti rapat paripurna di ruang sidang utama, Kamis, (27/8).



SEKRETARIS DPRD Sumbar Maifrizon menyampaikan rangkuman kinerja DPRD masa sidang ketiga tahun 2025/2026 saat rapat paripurna di ruang sidang utama, Kamis, (27/8).

NEWS

**BREAKING
NEWS!**

158



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG JUMAT, 28 AGUSTUS 2026		8

Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025-2026

DPRD Sumbar Sampaikan Laporan Reses dan Kinerja

PADANG, METRO

Masa persidangan ketiga tahun 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), ditutup dalam rapat paripurna pada Kamis (27/8). Seiring itu pelaksanaan masa persidangan pertama tahun 2026-2027 pun dimulai dengan sejumlah agenda penting yang akan dilaksanakan.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda Satria. Sedangkan dari pihak Pemerintah Provinsi, dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy dan para pimpinan OPD.

"Sesuai dengan agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah, Reses masa sidang Ketiga Tahun 2025/2026 ini, telah dilaksanakan sejak tanggal 18 hingga 24 Agustus 2026," kata Muhidi.

Dari pelaksanaan reses tersebut, ungkap Muhidi, telah ditampung berbagai aspirasi yang di-

sampaikan oleh masyarakat dan Pemda terkait dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, baik aspirasi berupa usulan yang baru, maupun mengingatkan kembali usulan sebelumnya yang belum ditindak lanjuti dalam program pembangunan daerah.

"Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, tentu merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk memperjuangkannya. Laporan dari pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Sumbar Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025/2026, kiranya dapat diakomodir menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD sebagai bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD dan Rencana Anggaran Pemerintah Daerah yang akan datang," ungkap Muhidi.

Selanjutnya, kata Muhidi, dengan berakhirnya masa persidangan ketiga Tahun 2025/2026, maka dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada rapat paripurna ini, DPRD akan menyampaikan laporan atas kinerjanya selama masa persidangan ketiga tersebut.

"Dalam pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah menetapkan Ranperda tentang Penyertaan Modal PT Jamkrida dan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025. Selain itu, juga

ada beberapa Ranperda masih dalam pembahasan," jelas Muhidi.

Selanjutnya, kata Muhidi, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD bersama pemerintah daerah telah melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah daerah dalam

rangka membahas Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026 serta KUA PPAS Tahun 2027 dimana telah ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2026 kemarin,

sedangkan RAPBD Perubahan Tahun 2026 dan RAPBD Tahun 2027 akan dibahas pada masa persidangan pertama tahun 2026/2027.

"Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD melalui komisi-komisi dan Bapemperda, telah melakukan kegiatan rapat-rapat, maupun kunjungan lapangan terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur yang

menjadi peraturan pelaksanaan dari Perda tersebut, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat. Dari pengawasan tersebut, cukup banyak cacatan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan OPD terkait sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya," ungkap dia.

Sementara itu, kata Muhidi, pada masa persidangan Pertama Tahun 2026/2027, cukup banyak agenda penting yang akan kita laksanakan, di antaranya pembahasan ranperda tentang APBD Tahun 2027 dan Perubahan APBD Tahun 2026, pelaksanaan hari jadi Sumbar, beberapa Ranperda serta tugas-tugas lain yang sudah direncanakan dalam Ren-

ja dan Rencana Anggaran DPRD Tahun 2026.

"Persoalannya menjadi tidak mudah, oleh karena banyaknya tugas-tugas yang harus kita kerjakan dan dilakukan berir-

gan ditengah kondisi keuangan daerah yang sulit saat ini. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengatur sedemikian rupa agar semua target kinerja dapat kita wujudkan dan selesaikan dengan baik," tegasnya.

Wahub Sumbar, Vasko Ruseimy menyampaikan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Sumbar atas dedikasi, kerja sama, serta komitmen yang telah dibangun bersama selama masa persidangan ketiga Tahun 2025/2026.

"Berbagai agenda kedewanan telah dapat dilaksanakan melalui proses pembahasan, pengkajian, dan pengambilan keputusan yang mengedepankan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah. Semoga melalui semangat kebersamaan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama, seluruh agenda masa persidangan pertama Tahun 2026/2027 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," tutup dia. (*)

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPIING BERITA



RAPAT paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Muhidi diampingi Wakil Ketua Evi Yandri dan Nanda Satria serta dihadiri Wagub Vasko Ruseimy.



SUASANA rapat paripurna di DPRD Sumbar.



KETUA DPRD Sumbar, Muhidi bersama Wakil Ketua Evi Yandri, Nanda Satria dan Wagub Sumbar, Vasko Ruseimy.



PENYERAHKAN dokumen laporan hasil reses masa Persidangan Ketiga Tahun 2025-2026.



SERAHKAN LAPORAN—Ketua DPRD Sumbar, Muhidi didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda Satria menyerahkan dokumen laporan hasil reses kepada Wagub Sumbar, Vasko Ruseimy.





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Jumat, 28 Agustus 2026 (14 Rabiul Awal 1448 H)	2

MENTAWAI ITU BANYAK BLANK SPOT

Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria Minta Yogi Gilang Diberi Keringanan

PADANG - SINGGALANG

Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, meminta hakim dan jaksa penuntut umum mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dalam menangani perkara Yogi Gilang Arya Setia.

Warga Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut kini menjalani proses hukum terkait dugaan penjualan kembali (reseller) layanan internet Starlink.

Nanda menegaskan bahwa proses hukum terhadap Yogi tetap harus dihormati. Namun, perkara tersebut perlu dilihat dari konteks kondisi di lapangan, khususnya keterbatasan akses internet yang masih melanda sejumlah wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Sumbar, masih terdapat 137 titik blank spot (area buta sinyal) di Sumbar pada 2026. Kepulauan Mentawai menjadi salah satu wilayah dengan kendala akses komunikasi terbesar, yakni mencakup 42 desa.

"Secara regulasi, kita tidak bisa menyangkal bahwa dia bersalah. Kita tidak berniat membenarkan tindakan tersebut," kata Nanda.

Namun, Nanda melanjutkan, aktivitas Yogi setidaknya telah menjadi solusi alternatif bagi masyarakat Sikakap yang berada di wilayah terisolasi jaringan telekomunikasi.

"Yogi memberikan solusi di daerah blank spot. Dia membantu masyarakat karena kita tahu Mentawai adalah daerah yang minim sinyal," ujarnya.

Oleh karena itu, Nanda berharap kondisi geografis ini dipertimbangkan dalam proses hukum. Keterbatasan infrastruktur membuat masyarakat di daerah



NANDA SATRIA

terpencil terpaksa mencari alternatif demi mendapatkan akses internet.

"Tanpa bermaksud mengintervensi hukum, kita berharap ini menjadi pertimbangan agar Yogi bisa diberikan keringanan," tuturnya.

Di sisi lain, Nanda menegaskan bahwa permohonan keringanan ini bukan berarti melegalisasi usaha tanpa izin. Menurutnya, pemerintah justru perlu memperkuat pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha di wilayah terpencil. "Pembimbingan dari pemerintah yang harus kita perkuat," ucapnya.

Ia menambahkan, fenomena pelaku usaha yang beroperasi sebelum izin administrasi rampung masih marak terjadi. Kondisi ini harus diantisipasi melalui edukasi sejak dini.

"Jika mau jujur, banyak pengusaha yang menjalankan bisnisnya terlebih dahulu baru mengurus izin. Fenomena seperti itu nyata ada," katanya.

Meski demikian, ia tetap mengingatkan para pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan hukum. Legalitas dan kelengkapan izin wajib menjadi landasan utama dalam berbisnis. "Kesadaran untuk berbisnis secara legal harus diperkuat dari sekarang," tegas Nanda.

Lebih lanjut, Nanda menilai kasus Yogi menjadi alarm terkait

belum meratanya infrastruktur digital di Sumbar. Ia mengakui pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun seluruh fasilitas telekomunikasi.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah pusat, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta penyedia layanan telekomunikasi, untuk memperluas jangkauan ke wilayah kepulauan dan pedalaman.

"Sangat disayangkan masih ada daerah yang blank spot. Kami selalu menyuarakan hal ini ke Komdigi maupun DPR RI agar Sumatra Barat bebas dari area buta sinyal," kata Nanda.

Ia menegaskan, internet kini bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan pokok masyarakat untuk pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, hingga komunikasi. Keterbatasan APBD membuat daerah sangat bergantung pada intervensi pemerintah pusat agar tercipta keadilan akses informasi.

Bagi Nanda, perkara Yogi harus menjadi momentum perbaikan dua arah: pelaku usaha wajib memahami pentingnya legalitas hukum, sementara pemerintah harus menjamin pemerataan akses internet.

Kronologi Kasus

Kasus Yogi Gilang Arya Setia bermula saat ia membeli perangkat internet satelit Starlink untuk dipasang di wisma milik orang tuanya di Desa Sikakap pada 2024.

Minimnya sinyal di wilayah tersebut membuat warga, instansi pemerintah, BUMN, hingga kantor kepolisian setempat ikut menumpang koneksi internet di lokasi itu.

Melihat tingginya kebutuhan masyarakat, Yogi memperluas jangkauan jaringan dan mendirikan PT Mentawai Network Provider untuk menjual kembali layanan internet Starlink.

Perusahaan tersebut diklaim

telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) dari pemerintah pusat pada 2 Oktober 2025, sementara sejumlah izin operasional pendukung lainnya masih dalam proses pengurusan.

Namun, pada 22 Oktober 2025, Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menerbitkan Laporan Polisi (LP) Model A terkait dugaan usaha telekomunikasi tanpa izin. Yogi kemudian ditangkap dan ditahan sejak 8 Juli 2026.

Kuasa Hukum Sebut Cacat Formil

Kuasa hukum Yogi, Romi Martianus, menilai terdapat sejumlah kejanggalaan dalam proses hukum kliennya, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan.

Menurut Romi, penggunaan LP Model A tidak tepat karena biasanya diperuntukkan bagi kasus pidana berat seperti narkoba, pembunuhan, atau korupsi. Sementara itu, Yogi dinilai memiliki iktikad baik yang dibuktikan dengan kepemilikan NIB.

Romi juga mempersoalkan subjek hukum dalam perkara ini. Saat laporan polisi diterbitkan pada 22 Oktober 2025, Yogi sudah berstatus sebagai Komisaris Utama PT Mentawai Network Provider. Selain itu, penyidik justru menyita aset atas nama pribadi Yogi, bukan atas nama perusahaan penyedia layanan.

"Kami menganggap proses ini cacat formil," ujar Romi.

Ia berpendapat perkara ini semestinya diselesaikan melalui mekanisme sanksi administratif, bukan hukum pidana, karena pasal dalam UU Telekomunikasi yang disangkakan berkaitan dengan aspek perizinan.

Atas dasar itu, kuasa hukum telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Yogi yang saat ini mendekam di Rutan Anak Air Kota Padang. Langkah ini juga diambil agar akses internet warga di Mentawai tidak terputus total. (401)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Berita Timor Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	JUMAT, 28 AGUSTUS 2026	8

GELAR FGD DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN Komisi II Matangkan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

PADANG, HALUAN — Komisi II DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menghimpun masukan dari pemangku kepentingan terkait penyempurnaan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Rabu (26/8).



KETUA Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak

FGD tersebut dihadiri OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar, kepala dinas pertanian kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga profesi, serta sejumlah organisasi yang bergerak di sektor

pertanian.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak mengatakan, perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi perhatian serius Komisi II. Karena itu, berbagai pihak yang berkaitan dengan sektor pertanian dilibatkan dalam proses penyusunan Ranperda tersebut.

"Kami dari Komisi II sangat fokus dengan perlindungan petani. Karena itu, dalam tahapan penyusunan Perda ini kami mengundang seluruh stakeholder dan pemerhati pertanian untuk memberikan masukan terhadap Ranperda yang tengah dibahas," ujar Khairuddin saat diwawancarai usai FGD.

Menurutnya, masukan dari berbagai pemangku kepen-

tingan penting untuk memastikan muatan Ranperda memang sesuai dengan kebutuhan petani. Dengan demikian, Perda yang dihasilkan nantinya dapat memberikan perlindungan sekaligus memperkuat pemberdayaan petani di Sumbar.

Khairuddin menjelaskan, pembahasan Ranperda tersebut telah melalui sejumlah tahapan. Komisi II sebelumnya telah membahasnya bersama OPD terkait, menghimpun masukan dari masyarakat petani di kabupaten/kota, melakukan studi banding ke sejumlah daerah yang telah memiliki regulasi serupa, serta berkonsultasi dengan kementerian terkait.

Ia berharap, Perda yang nantinya lahir dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada petani.

Dukungan tersebut antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Selain itu, Perda ini juga diharapkan dapat mengatur program dan penganggaran yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan petani.

"Kita berharap para petani bisa terlindungi dengan adanya Perda ini. Contohnya, kalau gagal panen ada asuransi yang membantu petani. Kemudian ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai bagi mereka dalam melakukan aktivitas pertanian," tukasnya.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, yang hadir dalam forum tersebut mengatakan, perlindungan dan pemberdayaan petani perlu dituangkan dalam regulasi yang



BERFOTO bersama



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria dan Wakil Ketua Komisi II, Ilson Cong dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan

mampu menjawab persoalan mereka secara menyeluruh.

Menurut Nanda, sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Sumbar. Namun, petani masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses modal, sarana produksi dan teknologi pertanian hingga fluktuasi harga komoditas.

Karena itu, Ranperda ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kapasitas dan daya saing petani melalui program pemberdayaan yang terstruktur dan berkesinambungan.

"Ranperda ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi petani Sumatera Barat dalam memperoleh perlindungan dari risiko gagal panen, fluktuasi harga, bencana alam dan ancaman lainnya, serta meningkatkan kapasitas dan daya saing petani melalui berbagai program pemberdayaan

yang terstruktur dan berkesinambungan," ujar Nanda.

Ia juga menilai dalam hal perlindungan, petani perlu didukung dengan kemudahan akses pembiayaan dan asuransi pertanian, penguatan kelembagaan petani, penyuluhan dan

pelatihan, serta sistem pemasaran hasil pertanian yang lebih baik.

"Harapan kita, dengan hadirnya Perda ini petani Sumatera Barat dapat lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan," katanya. (*)



ANGGOTA Komisi II DPRD Sumbar





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
SINGGALANG	Sabtu, 29 Agustus 2026 (15 Rabiul Awal 1448 H)	4

Sempurnakan Penyusunan Ranperda, DPRD Sumbar Gelar Diskusi Publik

PADANG - SINGGALANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar diskusi publik /focus group discussion (FGD) untuk menghimpun masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat terkait penyempurnaan dua rancangan peraturan daerah (ranperda), Rabu (26/8) di gedung dewan setempat.

Kedua ranperda tersebut yakni ranperda perubahan tentang penyelenggaraan pendidikan serta ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Untuk ranperda perlindungan dan pemberdayaan petani ditanggungjawabinya oleh Komisi II. FGD tersebut dihadiri OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar, kepala dinas pertanian kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga profesi, serta sejumlah organisasi yang bergerak di sektor pertanian.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak mengatakan, perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi perhatian serius Komisi II. Karena itu, berbagai pihak yang berkaitan dengan sektor pertanian dilibatkan dalam proses penyusunan Ranperda tersebut.

"Kami dari Komisi II sangat fokus dengan perlindungan petani. Karena itu, dalam tahapan penyusunan Perda ini kami mengundang seluruh stakeholder dan pemerhati pertanian untuk memberikan masukan terhadap Ranperda yang tengah dibahas," ujar Khairuddin usai FGD.

Menurutnya, masukan dari berbagai pemangku kepentingan penting untuk memastikan muatan Ranperda sesuai dengan kebutuhan petani. Dengan demikian, Perda yang dihasilkan nantinya dapat memberikan perlindungan sekaligus memperkuat keberadaan petani di Sumbar.

Khairuddin menjelaskan, pembahasan Ranperda tersebut telah melalui sejumlah tahapan. Komisi II sebelumnya telah membahasnya bersama OPD Pemprov Sumbar, menghimpun masukan dari masyarakat petani di kabupaten/kota, melakukan studi banding ke sejumlah daerah yang telah memiliki regulasi serupa, serta berkonsultasi dengan kementerian terkait.

Ia berharap, Perda yang nantinya lahir dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada petani.

Dukungan tersebut antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Selain itu, Perda juga diharapkan dapat mengatur program dan penganggaran yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan petani.

"Kita berharap para petani bisa terlindungi dengan adanya Perda ini. Contohnya, kalau gagal panen ada asuransi yang membantu petani. Kemudian ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai bagi mereka dalam melakukan aktivitas pertanian," tukasnya.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, yang hadir dalam forum tersebut mengatakan, per-

indungan dan pemberdayaan petani perlu dituangkan dalam regulasi yang mampu menjawab persoalan mereka secara menyeluruh.

Menurut Nanda, sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Sumbar. Namun, petani masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses modal, sarana produksi dan teknologi pertanian hingga fluktuasi harga komoditas. Karena itu, Ranperda tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kapasitas dan daya saing petani melalui program pemberdayaan yang terstruktur dan berkesinambungan.

"Ranperda ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi petani Sumatera Barat dalam memperoleh perlindungan dari risiko gagal panen, fluktuasi harga, bencana alam dan ancaman lainnya, serta meningkatkan kapasitas dan daya saing petani melalui berbagai program pemberdayaan yang terstruktur dan berkesinambungan," ujar Nanda.

Ia juga menilai perlindungan petani perlu didukung dengan kemudahan akses pembiayaan dan asuransi pertanian, penguatan kelembagaan petani, penyuluhan dan pelatihan, serta sistem pemasaran hasil pertanian yang lebih baik.

"Harapan kita, dengan hadirnya Perda ini petani Sumatera Barat dapat lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan," katanya.

BREAKING NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

Sementara itu, Komisi V melaksanakan FGD terkait ranperda perubahan perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan. FGD ini menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi, mendengar berbagai pandangan, serta merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif dan berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan di Sumbar.

Melalui sinergi antara DPRD, pemerintah, akademisi, tenaga pendidik, serta masyarakat, mari bersama menghadirkan penyelenggaraan pendidikan yang semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan generasi masa depan.

Ketua Komisi V, Lazuardi Erman mengatakan, tujuan pembentukan ranperda perubahan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di antaranya yakni, penguatan pendidiki-

kan karakter yang berbudaya Minangkabau dan budaya lokal sebagai implementasi dari pembelajaran yang mendalam (deep learning).

Kemudian, peningkatan akses, mutu pendidikan, relevansi, daya saing dan literasi baru untuk menyiapkan generasi emas 2045. Peningkatan, penguatan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan vokasi yang diperlukan di masa mendatang.

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga pendidik, serta perlindungan hukum guru, untuk mendukung pendidikan berkarakter. Serta peningkatan penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus yang lebih tepat sasaran.

Beberapa perubahan perda ini dari perda lama diantaranya terkait penekanan pada pembentukan karakter orang Minangkabau dan budaya lokal, sebagai ulama, diplomat, entrepreneur sukses, seniman alamiah.

Kemudian, penekanan pada penyiapan bahasa pengantar resmi kedua, setelah bahasa Indonesia, yakni bahasa untuk komunikasi global; Bahasa Inggris, bahasa

Arab dan Mandarin. Perubahan kurikulum untuk pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan dasar 13 tahun untuk menyiapkan keterampilan budaya lokal dan nasional yang mampu bersaing di pentas global.

"Selain itu juga perlindungan guru dan tenaga kependidikan dari jeratan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya," papar Lazuardi.

Ia mengatakan perdaninor 2 Tahun 2019 yang berlaku saat ini masih lebih banyak mengatur aspek administratif dan belum memberikan perhatian yang cukup terhadap penguatan karakter peserta didik berbasis nilai-nilai lokal Minangkabau.

"Perda yang ada belum secara eksplisit menekankan pembentukan karakter generasi Minangkabau dalam aspek religius, diplomasi, kewirausahaan, dan seni budaya," kata Lazuardi.

Selain itu, DPRD Sumbar juga menilai belum adanya kebijakan strategis yang mendorong penguasaan bahasa internasional sebagai bekal generasi muda menghadapi persaingan global.

Menurut Lazuardi, penguasaan bahasa asing seperti Bahasa Ing-

gris, Arab, dan bahasa internasional lainnya menjadi kebutuhan penting agar lulusan pendidikan di Sumatera Barat memiliki daya saing yang lebih baik.

DPRD Sumbar juga mendorong agar warisan pendidikan tradisional berbasis surau mendapat perhatian lebih dalam regulasi yang baru. Model pendidikan surau dinilai memiliki nilai historis dan filosofis yang kuat dalam membentuk karakter masyarakat Minangkabau.

"Pendidikan berbasis surau merupakan bagian dari identitas masyarakat Minangkabau yang perlu direvitalisasi dan disinergikan dengan sistem pendidikan modern," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan harus dipahami dalam dua dimensi sekaligus, yakni sebagai instrumen peningkatan kualitas ekonomi masyarakat dan sebagai sarana memperluas kesempatan hidup yang lebih baik.

"Pendidikan tidak hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga memperkuat mobilitas sosial dan membentuk karakter generasi muda," katanya.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria memparkan, perubahan atas perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan merupakan langkah strategis pemerintah untuk merevitalisasi sistem pendidikan di Sumbar. Tujuannya, agar penyelenggaraan pendidikan tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar menyentuh substansi mutu dan relevansi.

"Kita ingin memastikan bahwa pendidikan di Sumbar mampu mengintegrasikan kecerdasan global melalui penguasaan bahasa internasional dengan kekokohan jati diri lokal melalui revitalisasi peran surau serta falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," paparnya.

Selain itu ranperda ini diharapkan mampu memberikan jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat, serta perlindungan hukum yang konkret bagi para guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas mulia.

"Dengan komitmen penganggaran yang tepat sasaran dan berorientasi pada pengembangan karakter Minangkabau yang religius, unggul, dan berdaya saing, kita sedang meletakkan fondasi kuat bagi lahirnya generasi emas Sumbar," kata Nanda. (*)

HALAMAN

NEWS

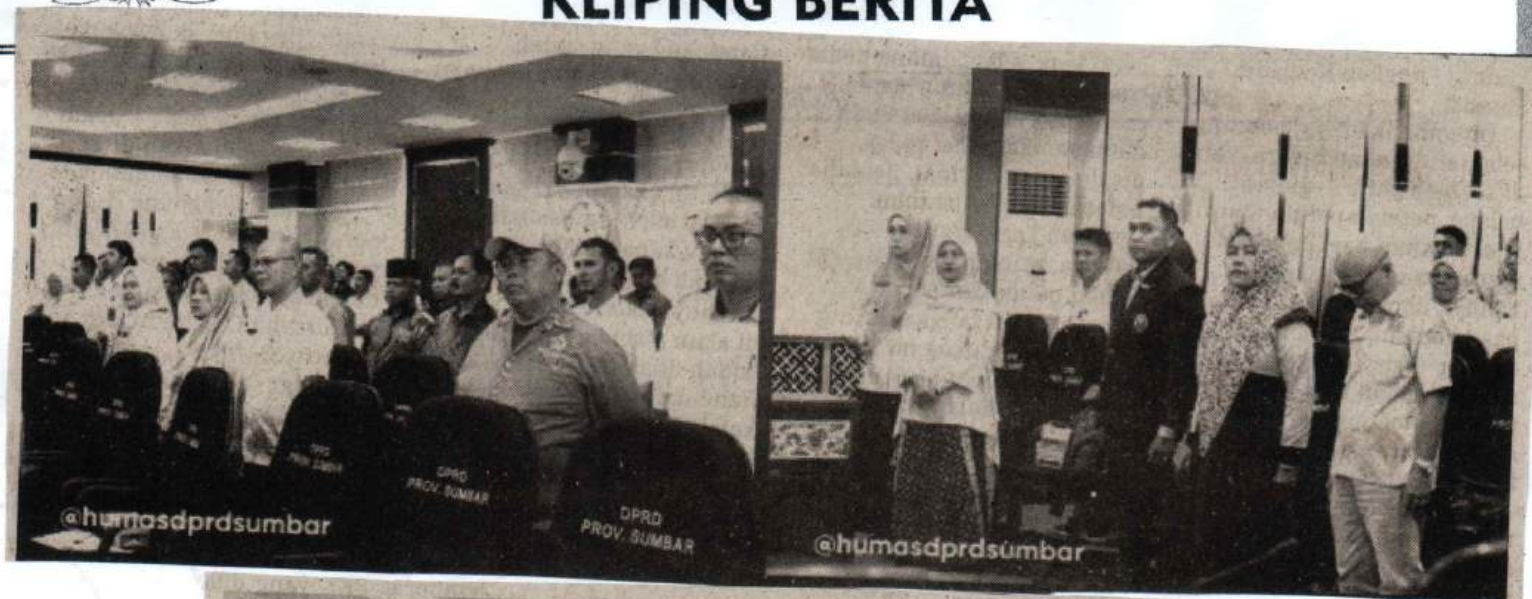
BREAKING
NEWS!

165



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



**BREAKING
NEWS!**

166



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	SABTU, 29 AGUSTUS 2026	4

TUTUP MASA PERSIDANGAN KETIGA 2025/2026

DPRD Sumbar Sam paikan Aspirasi Reses ke Pemprov

PADANG, HALUAN — DPRD Sumatera Barat menutup Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025/2026 sekaligus membuka Masa Persidangan Pertama Tahun 2026/2027 melalui rapat paripurna, Kamis (27/8).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda Satria. Dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hadir Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam kesempatan itu, Muhidi menyampaikan laporan pelaksanaan reses serta kinerja DPRD selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025/2026.

Muhidi mengatakan, sesuai tata kerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai mana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, masa persidangan terdiri atas masa sidang dan masa reses.

"Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka akuntabilitas, transparansi, serta pertanggungjawaban moral dan politis, di akhir masa persidangan DPRD berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan reses dan laporan kinerjanya di hadapan rapat paripurna DPRD," ujarnya.

Ia menyebutkan, sesuai agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan Badan Musyawarah, reses Masa Persidangan Ketiga Tahun

2025/2026 telah dilaksanakan pada 18 hingga 24 Agustus 2026.

Dari pelaksanaan reses tersebut, kata Muhidi, DPRD telah menampung berbagai aspirasi masyarakat terkait kebutuhan penyelenggaraan pembangunan daerah. Aspirasi yang disampaikan mencakup usulan baru maupun usulan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah.

"Aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut menjadi tanggung jawab DPRD untuk memperjuangkannya. Kita akan kawal aspirasi dari masyarakat ini nantinya bisa ditampung ke dalam program pembangunan daerah," katanya.

Aspirasi tersebut, sambung Muhidi, pada hari itu juga telah disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Muhidi menyampaikan bahwa selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025/2026, DPRD juga telah menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni pembentukan peraturan

daerah, anggaran, dan pengawasan.

Dalam fungsi pembentukan perda, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Ranperda tentang Penyeritaan Modal PT Jamikrida dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025.

Sementara itu, Ranperda tentang Jasa Konstruksi, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan masih dalam proses pembahasan di tingkat komisi.

Adapun Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyelesaikan penyusunan naskah akademiknya.

Untuk fungsi anggaran, Muhidi mengatakan DPRD bersama pemerintah daerah telah melaksanakan rapat kerja dalam rangka membahas Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026 serta KUA-PPAS Tahun 2027.

KUA-PPAS tersebut telah



168



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

ditetapkan pada 14 Agustus 2026. Selanjutnya, RAPBD Perubahan Tahun 2026 dan RAPBD Tahun 2027 akan dibahas pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2026/2027.

Sementara dalam fungsi pengawasan, DPRD melalui komisi-komisi dan Bapemperda juga telah melakukan berbagai rapat dan kunjungan lapangan.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan perda dan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana perda, serta mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah

(OPD) yang telah dialokasikan dalam APBD Sumbang.

"Dari pengawasan tersebut, cukup banyak catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah dan OPD terkait sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Kita mendorong itu untuk ditindaklanjuti," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbang, Vasko Ruseimy, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumbang atas dedikasi, kerja sama, serta komitmen yang telah dibangun bersama selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025/2026.

"Berbagai agenda kedewanan telah dapat dilaksanakan melalui proses pembahasan, pengkajian, dan pengambilan keputusan yang mengedepankan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah. Semoga melalui semangat kebersamaan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama, seluruh agenda Masa Persidangan Pertama Tahun 2026/2027 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ucapnya. (adv)

Anggota DPRD Sumbang mengikuti jalannya rapat paripurna



NEWS

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT



Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat memimpin jalannya rapat paripurna



Forkompimda saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Sumbar



Unsur pimpinan DPRD menyerahkan laporan hasil reses kepada pemerintah daerah yang diterima Wakil Gubernur Sumbar, Vasko

**BREAKING
NEWS!**



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KURUNG BERTITA

HALAMAN



Foto Bersama



Anggota DPRD Sumbar dalam rapat paripurna yang dilaksanakan





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG	SABTU, 29 AGUSTUS 2026	6

DPRD Sumbar Tetapkan Renja 2027 dan Serahkan Hasil Reses kepada Pemprov

DPRD Provinsi Sumatera Barat secara resmi menetapkan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2027 sekaligus menyerahkan secara lengkap berkas aspirasi hasil reses anggota dewan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penyerahan dokumen strategis tersebut diproyeksikan sebagai tumpuan utama penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar di ruang sidang utama gedung dewan, Kamis (27/8). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda Satria. Agenda ini dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruesimy, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, pimpinan BUMD, hingga jajaran direksi PT Bank Nagari.

Selain penetapan Renja 2027, paripurna sekaligus merangkum laporan hasil reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025/2026 yang dijemput para anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing pada 18–24 Agustus.

Momen ini menandai pula penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025/2026 dan pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2026/2027.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa penyusunan Renja DPRD merupakan amanat Pasal 45 ayat (1) PP Nomor 12

Tahun 2018 yang dikoordinasikan oleh Badan Musyawarah (Banmus) bersama seluruh alat kelengkapan dewan. Dokumen ini menjadi navigasi utama dalam mengawal fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan secara transparan dan akuntabel.

"Seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses harus dikawal dan diperjuangkan agar dapat diakomodir sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah," tegas Muhidi.

Selama Masa Persidangan Ketiga (30 April–27 Agustus 2026), DPRD Sumbar tercatat telah mengesahkan Ranperda Penyertaan Modal PT Jamkrida dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Sementara Ranperda Jasa Konstruksi, Perlindungan Petani, dan Perubahan Perda Pendidikan masih bergulir dalam pembahasan. Di bidang anggaran, persetujuan Perubahan KUA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027 telah rampung disepakati pada 14 Agustus lalu.

Memasuki Masa Persidangan Pertama Tahun 2026/2027, Muhidi mengingatkan tantangan berat yang membayang di depan mata, khususnya penyusunan APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026 di tengah kondisi ruang fiskal daerah yang terimpit.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruesimy menggarisbawahi pentingnya efisiensi belanja serta kejelian menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemprov dan DPRD dituntut memastikan setiap alokasi APBD di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur memberikan dampak riil bagi kesejahteraan masyarakat. *

NEWS

BREAKING
NEWS!



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



KETUA DPRD Sumbar Muhidi menyerahkan dokumen hasil reses anggota dewan kepada Wagub Sumbar Vasko Ruseimy, dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Wakil Ketua DPRD Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda Satria, dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi menutup Masa Persidangan Ketiga Tahun 2025/2026 dan membuka Masa Persidangan Pertama Tahun 2026/2027.



KETUA DPRD Sumbar Muhidi, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Wakil Ketua DPRD Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda Satria, dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar.





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
KORAN PADANG SENIN, 31 AGUSTUS 2026		4

Bupati John Kenedy Azis Ingatkan Pengakuan Hukum Adat Harus Tetap Menjunjung HAM

PADANG, KP - Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menegaskan pentingnya menempatkan hukum pidana adat secara proporsional dalam sistem peradilan nasional. Pengakuan terhadap hukum adat harus tetap selaras dengan kepastian hukum, asas legalitas, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Pelantikan dan Seminar Nasional Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat di Padang, Sabtu (29/8).

John Kenedy menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengambil alih peran masyarakat adat. Peran pemda adalah sebagai fasilitator, pelindung, regulator, dan pengawas agar penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan hukum nasional.

"Prinsip yang perlu kita kedepankan adalah adat dipertahankan, masyarakat dilindungi, hu-

kum nasional dihormati," kata Bupati.

Ia menjelaskan, di Kabupaten Padang Pariaman, struktur nagari dan lembaga adat seperti ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, serta bundo kanduang memegang peran vital dalam menjaga ketertiban sosial. Penguatan hukum adat diharapkan mampu mendorong penyelesaian masalah secara bermartabat dan mendukung keadilan restoratif.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar penerapan hukum adat memiliki batasan yang jelas dan terukur. "Hukum pidana adat tidak seharusnya dihapus, tetapi juga tidak boleh diterapkan tanpa batas. Posisi idealnya adalah mengakui eksistensi sinya sepanjang memenuhi persyaratan hukum nasional dan HAM," ujarnya.

Seminar yang dibuka oleh Gubernur Sumbar tersebut juga menghadirkan Anggota DPR RI Komisi XIII Arisal Azis dan Ketua DPRD Sumbar Muhidi sebagai narasumber. (ak/*)



BUPATI Padang Pariaman John Kenedy Azis (kanan) saat menyampaikan materi dalam Seminar Nasional JMSI Sumbar di Padang, Sabtu (29/8).





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Haluan Martua Uraan Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat	SENIN, 31 AGUSTUS 2026	8

PERCEPAT DIGITALISASI PENDIDIKAN

Wakil Ketua DPRD Sumbar Salurkan 140 Laptop ke Dua SMA

PADANG, HALUAN — Percepat digitalisasi pendidikan, dua SMA negeri Kota Padang terima puluhan bantuan laptop dari dana pokok pikiran Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman.

Kedua SMA tersebut yakni SMAN 17 Padang yang mendapatkan 80 bantuan laptop dan SMAN 12 Padang sebanyak 60 unit laptop. Laptop tersebut telah diterima pihak sekolah dan telah diserahkan baru-baru ini.

Evi Yandri mengatakan dua SMA itu dipilih sebagai penerima yakni sekolah baru dan

sekolah terdampak bencana. Dimana SMAN 17, Padang merupakan sekolah baru yang dibangun pada 2022. Sementara SMAN 12 Padang merupakan salah satu sekolah di Sumbar yang mengalami dampak terparah akibat bencana hidrometeorologi November 2026 lalu.

"Tujuan pemberian laptop ini seiring dengan program

pemerintah yakni digitalisasi pendidikan. Semoga bantuan tersebut dapat membantu percepatan program ini," ujar Evi Yandri.

Ia mengatakan, dirinya sepakat pada pola pikir Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa untuk memperbaiki dan memajukan sebuah negara maka sumber daya manusia (SDM) lah yang perlu dibina. Salah satunya melalui pendidikan.

"Jika SDM nya bagus maka daerah dan negara bisa berkembang dan maju. Namun jika SDM lemah maka kemajuan akan sulit dicapai," katanya lagi.

Saat meninjau penggunaan laptop di kedua sekolah tersebut pekan lalu, Evi Yandri berpesan pada para siswa untuk fokus dalam belajar dan mengasah kemampuan diri.

"Fokuslah menimba ilmu dan bentuk karakter diri dengan aktif berkegiatan positif melalui ekstrakurikuler," katanya.

Di zaman sekarang menurut Evi, semua siswa harus mampu mengembangkan kemampuan dan ilmu sebaik mungkin. Apalagi globalisasi sudah di depan mata, maka persaingan semakin ketat.

Ia juga berpesan pada para siswa untuk terus menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif.

"Ini juga marak di Sumbar dan harus dijauhi. Seperti tawuran, narkoba dan seks bebas. Termasuk juga judi online. Jangan coba-coba atau ikut-ikutan. Sekali terjerumus hancur masa depan seumur hidup," katanya.



WAKIL Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman saat menyerahkan bantuan laptop untuk SMA di Kota Padang



SAAT berdiskusi dengan siswa



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA



WAKIL Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman berdiskusi dengan siswa di sekolah yang diberi bantuan

Pada pihak sekolah, terutama para guru, Evi juga meminta pengawasan ditingkatkan. Salah satunya para guru harus mengetahui jenis narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Termasuk ciri-ciri pemakai.

"Dengan mengetahui maka kita akan mudah mengawasi para siswa. Tingkatkanlah kepedulian kita pada siswa karena masa depan daerah dan negara ini ada pada mereka. Jika mereka rusak maka rusak pula daerah dan negara ini," paparnya.

Evi juga berpesan agar bantuan laptop yang diberikan dirawat dengan baik sehingga bisa bermanfaat jangka panjang.

Saat peninjauan kedua sekolah tersebut, Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pen-

didikan Sumbar, Mahya juga berpesan hal yang sama. Bahwa bantuan yang diberikan mesti dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan digitalisasi pendidikan. Selain juga dirawat dan dijaga agar bisa bermanfaat untuk

banyak siswa.

Sementara kepala sekolah SMAN 17 dan SMAN 12 Padang sama-sama mengapresiasi dan berterima kasih pada kepedulian Evi Yandri yang telah memberikan bantuan pada sekolah. (*)



SISWA dan guru SMAN 17 Padang berfoto bersama dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
POSMETRO PADANG		//
SENIN, 31 AGUSTUS 2026		

Hukum Adat Merupakan Bagian Dari Kekayaan Hukum

PDG.PARIAMAN, METRO

Hukum adat merupakan bagian dari kekayaan hukum yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Namun, pengakuan terhadap hukum pidana adat harus tetap berjalan dalam koridor kepastian hukum, asas legalitas, hak asasi manusia (HAM), serta kesatuan sistem peradilan pidana nasional. Hal tersebut ditegaskan Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis, kemarin, saat didaulat menjadi salah satu narasumber dalam Pelantikan dan Seminar Nasional Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat Masa Bakti 2025-2030, di Padang.

Dalam seminar yang mengangkat tema "Pengakuan Eksistensi Hukum Pidana Adat dan Tantangan Kodifikasi, serta Batasan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional" tersebut, John Kenedy Azis menekankan pentingnya menempatkan hukum adat secara proporsional dalam sistem hukum Indonesia.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh mengambil alih peran masyarakat adat. Pemerintah harus hadir untuk memastikan hukum adat tetap hidup dan berkembang, sekaligus memberikan perlindungan agar penerapannya tidak bertentangan dengan hukum nasional. "Pemerintah daerah tidak boleh mengambil alih peran masyarakat adat. Pemerintah daerah harus menjadi fasilitator, pelindung, regulator, penghubung, dan pengawas," tegasnya.

Ia menjelaskan, kehadiran pemerintah daerah dalam penguatan hukum



efa nurza/posmetro

NARA SUMBER—Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis, saat didaulat menjadi salah satu narasumber dalam Pelantikan dan Seminar Nasional Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat.

lui sejumlah langkah strategis. Di antaranya melakukan inventarisasi hukum adat, memfasilitasi musyawarah masyarakat adat, melibatkan niniak mamak dan lembaga adat, serta menggandeng akademisi dan ahli hukum. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum, menyusun regulasi daerah, melakukan pembinaan, serta memastikan pelaksanaan hukum adat melalui monitoring dan evaluasi. Padangpariaman dan Kekuatan Hukum Adat

Dalam konteks Kabupaten Padangpariaman, John Kenedy menyebut hukum adat memiliki posisi yang sangat strategis. Sebab, kehidupan sosial masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh struktur

Minangkabau. Kekuatan tersebut tercermin melalui peran niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, tokoh masyarakat, serta lembaga adat yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga tatanan kehidupan masyarakat.

Karena itu, menurutnya, penguatan hukum adat tidak semata-mata berbicara mengenai aturan atau sanksi, tetapi juga bagaimana nilai-nilai adat dapat menjadi instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara bermartabat. "Prinsip yang perlu kita kedepankan adalah: adat dipertahankan, masyarakat dilindungi, hukum nasional dihormati," ujarnya. Ia menambahkan, penguatan hukum

harus diarahkan untuk memperkuat ketertiban sosial, mencegah konflik, memperluas penyelesaian melalui musyawarah, memperkuat nilai kebersamaan, menjaga identitas budaya, mendukung keadilan restoratif, serta memperkuat hubungan antara masyarakat adat dan pemerintah. Tidak Dihapus, Tidak Pula Tanpa Batas

Lebih jauh, Bupati yang berlatar belakang hukum tersebut mengingatkan bahwa pengakuan terhadap hukum pidana adat harus ditempatkan dalam keseimbangan antara penghormatan terhadap hukum yang hidup di masyarakat dengan prinsip-prinsip negara hukum. Menurutnya, terdapat dua kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan,

hukum adat sebagai hukum yang hidup dan kepastian hukum, asas legalitas, HAM, serta kesatuan sistem peradilan pidana nasional. "Jadi, hukum pidana adat tidak seharusnya dihapus, tetapi juga tidak boleh diterapkan tanpa batas. Posisi yang paling ideal adalah mengakui eksistensinya sepanjang memenuhi persyaratan hukum nasional dan HAM, dengan penerapan yang terukur dan dapat diuji di pengadilan," jelas John Kenedy. Pandangan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya membangun titik temu antara kearifan lokal dengan sistem hukum nasional. Hukum adat tidak ditempatkan sebagai lawan dari hukum negara, tetapi sebagai bagian dari kekayaan hukum Indonesia yang keberadaannya perlu dihormati dengan tetap menjunjung prinsip negara hukum.

Seminar Nasional Berlangsung Dinamis Seminar nasional tersebut dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat dan berlangsung dinamis. Kegiatan dihadiri jajaran pengurus dan anggota JMSI, awak media, mahasiswa, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat. Selain Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis, seminar juga menghadirkan Anggota DPR RI Komisi XIII Arisal Azis dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Muhidi, M.M. sebagai narasumber. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk mempertemukan perspektif pemerintah daerah, legislatif, akademisi, masyarakat adat, dan insan pers dalam membahas masa depan hukum adat di tengah perkembangan sistem hukum nasional. (efa)



KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SENIN 31 AGUSTUS 2026	7

Penguatan Hukum Adat Harus Sejalan Hukum Nasional

Padang, Padek—Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menegaskan hukum pidana adat tetap memiliki tempat dalam sistem hukum Indonesia. Namun, penerapannya harus dibatasi oleh kepastian hukum, asas legalitas, hak asasi manusia (HAM), dan sistem peradilan pidana nasional.

Hal itu disampaikan John Kenedy Azis saat menjadi narasumber dalam Pelantikan dan Seminar Nasional Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat Masa Bakti 2025-2030 di Padang, Sabtu (29/8).

Seminar tersebut mengangkat tema "Pengkakuan Eksistensi Hukum Pidana Adat dan Tantangan Kodifikasi, serta Batasan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional".

Menurut John Kenedy, hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, keberadaannya tidak semestinya dihilangkan. Namun, pengakuan tersebut tidak berarti hukum pidana adat dapat diterapkan secara bebas tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku secara nasional. "Jadi, hukum pidana adat tidak seharusnya dihapus, tetapi juga tidak boleh diterapkan tanpa batas," tegasnya.

Ia menilai posisi ideal hukum pidana adat adalah tetap diakui sepanjang memenuhi persyaratan hukum nasional



PEMAB PADANG PARIAMAN UNTUK PADEK

SEMINAR HUKUM ADAT: Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menjadi narasumber dalam Seminar Nasional JMSI Sumbar yang membahas eksistensi hukum pidana adat dan batas penerapannya dalam sistem peradilan pidana nasional, di Padang, Sabtu (29/8).

dan HAM. Penerapannya juga harus terukur serta dapat diuji melalui mekanisme peradilan.

John Kenedy mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Pemda, katanya, tidak boleh mengambil alih kewenangan masyarakat adat, tetapi harus hadir sebagai fasilitator, pelindung, regulator, penghubung, dan pengawas.

"Pemerintah daerah tidak boleh mengambil alih peran masyarakat adat. Pemerintah daerah harus menjadi fasilitator, pelindung, regulator, penghubung, dan pengawas," ujarnya.

Untuk memperkuat keberadaan hukum adat, pemerintah daerah dapat melakukan inventarisasi hukum adat, memfasilitasi musyawarah masyarakat adat, serta melibatkan niniak

mamak dan lembaga adat. Penguatan tersebut juga perlu melibatkan akademisi, ahli hukum, serta aparat penegak hukum.

Selain itu, pemerintah daerah dinilai perlu menyusun regulasi yang menjadi landasan penerapan hukum adat, melakukan pembinaan, serta memastikan pelaksanaannya melalui monitoring dan evaluasi.

Konteks Padang Pariaman

Di Padang Pariaman, hukum adat dinilai memiliki posisi penting karena kehidupan sosial masyarakat masih kuat dipengaruhi struktur nagari dan nilai-nilai adat Minangkabau.

Peran niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, tokoh masyarakat, dan lembaga adat menjadi bagian penting dalam menjaga

ga ketertiban sosial.

John Kenedy menilai penguatan hukum adat tidak semata-mata berkaitan dengan aturan dan pemberian sanksi. Lebih dari itu, nilai-nilai adat dapat menjadi instrumen untuk mencegah konflik dan menyelesaikan persoalan masyarakat melalui musyawarah.

"Prinsip yang perlu kita kedepankan adalah: adat dipertahankan, masyarakat dilindungi, hukum nasional dihormati," katanya.

Ia menyebut penguatan hukum adat di Padang Pariaman dapat diarahkan untuk memperkuat ketertiban sosial, mencegah konflik, memperluas penyelesaian melalui musyawarah, menjaga identitas budaya, mendukung keadilan restoratif, serta memperkuat hubungan masyarakat adat dengan pemerintah.

Seminar nasional JMSI tersebut dibuka Gubernur Sumatera Barat dan dihadiri jajaran pengurus serta anggota JMSI, insans pers, mahasiswa, akademisi, dan elemen masyarakat.

Selain John Kenedy Azis, narasumber lainnya yakni Anggota DPR RI Komisi XIII Arisal Azis dan Ketua DPRD Sumatera Barat Drs. H. Muhidi, M.M.

Forum tersebut membahas posisi hukum adat di tengah perkembangan sistem hukum nasional, sekaligus mencari titik temu antara kearifan lokal, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara. (sel)





KLIPING BERITA

KORAN	HARI/TANGGAL	HALAMAN
Padang Ekspres	SENIN 31 AGUSTUS 2026	5

DPRD Perkuat Regulasi Pertanian dan Pen didikan

PETANI masih berhadapan dengan gagal panen, harga komoditas yang naik-turun, akses modal yang terbatas hingga minimnya sarana produksi. Di sisi lain, pendidikan Sumatera Barat dinilai belum cukup kuat membentuk karakter Minangkabau sekaligus membekali generasi muda menghadapi persaingan global.

Dua persoalan itu kini coba dijawab DPRD Sumbar melalui pembenahan regulasi.

Dewan menggodok dua rancangan peraturan daerah (ranperda), yakni perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Penyempurnaan keduanya dibahas melalui focus group discussion (FGD), Rabu (26/8).

Untuk sektor pertanian, Komisi II DPRD Sumbar menilai petani membutuhkan perlindungan yang lebih konkret, bukan sekadar program bantuan. Regulasi baru diarahkan mengatur dukungan pemerintah sejak proses produksi hingga menghadapi risiko usaha tani.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak, mengatakan perlindungan petani menjadi perhatian utama dalam penyusunan ranperda tersebut.

Karena itu, OPD terkait, dinas pertanian kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga profesi dan organisasi sektor pertanian dilibatkan.

"Kami dari Komisi II sangat fokus dengan perlindungan petani," ujar Khairuddin.

Menurutnya, salah satu persoalan krusial yang perlu diantisipasi adalah gagal panen. Petani harus memiliki jaring pengaman ketika produksi terganggu, termasuk melalui skema asuransi pertanian.

"Kalau gagal panen ada asuransi yang membantu petani. Kemudian ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai bagi mereka dalam melakukan aktivitas pertanian," katanya.

Khairuddin menyebut pembahasan ranperda tidak dimulai dari nol. Komisi II telah berdiskusi dengan OPD Pemprov Sumbar, menyerap aspirasi petani di sejumlah kabupaten/kota, melakukan studi banding ke daerah yang telah memiliki regulasi serupa dan berkonsultasi dengan kementerian terkait.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, menilai perlindungan petani harus menyentuh akar persoalan. Akses pembiayaan, asuransi, teknologi, penyuluhan, penguatan kelembagaan hingga

pemasaran hasil pertanian harus mendapat tempat dalam kebijakan.

"Ranperda ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi petani Sumatera Barat dalam memperoleh perlindungan dari risiko gagal panen, fluktuasi harga, bencana alam dan ancaman lainnya," tegas Nanda.

Pendidikan Juga Dirombak

Sementara itu, Komisi V DPRD Sumbar menyoroti kelemahan lain: Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dinilai belum cukup menjawab kebutuhan pendidikan masa kini.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, mengatakan perda yang berlaku saat ini masih lebih banyak mengatur aspek administratif. Penguatan karakter peserta didik berbasis nilai Minangkabau belum mendapat penekanan yang memadai.

"Perda yang ada belum secara eksplisit menekankan pembentukan karakter generasi Minangkabau dalam aspek religius, diplomasi, kewirausahaan, dan seni budaya," kata Lazuardi.

Karena itu, perubahan perda diarahkan lebih jauh. Pendidikan karakter berbasis budaya Minangkabau, peningkatan literasi, pen-



WAKIL Ketua DPRD, pimpinan Komisi II dan pakar dalam FGD soal Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.





SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KLIPING BERITA

KO



WAKIL Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria membahas Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bersama Komisi II dan pakar dalam FGD.

guatan pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi guru, perlindungan hukum tenaga pendidik, serta pendidikan khusus menjadi bagian dari rancangan baru.

DPRD juga ingin penguasaan bahasa internasional diperkuat. Bahasa Inggris, Arab dan Mandarin didorong menjadi bekal generasi muda agar lulusan Sumbar tidak hanya kuat secara lokal, tetapi mampu bersaing secara global.

Di saat yang sama, pendidikan berbasis surau ingin dihidupkan kembali dan disinergikan dengan

sistem pendidikan modern.

Lazuardi menilai pendidikan surau memiliki nilai historis dan filosofis yang kuat dalam pembentukan karakter masyarakat Minangkabau.

Nanda Satria menegaskan perubahan perda pendidikan merupakan upaya mengubah orientasi pendidikan Sumbar agar tidak berhenti pada urusan administratif.

"Kita ingin memastikan bahwa pendidikan di Sumbar mampu mengintegrasikan kecerdasan global melalui penguasaan bahasa

internasional dengan kekokohan jati diri lokal melalui revitalisasi peran surau serta falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," ujarnya.

Dua ranperda tersebut pada akhirnya menghadapkan DPRD Sumbar pada satu pekerjaan besar: memastikan aturan yang lahir tidak sekadar bagus di atas kertas, tetapi benar-benar bekerja ketika petani menghadapi gagal panen dan ketika generasi muda memasuki persaingan dunia. (*)



PIMPINAN dan anggota Komisi V bersama pakar dan tokoh pendidikan dalam FGD membahas perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.





KLIPING KORAN



**Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang Telp. (0751) 7057391 - 705753
Fax. (0751) 7059328 Padang 25133, Sumatera Barat**